

**IMPLEMENTASI PROGRAM RUANG PUBLIK  
TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)  
(STUDI PADA RPTRA KELURAHAN KEMBANGAN UTARA KOTA  
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh ujian skripsi  
Pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SHUGY RAKASIWI**

**135030100111109**



**Dosen Pembimbing :**

**Wike, S.Sos., M.Si., DPA**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK  
MALANG**

**2019**

## MOTTO

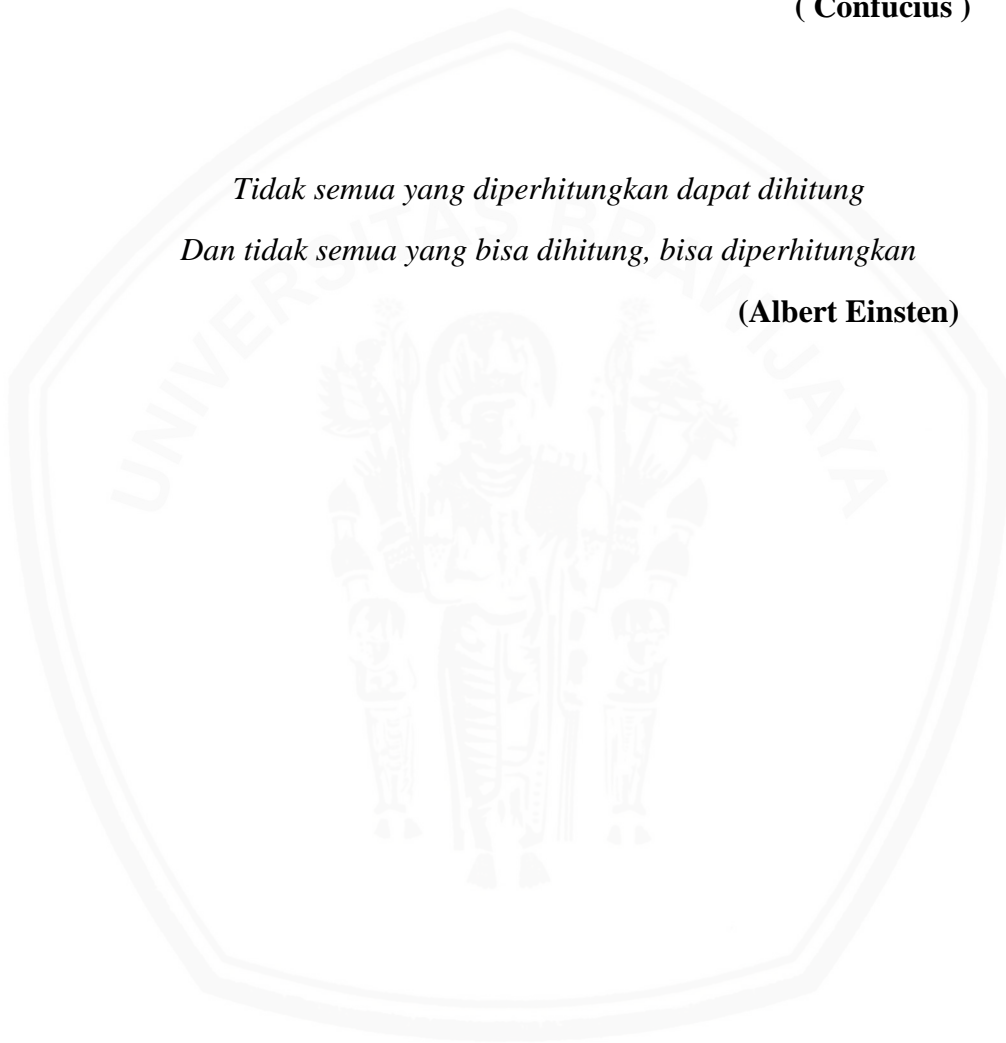
*It doesn't matter how slowly you go as long as you do not stop.*

**( Confucius )**

*Tidak semua yang diperhitungkan dapat dihitung*

*Dan tidak semua yang bisa dihitung, bisa diperhitungkan*

**(Albert Einsten)**



**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

Judul : Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah  
Anak (RPTRA) (Studi pada RPTRA Kelurahan  
Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat)

Disusun oleh : Shugy Rakasiwi

NIM : 135030100111109

Fakultas : Ilmu Administrasi

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi/Minat : -

Malang, 13 Agustus 2018

Komisi Pembimbing

Ketua



**Wike, S.Sos. M.Si. DPA**  
**NIP. 19701126 200212 2 005**

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 18 Desember 2018  
Jam : 10.00 – 11.00 WIB  
Skripsi atas nama : Shugy Rakasiwi  
Judul : Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Studi pada RPTRA Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat)

Dan dinyatakan **LULUS**

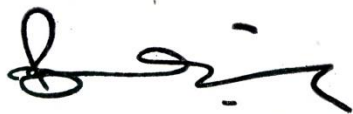
**MAJELIS PENGUJI**

Ketua Komisi Pembimbing



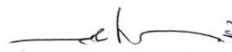
**Wike, S.Sos., M.Si., DPA**  
NIP. 19701126 200212 2 005

PENGUJI I



**Dr. Fadillah Putra, S.Sos., M.Si., MPAff., Ph.D**  
NIP. 19740627 200312 1 001

PENGUJI II



**Mochamad Chazienul Ulum, S.Sos., MPA**  
NIP. 19740614 200501 1 001

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah diperoleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU) No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.

Malang, 13 Agustus 2018



Nama : Shugy Rakasiwi

NIM : 135030100111109

## RINGKASAN

Shugy Rakasiwi, 2018. **Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Studi pada RPTRA Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.)** Wike, S.Sos, M.SI, DPA.

Permasalahan Kota Layak Anak saat ini menjadi perhatian khusus dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, perlu adanya pemenuhan indikator untuk menjadikan Jakarta sebagai Kota Layak Anak. Dalam mencapai keberhasilan dalam menjadi Kota Layak Anak, dibuatlah program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

Penelitian menggunakan jenis penelitian deksriptif dan pendekatan kualitatif. Penelitian berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Barat dengan situs penelitian antara lain RPTRA Kelurahan Kembangan Utara, Kantor Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DKI Jakarta, Kantor Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Jakarta Barat, Kantor Dinas Kesehatan Jakarta Barat, Kantor TP-PKK Jakarta Barat, Kantor Dinas Perpustakaan Daerah Jakarta Barat, Kantor Kelurahan Kembangan Utara. Fokus dalam penelitian ini adalah : 1) Impementasi program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat, 2) Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi implementasi program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program RPTRA Kembangan Utara sudah berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu, 2) Sumberdaya yang ada dalam implementasi program RPTRA Kembangan Utara untuk sumberdaya fasilitas dan sumberdaya anggaran sudah memadai sedangkan untuk sumberdaya manusia belum memadai, 3) Disposisi yang ada dalam implementasi program RPTRA Kembangan Utara sudah berjalan dengan baik, 4) Struktur organisasi yang ada dalam implementasi program RPTRA Kembangan Utara sudah berjalan baik, 5) Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi program RPTRA Kelurahan Kembangan Utara antara lain : a) Adanya peraturan Gubernur tentang pengelolaan RPTRA, b) Adanya bantuan dana baik dari pihak swasta maupun masyarakat, 6) Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program RPTRA Kelurahan Kembangan Utara antara lain : a) Tidak adanya anggaran khusus dinas-dinas terkait, b) Kurangnya jumlah pengelola RPTRA, c) Masyarakat yang merusak fasilitas RPTRA.

Saran yang diberikan peneliti antara lain penambahan sumberdaya manusia yakni pengelola RPTRA, , adanya anggaran khusus yang diberikan kepada dinas- dinas terkait yang mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan- kegiatan yang ada dalam RPTRA.

## SUMMARY

Shugy Rakasiwi, 2018. **The implementation of the Child Friendly Integrated Public Space Program (RPTRA) (Study at RPTRA Kembangan Utara Village West Jakarta Administration City.)** Wike, S.Sos, M.Si, DPA.

Problems with Decent Cities Children were becoming a special concern nowadays DKI Jakarta Government. Therefore, there were needs to be fulfillment indicator to make Jakarta as a Child-Friendly City. To achieve a success in becoming a Child-Friendly City, a Publik Space program was created as Child-Friendly Integrated. The purpose of this study is to find out how The Implementation of the Child Friendly Integrated Public Space Program in Kembangan Utara Village West Jakarta Administration City.

This research using descriptive and qualitative approach. The research was located in the City Administration of West Jakarta with the site research including the RPTRA of Kembangan Utara, Office of Service Empoerment, Child Protection and DKI Jakarta Population Control, West Jakarta Office of Communication, Information and Public Relations, West Jakarta Health Office, West Jakarta TP-PKK Office, Service Office West Jakarta Regional Library, Kembangan Utara Village Office. Focus in this study are : 1) Implementation of the RPTRA Program in Kembangan Utara Village West Jakarta, 2) Obstacles and supporting factors affect in the implementation of the RPTRA program in Kembangan Utara Village, West Jakarta.

The results of this study are : 1) Communication carried out within the implementation of the RPTRA Kembangan Utara Village program has gone well over time, 2) Resources in the implementation of the program RPTRA Kembangan Utara Village for facilities resources and budget resources is adequate while for human resources not yet fined, 3) Existing dispositions in the implementation of the RPTRA program Kembangan Utara Village has proceeded with well, 4) the organizational structure that exists in the implementation of the RPTRA program Kembangan Utara Village has gone well, 5) Supporting factors that influence the implementation of the RPTRA program in Kembangan Utara Village include : a) there is a governor's regulation regarding RPTRA management, b) there is assistance funds from both private and public parties, 6) the obstacles factors influence the implementation of the RPTRA program in Kembangan Utara Village among other things : a) there is no special budget for realted agencies, b) Lack number of RPTRA managers, c) Communities that damage RPTRA facilites.

The suggestion given by researcher include adding resources manager of RPTRA, , the special budget given to relevant agencies that have internal responsibility activites in the RPTRA.



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala ketulusan dan kerelaan hati  
Kuucapkan rasa syukur kepada Allah SWT,  
Ku persembahkan karya kecil ini untuk :

*Ayah dan Ibuku tersayang*

*Achmad Yani dan Nyam Gusilawati*

*Yang tidak pernah berhenti mendoakan dalam tiap hembusan nafas di tiap sujudnya, yang selalu memberikan dukungan, nasihat dan motivasi untuk terus dapat menyelesaikan skripsiku selama ini.*

*Seseorang yang berharga*

*Syahmina Arifa Ardiani*

*Terima kasih atas perhatian, dukungan dan semangat yang kamu berikan selama ini, yang selalu menghiburku disaat lelah menyelesaikan skripsiku dan seseorang yang selalu menemaniku ketika rasa bosan muncul.*

*Jeman-temanku*

*Jeman seangkatan kelas H*

*Kelompok Magang Pemkot Malang (Heru, Ramot, Aye)*

*Terima kasih telah banyak memberikan bantuan, semangat dan arahan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini.*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) studi pada RPTRA Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Drs. Andy Fefta Wijaya, M.DA, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
3. Bapak Dr. Fadillah Amin, M.AP, Ph.D selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Drs. Minto Hadi, M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir.
5. Ibu Wike, S.Sos, M.Si, DPA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang selalu memberi bimbingan, saran, arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan.

7. Seluruh staff/pegawai Fakultas Ilmu Administrasi, yang telah membantu dalam kelancaran segala urusan dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staff dan pegawai Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta, terutama Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA DPPAPP DKI Jakarta yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Muhammad Nur selaku perwakilan Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
10. Bapak Ignatius widodo K sebagai Kepala Seksi Komunikasi Informasi Publik Suku Dinas Komunikasi Informasi Jakarta Barat yang telah membantu penulis dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
11. Ibu Rani Widya Hani selaku Pustakawan I Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Barat yang telah membantu dalam memberikan data yang diperlukan dan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
12. Seluruh staff dan pegawai Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan Kembangan Utara yang telah membantu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
13. Ibu Eti Bambang sebagai ketua Pokja 2 PKK Jakarta Barat yang telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
14. Seluruh staff dan pegawai Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat, terutama Ibu Euis Dewi Sartika sebagai ketua seksi kesejahteraan rakyat kelurahan Kembangan Utara yang telah menjawab pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
15. Kedua orang tua yang selalu mendukung dan mendoakan anaknya hingga skripsi ini selesai.

16. Teman-teman seperjuangan angkatan 2013, terutama jurusan administrasi publik yang selalu mendukung, memberi semangat, dan juga memberi masukan baik kritik maupun saran untuk skripsi ini.
17. Teman-teman magang, heru, ramot, ave yang selalu mendukung, memberi semangat dan juga memberi masukan baik kritik maupun saran untuk skripsi ini.

Demi menyempurnakan skripsi ini, kritik dan saran yang bersifat memnbagun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, 4 Januari 2019

Shugy Rakasiwi

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>ii</b>
<b>TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>TANDA PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR ORISINALITAS SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>SUMMARY .....</b>	<b>vii</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>

<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	19
C. Tujuan Penelitian .....	20
D. Kontribusi Penelitian .....	20
E. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>24</b>
A. Kebijakan Publik .....	24
1. Konsep Kebijakan Publik .....	24
2. Pengertian Kebijakan Publik .....	25
3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	27
B. Program .....	30
1. Pengertian Implementasi Program .....	31
2. Tahap-Tahap Implementasi Program .....	32
3. Unsur-Unsur Implementasi Program .....	34
4. Proses Implementasi Program .....	35
5. Model-Model Implementasi Program .....	35
6. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program ...	41
C. Perlindungan Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) & Sustainable Development Goals (SDGs) .....	45

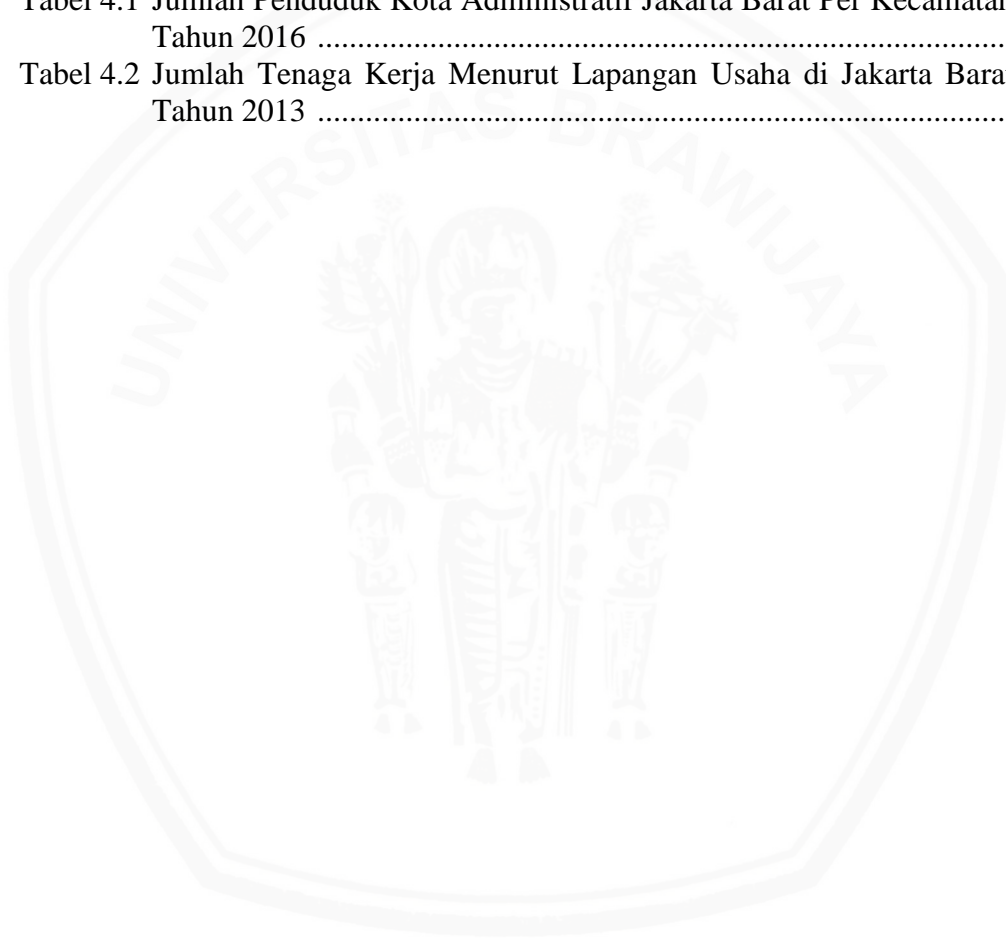
D. Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) .....	48
1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA).....	49
2. Layanan dan Kegiatan .....	50
3. Pengorganisasian .....	51
4. Anggaran RPTRA .....	58
5. Dasar Hukum Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) .....	59
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>62</b>
A. Jenis Penelitian .....	62
B. Fokus Penelitian .....	63
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	65
D. Jenis dan Sumber Data.....	66
E. Teknik Pengumpulan Data .....	68
F. Instrumen Penelitian.....	70
G. Analisis Data .....	71
H. Uji Keabsahan Data .....	74
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>76</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	76
1. Gambaran Umum Kota Administratif Jakarta Barat .....	76
a. Kondisi Geografis .....	77
b. Kondisi Demografi .....	79
2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) .....	81
a. Tugas dan Fungsi .....	81
b. Struktur Organisasi .....	83
B. Penyajian Data dan Fokus.....	96
1. Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ..	96
a. Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat .....	96
1. Komunikasi .....	97
2. Sumberdaya .....	106
3. Disposisi .....	120
4. Struktur Organisasi .....	122
2. Faktor Penghambat dan Pendukung yang mempengaruhi Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat ...	124
a. Faktor penghambat .....	124

b. Faktor pendukung .....	129
C. Pembahasan.....	131
1. Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat ...	131
a. Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat .....	132
1. Komunikasi Yang Digunakan dalam Menjalankan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak .....	132
2. Sumberdaya Yang Digunakan dalam Menjalankan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak .....	134
3. Disposisi Yang Digunakan dalam Menjalankan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak .....	138
4. Struktur Organisasi dalam Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak .....	139
2. Faktor Penghambat dan Pendukung yang mempengaruhi Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat....	142
a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program .....	142
b. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program .....	146
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>148</b>
A. Kesimpulan .....	148
B. Saran .....	149
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>151</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>156</b>

## DAFTAR TABEL

### Halaman

Tabel 1.1 10 Provinsi <i>Pilot Project</i> Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) .....	9
Tabel 1.2 Jumlah Kasus Anak di DKI Jakarta yang Ditangani Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) ..	11
Tabel 1.3 Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta .....	12
Tabel 1.4 Data Lokasi, CSR dan Waktu Peresmian Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Tahun 2015 .....	17
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kota Administratif Jakarta Barat Per Kecamatan Tahun 2016 .....	79
Tabel 4.2 Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Jakarta Barat Tahun 2013 .....	80





## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Jumlah Klaster Pengaduan Masalah Sosial Anak di Indonesia Tahun 2011-2014 .....	3
Gambar 2.1 Tahapan Kebijakan Publik .....	27
Gambar 2.2 Implementasi Kebijakan <i>Continentalist</i> .....	36
Gambar 2.3 Model Kesesuaian Implementasi Program .....	36
Gambar 2.4 Model Implementasi George C. Edwards III .....	40
Gambar 3.1 <i>Component of Data Analysis (Interactive Model)</i> .....	72
Gambar 4.1 Peta Kota Administasi Jakarta Barat .....	78
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) .....	84
Gambar 4.3 Sosialisasi Kegiatan Program Pangan Murah oleh Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	100
Gambar 4.4 Kegiatan Program Pangan Murah di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	105
Gambar 4.5 Ruang Perpustakaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	116
Gambar 4.6 Ruang Laktasi dan Ruang Konsultasi Keluarga Berencana di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	117
Gambar 4.7 Ruang Sekretariat Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	118
Gambar 4.8 Ruang PKK-Mart Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	118
Gambar 4.9 CCTV di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	119
Gambar 4.10 Lokasi <i>Outdoor</i> Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	119
Gambar 4.11 Tembok Jebol di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	128
Gambar 4.12 Tembok Yang Sudah Diperbaiki di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara .....	129

## DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Pengajuan Riset .....	156
	a. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta .....	156
	b. Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Jakarta Barat .....	158
	c. Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat .....	159
	d. PKK Jakarta Barat .....	160
	e. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jakarta Barat .....	161
	f. Kantor Perpustakaan Daerah Jakarta Barat .....	162
	g. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat .....	163
2.	Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 349 Tahun 2015 ..	165
3.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 ....	166
4.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016 .....	167
5.	Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 283 Tahun 2016 ....	168
6.	Pedoman Wawancara .....	169
7.	Dokumentasi .....	171

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara akan terus mengalami suatu pembangunan yang menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan di sini memiliki arti sebagai usaha/rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*national building*) (Siagian, 2003:4). Pembangunan suatu negara tidak hanya berfokus pada segi infrastruktur atau ekonomi negara tersebut, tapi juga pembangunan yang ditujukan pada pengembangan kualitas sumber daya manusianya. Pengembangan kualitas sumber daya manusia harus dipersiapkan sedini mungkin bahkan sejak masa kanak-kanak, karena pada akhirnya anak merupakan generasi penerus bangsa. Kalimat ini mengartikan bahwa anak merupakan salah satu bagian untuk pembangunan sebuah negara dimasa yang akan datang. Untuk itu, negara memiliki kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan anak-anak dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh anak-anak.


Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, pada bab I ketentuan umum pasal 1 ayat (2), yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Meskipun banyak rumusan mengenai batasan dan pengertian anak, namun pada prinsipnya perbedaan tersebut mempunyai implikasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan pada anak. Kemudian pengertian

anak menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun, pada faktanya permasalahan yang dialami anak semakin hari semakin memiliki kompleksitas dan banyak yang belum dapat terselesaikan. Beberapa permasalahan anak yang berkembang antara lain: anak terlantar, anak terkena gizi buruk, pekerja terburuk anak, anak putus sekolah, anak yang dilacurkan, kekerasan dan kejahatan seksual anak, anak jalanan, hingga anak-anak pengguna narkoba.

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada periode Januari 2011 sampai dengan September 2014 menunjukkan persentase jumlah pengaduan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dan kekerasan di Indonesia adalah yang tertinggi dengan 456 kasus pada September 2014, sehingga masalah kekerasan ini harus segera diperoleh jalan keluarnya. Berikut gambar klaster pengaduan masalah sosial anak di Indonesia.

## Gambar 1.1 Jumlah Klaster Pengaduan Masalah Sosial Anak di Indonesia

Tahun 2011-2014

Pelanggaran Hak Anak (Berdasarkan Pengaduan ke KPAI) Januari 2011- September 2014					
JUMLAH PENGADUAN		2011	2012	2013	Sep 2014
		546	1.400	1.538	1.408
Klaster Pengaduan		2011	2012	2013	Sep 2014
<b>ABH dan Kekerasan</b>		261	487	508	456
<b>Keluarga dan Pengasuhan Alternatif</b>		146	517	497	455
Pendidikan		53	185	133	123
Kesehatan		13	39	120	65
Agama dan Budaya		16	75	78	49
Traficking dan Eksploitasi		26	22	73	95
Pornografi dan Napza		10	44	51	100
Sosial dan Bencana		13	14	48	24
Hak Sipil dan Kebebasan		8	17	30	41

Sumber : KPAI 2014

Fakta tersebut memberikan gambaran bahwa perlindungan terhadap anak sangat diperlukan demi mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Keluarga, sebagai tempat berlindungnya anak memiliki peranan penting dalam memenuhi hak-hak anak, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak kesehatan dan hak untuk mendapatkan kasih sayang. Apabila keluarga dalam hal ini orang tua mengabaikan hak-hak anak, maka kekerasan terhadap anak sangat mungkin terjadi. Hal ini dapat diakibatkan karena faktor kondisi ekonomi keluarga yang tengah terpuruk, sehingga menyebabkan emosi meningkat dan anak menjadi tempat pelampiasan amarah orangtuanya. Kondisi itulah yang berdampak buruk pada kondisi anak, baik kondisi fisik maupun psikisnya, bukan tidak mungkin berpengaruh pada produktivitas anak di lingkungan sosialnya, teman sepermainan atau bahkan di sekolah sebagai tempat anak belajar (Chomaria,

2012:16). Maka, peran negara untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan serta melindungi hak-hak anak sangat dibutuhkan.

Dalam tataran internasional, perlindungan hak anak telah dibahas dalam Konvensi Hak Anak (KHA) oleh PBB pada tanggal 20 November tahun 1989. Berdasarkan KHA ada empat kategori hak yang harus dipenuhi oleh negara, yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, dan hak tumbuh kembang. Untuk memenuhi itu semua, maka UNICEF membentuk program *Child Friendly Cities* yang dikembangkan pada tahun 1996. Kota dipilih sebagai unit dalam pengembangan wilayah bagi anak karena kota merupakan unit terkecil di dalam sebuah struktur pemerintahan karena pemerintah kota yang memiliki otoritas terdekat dengan masyarakat (Riggio, 2002:45).

*World Fit For Children* merupakan sebuah agenda membentuk sebuah dunia yang baik untuk anak-anak dan telah ditandatangani oleh lebih dari 180 negara pada tahun 1990. *World Fit For Children* ini merupakan bagian dari bentuk mempromosikan dan melindungi hak setiap anak yang telah dituangkan dalam Konvensi Hak Anak. Perlindungan hak anak dalam masa sekarang juga masuk dalam tujuan yang terdapat pada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Setiap negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), termasuk Indonesia telah menyepakati komitmen global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pelaksanaan SDGs di Indonesia dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo dan melibatkan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang.

Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menguraikan tujuan global, sasaran global, dan sasaran nasional RPJMN 2015-2019. Tujuan global SDGs terdiri atas 17 tujuan sebagai berikut :

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.
  2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
  3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
  4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
  5. Menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
  6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
  7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
  8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
  9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
  10. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
  11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
  12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
  13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
  14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
  15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
  16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
  17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.
- (Sumber : Bappenas.go.id)



Indonesia telah melakukan inisiasi program *Child Friendly Cities* yang diterjemahkan menjadi program Kota Layak Anak (KLA). Inisiasi ini adalah sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan pemenuhan hak anak. Dasar hukum nasional yang memayungi perlindungan hak anak ini adalah sebagai berikut:

1. UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia

Pemerintah Indonesia mulai tahun 2006 melaksanakan Program Kabupaten/Kota Layak Anak atau biasa disebut KLA. KLA merupakan sistem pembangunan satu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam program kegiatan untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak ([kla.or.id](http://kla.or.id)).

Dalam pelaksanaannya, KLA mengacu pada 5 *cluster* hak anak yang perlu dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pertama, hak kebebasan. Kedua, hak anak untuk mendapatkan lingkungan dan pengasuhan alternatif. Ketiga, hak anak untuk mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan. Keempat, hak mendapatkan

pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, serta kelima, hak untuk mendapatkan perlindungan khusus.

Keberadaan KLA akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak, khususnya untuk masyarakat yang tinggal dan menetap di suatu wilayah. Kontribusi yang diberikan misalnya anak mampu memanfaatkan waktu luang untuk kegiatan budaya, serta yang terpenting anak mendapatkan hak-haknya seperti perlindungan dari tindakan kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat membahayakan anak. Program KLA merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kepedulian dan upaya konkrit aparat pemerintah baik Kabupaten/Kota maupun di Desa/Kelurahan, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak. Selain itu, juga bertujuan untuk menyatukan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber dana, sarana, prasarana, dan teknologi yang ada pada pemerintahan, partisipasi masyarakat serta dunia usaha yang terlibat, dalam upaya memenuhi hak-hak anak.

Dalam pelaksanaannya, program KLA yang dijalankan oleh pemerintah tidak semuanya berjalan lancar. Ada yang berhasil, ada pula yang berhenti di tengah jalan. Contoh yang berhasil melaksanakan program KLA misalnya Kabupaten Mojokerto, faktor keberhasilan KLA di Mojokerto antara lain karena adanya kebijakan, dukungan politis dan komitmen dari para pengambil keputusan dari Kabupaten/Kota sampai Kelurahan dan Desa, perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada Hak Anak, kapasitas kelembagaan dan SDM yang memadai, anak-anak yang secara aktif ikut berperan serta dalam proses pembangunan,

Kemitraan dengan LSM, Ormas dan Media Swasta, koordinasi yang efektif antar program dan instansi serta para pemangku kewajiban, dibangun dan berfungsinya fasilitas-fasilitas umum yang layak anak seperti sekolah, puskesmas, rumah sakit, tempat bermain dan rekreasi, ketersediaan data dan sistem informasi anak yang terpilah dan berkelanjutan serta Kabupaten dan Kota yang mampu menjalankan pemerintahan dengan baik serta bersih dari baha korupsi (Sumber website Bappeda Mojokerto, 2014). Selain keberhasilan, terdapat beberapa faktor kegagalan dalam pelaksanaan KLA. Misalnya, tidak adanya koordinasi antar pemangku kebijakan baik di Kabupaten/Kota maupun Kelurahan dan Desa, tidak adanya SDM yang memiliki komitmen melaksanakan program KLA serta keterbatasan anggaran untuk pemenuhan hak-hak anak.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia telah menginisiasi KLA sejak tahun 2006 di 5 Kabupaten/Kota dan 10 Kabupaten/Kota pada tahun 2007 serta di 38 Kabupaten/Kota pada tahun 2010. Pada Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan 10 Provinsi untuk mengembangkan KLA, Provinsi DKI Jakarta termasuk menjadi salah satu Provinsi yang ditunjuk untuk mengembangkan KLA bersama-sama dengan 38 Kabupaten/Kota lain di Indonesia. Berikut 10 Provinsi yang ditunjuk oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA):

**Tabel 1.1****10 Provinsi *Pilot Project* Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)**

NO	Nama Provinsi
1	DKI Jakarta
2	Banten
3	Jawa Barat
4	Jawa Tengah
5	Jawa Timur
6	Sumatera Utara
7	Bali
8	Kepulauan Riau
9	Kalimantan Timur
10	Daerah Istimewa Yogyakarta

Sumber: Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
RI No. 56 Tahun 2010

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta merupakan ibukota negara Republik Indonesia dan menjadi salah satu kota besar di Indonesia. Walaupun termasuk sebagai salah satu kota besar yang maju, Provinsi DKI Jakarta mempunyai beberapa permasalahan-permasalahan klasik yang dialami diantaranya adalah masalah kemacetan, banjir, dan salah satunya mengenai isu kritis terkait pemenuhan hak-hak anak. Alasan peneliti mengambil topik tentang perlindungan hak anak dan pemenuhan hak anak, adalah karena peneliti melihat begitu banyak

permasalahan anak yang terjadi khususnya di DKI Jakarta. Baik berupa tidak terpenuhinya hak anak, maupun kasus kekerasan yang melibatkan anak.

Berikut salah satu kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berumur 9 tahun yang terjadi di Rawa lele, Kalideres, Jakarta Barat. Ditemukan jasad anak perempuan berusia 9 tahun di daerah Kampung Belakang, Jembatan Sahabat, Kamal, Jakarta Barat pada 2 Oktober 2015. Jasad ditemukan dalam kardus dengan posisi kaki dan tangan ke arah dada. Anak perempuan tersebut bernama Putri yang tinggal di Rawa Lele dan dinyatakan hilang sejak pulang sekolah di hari yang sama pada saat jasadnya di temukan. Pelaku nya adalah tetangga dekat korban, yang dalam pengaruh obat-obatan narkotika tega membunuh dan memperkosa korban di kontrakan tempat tinggalnya. Kemudian membungkus jasad korban lalu di buang dipinggir jalan. (Kompasiana.com 2015).

Selanjutnya adalah kasus meninggalnya seorang anak karena tertabrak mobil milik tetangganya di Jl. KH Hasyim, Pondok Cabe RT/RW 005/001, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Jasa Raharja perwakilan Jakarta Barat dan cabang Jakarta merespons cepat meninggalnya Muhammad Fitrawansyah (7 Tahun) akibat ditabrak mobil. Keluarga korban diberikan santunan sebesar Rp. 50.000.000,- dari Jasa Raharja. Sedangkan korban luka-luka yang di rawat di RS Pondok Indah Puri mendapatkan santunan perawatan sampai dengan maksimal Rp. 20.000.000,-. Selain Fitra, ada seorang balita bernama ilham yang merupakan adik dari Fitra yang terluka akibat tabrakan yang terjadi pada Sabtu 24 Februari 2018 pukul 20.00 WIB. Kronologi kejadian

tersebut, mobil Honda Mobilio milik tetangga Fitra melintas dari arah utara ke selatan. Tepat di depan rumah nomor 18, mobil menabrak dua orang anak, yakni Fitra dan Ilham yang sedang bermain hingga mengakibatkan luka di kepala Fitra dan meninggal dunia di RS Pondok Indah Puri (News.detik.com 2018). Ini hanya sedikit dari kasus yang terjadi pada anak yang kemudian menjadi sorotan media. Masih banyak kasus anak lainnya yang terjadi di DKI Jakarta.

Berikut merupakan jumlah kasus anak yang ditangani oleh P2TP2A DKI Jakarta:

**Tabel 1.2**

**Jumlah Kasus Anak di DKI Jakarta yang Ditangani P2TP2A**

No.	Tahun	Jumlah Kasus Anak
1	2011	251
2	2012	325
3	2013	468
4	2014	553
Jumlah		1597

Sumber: P2TP2A DKI Jakarta, 2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kasus yang menimpa anak mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Berdasarkan data pada tabel tersebut juga dapat diketahui bahwa masih banyak anak yang mengalami tindak kekerasan di Provinsi DKI Jakarta. Jenis kasus yang dihadapi anak seperti penelantaran, pencabulan, perkosaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, eksploitasi anak untuk pekerjaan tertentu,

*trafficking*, diskriminasi anak, membawa lari anak dibawah umur, penganiayaan, pemanfaatan anak untuk jaringan obat-obatan terlarang, pelibatan anak dalam gerakan masa dan sebagainya. Dengan masih merebaknya tindak kekerasan pada anak, maka sudah tentu dapat dipastikan bahwa hak-hak anak menjadi belum terpenuhi.

Di DKI Jakarta sendiri belum tersedianya fasilitas bermain yang layak atau ramah anak menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak-hak anak. Ruang publik Jakarta sebagian besar berupa tempat parkir atau ruang terbuka hijau termasuk kawasan konservasi. Berikut data ruang terbuka hijau yang ada di DKI Jakarta:

**Tabel 1.3**

**Ruang Terbuka Hijau DKI Jakarta**

<b>Tahun</b>	<b>Presentase</b>
1973	77.8 %
1983	50.2 %
1993	24.9 %
2003	14.7 %
2013	9.8 %

Sumber : Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia

Dengan permasalahan yang ada terkait pemenuhan hak anak, DKI Jakarta perlu melakukan sesuatu terkait masalah tersebut. Karenanya, DKI Jakarta



menjadikan Kota Layak Anak menjadi salah satu program strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2013-2017 (bappenas.go.id DKI Jakarta 2017). Pengembangan KLA di Provinsi DKI Jakarta saat ini terdapat di Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Jakarta Selatan. Hal tersebut sesuai dengan yang tercantum di dalam Surat Keputusan Gubernur Nomor 394 tahun 2011 tentang Penunjukkan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan sebagai Pengembangan Kota Layak Anak. Dilanjutkan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 736 tahun 2013 tentang Penunjukkan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota Layak Anak berikutnya.

Serta Surat Keputusan Gubernur Nomor 1192/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. Gugus tugas KLA Provinsi DKI Jakarta mengatur tentang tugas dan peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) serta lembaga terkait untuk menangani pengembangan KLA. Salah satu SKPD yang berperan sebagai *leading sector* dari program KLA ini adalah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang berusaha untuk mendapatkan predikat KLA, untuk itu perlu memenuhi indikator-indikator KLA. Kemudian pada awal 2015 diluncurkan kebijakan baru merevitalisasi fungsi taman menjadi taman komunitas interaktif ragam fungsi. Ide ini didasari kurangnya ruang publik yang berfungsi sebagai pusat kegiatan masyarakat dan kawasan evakuasi bencana. Kemudian diputuskan mengembangkan ruang publik yang berfungsi lebih dari

sekedar RTH dengan sebutan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). Penambahan konsep ramah anak sebagai wujud komitmen pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat khususnya keluarga dan anak.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai salah satu usaha yang dilakukan guna memenuhi indikator-indikator KLA. RPTRA menjadi program penting Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan mengintegrasikan seluruh komitmen dan potensi sumber daya para pihak baik dari Pemerintah, masyarakat maupun dari pihak dunia usaha melalui sistem perencanaan yang komprehensif, menyeluruh dan berkelanjutan dalam bentuk fasilitas fisik dan non fisik secara terpadu. Seluruh kebijakan dan langkah strategis ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hak-hak anak.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi empat indikator KLA yang terdapat di dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak dengan membangun RPTRA ini. Indikator pertama mengenai penguatan kelembagaan yaitu dalam hal keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak dan keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 ayat 2. *Kedua* mengenai klaster hak anak meliputi kesehatan dasar, kesejahteraan, pendidikan dan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nomor 12 Tahun 2011 pasal 5 ayat 2 huruf b. Ketiga mengenai tersedianya fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak diluar sekolah yang dapat diakses semua anak sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 pasal 11 huruf e. Keempat terkait jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan sesuai Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 pasal 10 huruf g.

RPTRA mampu memenuhi indikator pertama karena dalam proses pembangunan melibatkan peran serta masyarakat sekitar lokasi pembangunan, juga bekerja sama dengan para dunia usaha swasta untuk ikut memberikan dana bagi pembangunan RPTRA tersebut. Kemudian memenuhi indikator kedua, didalam RPTRA terdapat posyandu, perpustakaan, juga kegiatan budaya yang telah memiliki agenda ditiap bulannya dan salah satu fasilitas ruang publik yang bebas dari asap rokok. Selanjutnya memenuhi indikator ketiga karena RPTRA merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan fungsinya oleh masyarakat umum, mulai dari anak-anak sampai masyarakat lanjut usia (lansia). Dikatakan ramah anak karena didalamnya terdapat tempat bermain dan lapangan olahraga yang aman, serta terdapat fasilitas edukasi untuk anak. Sedangkan memenuhi indikator keempat, karena RPTRA dibangun di kawasan pemukiman kumuh sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkan ruang publik tersebut.

Tidak hanya untuk anak-anak saja, RPTRA juga dimanfaatkan oleh masyarakat dari berbagai kalangan usia. Untuk usia remaja, dapat memanfaatkan lapangan-lapangan olahraga yang ada. Untuk kalangan ibu dan bapak dapat

memanfaatkan taman yang ditanami tanaman-tanaman obat yang juga dapat dimanfaatkan dan untuk Lansia juga dapat memanfaatkan program-program yang disediakan khusus untuk Lansia. RPTRA juga dibangun sebagai sarana berkumpul seluruh warga sebagai cara untuk melakukan sosialisasi dan membicarakan permasalahan yang masing-masing sedang dihadapi dan juga untuk menggugurkan sikap individualisme masyarakat perkotaan dan juga sebagai lokasi tanggap darurat terhadap bencana. Terjadi peningkatan luas RTH di DKI Jakarta pada tahun 2018 menjadi 12% karena normalisasi, revitalisasi waduk, setu dan pembangunan RPTRA yang mencakup RTH (Sumber [mediaindonesia.com](http://mediaindonesia.com) 2018).

Pembangunan RPTRA pada tahap pertama dibiayai oleh dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari perusahaan-perusahaan swasta. Sedangkan untuk operasional dan pemeliharaan RPTRA menjadi domain dari tujuan pengorganisasian PKK Provinsi DKI Jakarta, SKPD/UKPD, serta CSR. Berbagai bentuk dukungan dalam pengembangan RPTRA baik berupa sumbangan fisik dan non fisik diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan Peraturan Gubernur. Selanjutnya masyarakat dilibatkan secara aktif agar RPTRA menjadi milik masyarakat yang harus dimanfaatkan, dijaga dan dilindungi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun satu RPTRA di tiap-tiap wilayah administrasi, yang mana akan menjadi RPTRA *pilot project* yaitu RPTRA percontohan bagi kelurahan lainnya yang akan membangun RPTRA di wilayahnya. Berikut ini merupakan enam RPTRA yang telah dibangun sebagai

RPTRA percontohan di masing-masing Kota Administrasi di Provinsi DKI

Jakarta:

**Tabel 1.4**

**Data Lokasi, CSR, dan Waktu Peresmian RPTRA Tahun 2015**

NO	NAMA RPTRA	KEC.	KEL.	ALAMAT	KOTA	CSR	WAKTU PERESMIAN
1	RPTRA Sungai Bambu	Tanjung Priok	Sungai Bambu	Jl. Jati Raya Rw 06	Jakarta Utara	PT Pembangunan Jaya, PT. Toyota	13 Mei 2015
2	RPTRA Bahari	Cilandak	Gandaria Selatan	Jl. Bahari Raya RT 009/RW07	Jakarta Selatan	PT Pembangunan Jaya	21 Mei 2015
3	RPTRA Cideng	Gambir	Cideng	Jl. Makian No. 1 RT 002 RW 005	Jakarta Pusat	PT Pembangunan Jaya	30 Mei 2015
4	RPTRA Kembangan	Kembangan	Kembangan Utara	Jl. Gang Kompas RT 007	Jakarta Barat	PT Gajah Tunggal	5 Juni 2015
5	RPTRA Amterdam	Kepulauan Seribu Selatan	Untung Jawa	Pulang Untung Jawa	Kepulauan Seribu	PT Pembangunan Jaya	10 Oktober 2015
6	RPTRA Cililitan	Kramat Jati	Cililitan	Jl. Buluh RT 10 RW 16	Jakarta Timur	PT Pembangunan Jaya	22 Oktober 2015

Sumber: data.jakarta.go.id 2016

RPTRA di kelola oleh pengelola yang ditetapkan dengan SK Gubernur dengan proses seleksi sesuai dengan ketentuan. Pada tingkat Provinsi DKI Jakarta, dibentuk pengurus RPTRA Provinsi. Pada tingkat Kota/Kabupaten dibentuk pengurus RPTRA Kota/Kabupaten, dan pada tingkat Kelurahan dibentuk Pengurus RPTRA Kelurahan. Selain itu terdapat petugas kebersihan yang di tugaskan disetiap RPTRA yang biasa disebut Petugas Penanganan Saran dan Prasarana Umum (PPSU). Namun diharapkan RPTRA juga dijaga dan dipelihara bersama oleh masyarakat sekitar. Sehingga masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam pemeliharaan RPTRA.

Di Kota Administrasi Jakarta Barat terdapat satu RPTRA percontohan yang telah dibangun, diresmikan, dan programnya sudah berjalan yaitu RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara. RPTRA ini menjadi RPTRA percontohan karena menjadi RPTRA pertama yang dibangun di Jakarta Barat. RPTRA Kembangan Utara beralamat di Jalan Kompas RT 07/01, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat, berada di tanah seluas  $\pm 3.250$  m<sup>2</sup> dengan luas bangunan 108 m<sup>2</sup>. Dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun (kurang sehari) mencapai 19,465 anak berada pada Kelurahan Kembangan Utara (data.jakarta.go.id, 2015). Tentu menjadi perhatian apabila implementasi program RPTRA yang ada di Kelurahan Kembangan Utara tidak berlangsung sebagaimana tujuan sebenarnya dari dibangunnya RPTRA di kawasan tersebut. Apalagi diketahui ada permasalahan yang muncul ketika RPTRA kembangan selesai diresmikan, ditemukan ada lubang yang muncul ditembok pembatas antara RPTRA dengan rumah warga sekitar. Ini dikarenakan tembok di jebol oleh warga

dengan alasan harus memutar RPTRA jika ingin pergi. Sehingga RPTRA dijadikan jalan pintas oleh mereka (Kompas.com, 2016). Dapat ditarik kesimpulan, bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan fungsi dan manfaat dari RPTRA ini bagi tumbuh kembang anak-anak mereka. Masalah ini mungkin muncul karena kurangnya sosialisasi akan manfaat RPTRA kepada masyarakat, sehingga mereka menilai RPTRA hanya sebagai taman bermain. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat?
2. Apa saja faktor pendorong dan penghambat dalam Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis tentang Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

### **D. Kontribusi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara akademik maupun praktis yang meliputi:

1. Kontribusi Akademis
  - a. Bagi Akademisi

Sebagai salah satu bahan pengembangan keilmuan yang berkaitan dengan Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan Implementasi Program Publik.

- b. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumber informasi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

## 2. Kontribusi Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi, kontribusi dan masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, dan semua SKPD yang terlibat dalam implementasi Program RPTRA lebih spesifik di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan informasi bagi semua masyarakat tentang implementasi Program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

## E. Sistematika Penulisan

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini dijelaskan mengenai bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika pembahasan. Pada latar diungkapkan bahwa permasalahan yang terdapat di DKI Jakarta terkait masalah sosial yakni hak-hak anak perlu untuk diselesaikan melalui implementasi Program Ruang Publik Terpadu

Ramah Anak (RPTRA). Pada bab ini juga terdapat tujuan penelitian dan rumusan masalah yang nantinya akan digunakan dalam proses penelitian agar lebih terfokus dan terarah. Penelitian ini juga dikontribusikan kepada akademisi maupun kepada praktisi, dengan harapan dapat memberikan masukan serta tambahan informasi yang bermanfaat.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan secara garis besar teoritis yang menjadi dasar bagi peneliti dalam memecahkan masalah serta memberikan alternatif solusi dari segala permasalahan yang ada. Bab ini menguraikan teori tentang kebijakan publik dan implementasi Program yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pembangunan RPTRA untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak.

Kemudian menjelaskan konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) yaitu mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi dari RPTRA. Serta layanan dan kegiatan apa yang ada di RPTRA, bentuk pengorganisasian dari RPTRA dan dasar hukum dari pelaksanaan RPTRA. Selanjutnya konsep Konvensi Hak Anak (KHA) oleh PBB.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Pada bab ini berisi tentang penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, teknis pengumpulan data, instrument penelitian dan metode analisis data.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Melalui pendekatan tersebut, penulis menjabarkan berbagai fakta dan penjelasan terkait implelementasi Program RPTRA di Kota Administrasi Jakarta Barat.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kebijakan Publik

##### 1. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui suatu proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait (Mulyadi, 2015:45). Kebijakan publik ini yang nantinya akan membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan publik. Senada dengan Mulyadi, menurut Carl Friedrich (dalam Winarno, 2014:20)

“Kebijakan dipandang sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.”

Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa kebijakan publik adalah proses kegiatan yang lebih luas karena melibatkan banyak pihak, baik individu maupun kelompok yang meliputi pemerintah, masyarakat, maupun swasta yang kegiatan tersebut bersifat administratif dan politis yang bertujuan untuk mencapai atau merealisasikan sebuah maksud dan tujuan tertentu. Dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pelaksanaan RPTRA yang dilakukan oleh beberapa kelompok, baik pemerintah, lembaga masyarakat, maupun pihak swasta di Kelurahan Kembangan Utara.

## 2. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang aktor atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan suatu permasalahan atau suatu hal yang diperhatikan (James Anderson dalam Agustino, 2008:7). Kemudian, W.I Jenkins (dalam Wahab 2012:15) mengemukakan bahwa kebijakan publik sebagai berikut:

“serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan tujuan yang telah dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.”

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan kebijakan merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan yang berisi keputusan yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengatasi dari suatu permasalahan. Dibuat dan dilaksanakan oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor yang mempunyai kekuasaan dan wewenang. Keputusan itu dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya.

Selanjutnya kebijakan publik menurut Knoepfel dkk (dalam Wahab 2012:10) sebagai berikut:

“serangkaian keputusan atau tindakan-tindakan sebagai akibat dari interaksi terstruktur dan berulang di antara berbagai aktor, baik publik/pemerintah maupun privat/swasta yang terlibat berbagai cara dalam merespon, mengidentifikasi, dan memecahkan suatu masalah yang secara politis didefinisikan sebagai masalah publik.”

Kemudian Lemieux (dalam Wahab 2012:10) mengemukakan kebijakan publik adalah produk aktivitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang dilakukan oleh

aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu.

Berdasarkan kedua pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik merupakan hasil dari suatu keputusan atau tindakan dari berbagai aktor yang memang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan publik secara politis yang terjadi di berbagai lingkungan. Keputusan tersebut terjadi karena akibat hubungan yang terjadi berulang-ulang antar aktor. Aktor tersebut baik pemerintah, swasta atau masyarakat itu sendiri.

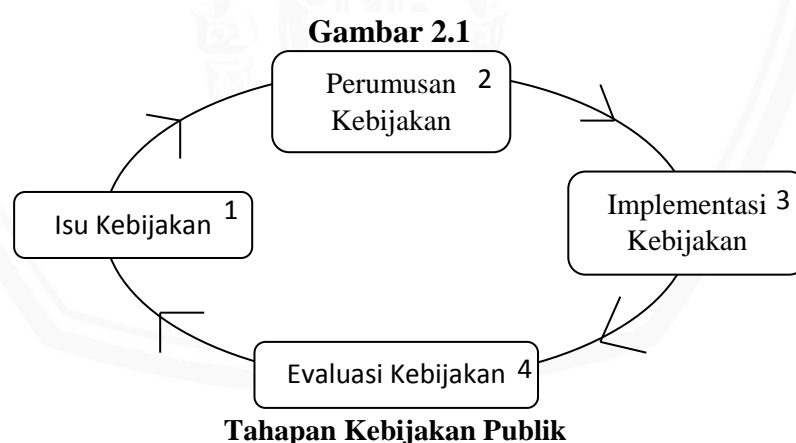
Selanjutnya Cochran dan Malone (dalam Nugroho 2012:121) mengutarakan kebijakan publik yakni keputusan-keputusan politik untuk mengimplementasikan program-program untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui juga bahwa kebijakan publik berisikan tentang keputusan politik yang dibuat untuk membuat suatu program yang nantinya program tersebut akan diimplementasikan dan diharapkan dengan diimplementasikannya program tersebut, masyarakat dapat merasakan manfaatnya. Setelah memahami pengertian-pengertian kebijakan publik dari beberapa ahli kebijakan, peneliti dapat menarik sebuah pengertian yang singkat dan umum bahwa kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk menentukan sebuah keputusan politik yang dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul di masyarakat.



### 3. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Untuk menghasilkan suatu program yang dapat membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, kebijakan publik memiliki mekanisme berupa tahapan-tahapan dalam kebijakan publik. Kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, kebijakan publik merupakan suatu proses yang kompleks, dinamis, dan dalam pembuatannya juga dipengaruhi oleh beberapa aktor pembuat kebijakan. Dengan proses yang kompleks tersebut diharapkan program yang dihasilkan tidak hanya sebatas regulasi-regulasi yang tertera diatas kertas saja namun dapat juga diaplikasikan dengan baik demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Agar lebih jelas mengenai tahapan-tahapan pada kebijakan publik, berikut ini merupakan gambar dari tahapan-tahapan dalam kebijakan publik.



Sumber: Nugroho (2012:185)

Berdasarkan gambar 2.1 diatas dapat dilihat bahwa siklus kebijakan selalu berjalan seperti gambar tersebut guna mendapatkan hasil kebijakan yang nantinya akan digunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan publik. Pada

Gambar tersebut dapat dilihat awal dari sebuah proses kebijakan adalah adanya isu kebijakan. Seperti yang diungkapkan oleh Mulyadi:

“isu kebijakan menjadi embrio awal bagi munculnya masalah-masalah publik. Isu kebijakan tersebut muncul dari permasalahan yang datang dari masyarakat dimana masyarakat mulai merasakan adanya perbedaan harapan dengan kenyataan yang terjadi. Kemudian, isu-isu kebijakan tersebut akan dipilih, pilihan isu tersebut berdasarkan isu mana yang lebih penting dan lebih serius maka isu tersebut lah yang akan dibahas dalam *agenda setting* atau agenda kebijakan.” (Mulyadi, 2015:5).

Dapat ditarik kesimpulan berdasarkan pengertian di atas, isu-isu kebijakan adalah suatu fenomena permasalahan yang muncul ditengah masyarakat, yang memunculkan kekhawatiran dari masyarakat tentang kinerja dari pemerintahan yang ada. Karena adanya perbedaan antara harapan dengan kenyataan yang didapat oleh masyarakat.

Setelah penetapan isu kebijakan selesai dilakukan, selanjutnya adalah menyusun agenda kebijakan sebelum nantinya merumuskan kebijakan. Menurut Mulyadi (2015:6) agenda kebijakan adalah tuntutan-tuntutan agar para pembuat kebijakan memilih atau merasa terdorong untuk melakukan tindakan tertentu. Selanjutnya menurut (Anderson, 2011) agenda kebijakan adalah sebuah tahapan untuk mencari skala prioritas permasalahan bagi pemerintahan. Dari kedua pengertian tentang agenda kebijakan, dapat ditarik kesimpulan bahwa agenda kebijakan merupakan kumpulan tuntutan-tuntutan dari masyarakat yang ditujukan untuk para pembuat kebijakan agar segera mencari cara untuk mengatasinya.

Kemudian setelah dilakukan agenda kebijakan tahapan selanjutnya adalah perumusan kebijakan atau juga biasa disebut dengan formulasi kebijakan.

Formulasi kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Menurut (Anderson, 2011) formulasi kebijakan adalah sebuah proses untuk mengembangkan pilihan-pilihan dalam memecahkan permasalahan yang ada. Pada tahap ini, para pembuat kebijakan (*policy maker*) menimbang cara-cara apa yang dapat memecahkan permasalahan yang ada dengan kemungkinan keberhasilan paling tinggi.

Setelah melewati beberapa tahapan perumusan kebijakan publik seperti di atas, maka langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan kebijakan yang tentunya sudah disahkan oleh pemerintah. Pada tahap ini alternatif pemecahan yang telah disepakati dalam tahap perumusan kebijakan kemudian dilaksanakan. Dalam tahap inilah suatu kebijakan terkadang direalisasikan dengan adanya sebuah program yang memiliki tujuan untuk mensukseskan visi dan misi dari sebuah kebijakan. Pada tahap ini juga suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan, yang disebabkan karena berbagai faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Maka, diperlukan suatu penilaian akhir dari suatu kebijakan.

Tahap selanjutnya adalah tahap evaluasi dimana dapat dinilai bagaimana hasil dari perumusan kebijakan dan juga bagaimana implementasi kebijakannya. Menurut (Anderson, 2011) evaluasi kebijakan merupakan usaha pemerintah untuk menetapkan kebijakan yang telah dibuat dan sedang berjalan, efektif atau tidak. Dengan kata lain, evaluasi merupakan titik akhir apakah suatu kebijakan dianggap berhasil atau tidak.

Dari pengertian tentang tahap-tahap kebijakan yang dikemukakan menurut para ahli, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa suatu kebijakan dianggap efektif atau tidak tergantung dengan implementasi kebijakan tersebut apakah sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya kebijakan tersebut atau malah melenceng dari yang seharusnya. Karena sebaik apapun suatu kebijakan, jika dalam tahap implementasi tidak berjalan sebagaimana mestinya, sudah pasti kebijakan tersebut dianggap tidak berhasil dalam mengatasi permasalahan yang ada. Dengan kata lain, tahap implementasi menjadi tahap yang paling penting dalam tahap-tahap pembuatan kebijakan publik. Implementasi kebijakan kemudian dirumuskan menjadi sebuah program yang memiliki tujuan untuk memenuhi segala tujuan yang tertuang dalam sebuah kebijakan. Dalam penelitian ini adalah pada tahap implementasi program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

## **B. Program**

Program dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai rancangan mengenai asas-asas serta usaha-usaha yang akan dijalankan. Jones dalam Rohman (2009:101-102) menyebutkan program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Program sebagai salah satu unsur pembentuk kata implementasi program yang memiliki sifat alokatif, distributif, inovatif, dan multifungsi. Program ini bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan seperti program pembangunan ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan

pembangunan. Semakin banyak dan kompleks suatu permasalahan yang ada maka akan semakin banyak membutuhkan program dalam menangani permasalahan tersebut.

### **1. Pengertian Implementasi Program**

Setelah proses perumusan kebijakan yang telah menghasilkan sebuah program-program yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah publik, sudah semestinya “produk” tersebut diimplementasikan agar hasilnya terlihat. Seperti yang diungkapkan oleh Jones (dalam Mulyadi 2015:45;46)

“implementasi kebijakan merupakan proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya. Kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan. Jadi dapat diketahui bahwa hasil dari perumusan kebijakan tersebut hendaknya diimplementasikan agar kebijakan tersebut dapat terlihat hasilnya.”

Sementara itu terkait dengan suatu program, Grindle (1980:7) menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap serta telah disalurkan untuk mencapai sasaran. Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi ialah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian.

Implementasi program pada prinsipnya yakni agar sebuah kebijakan yang melatar belakangi program tersebut dapat mencapai tujuannya, tidak kurang dan tidak lebih. Menurut Nugroho (2014:657) bahwa untuk mengimplementasikan kebijakan publik yaitu langsung dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan *derivate* atau turunan kebijakan publik tersebut.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya implementasi program merupakan sebuah program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu dilapangan maupun di luar lapangan. Dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. Setelah memahami makna dari implementasi program menurut para ahli kebijakan diatas, maka peneliti dapat mengembangkan suatu pengertian umum bahwa implementasi program pada dasarnya adalah cara yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan dari suatu kebijakan yang telah dibuat. Dalam penelitian ini, memudahkan peneliti untuk memahami makna sebenarnya dari implementasi program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

## 2. Tahap-Tahap Implementasi Program

Agar implementasi program yang ditetapkan efektif, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi program, (M. Irfan Islamy, 2002) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

- a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan

terimplementasikan dengan sendirinya, misal pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

- b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai.

Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn (dalam Wahab, 1997)

mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I :

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II : Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staff, sumber daya, prosedur, biaya serta metode.

Tahap III :

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program. Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera.

Jadi implementasi program akan selalu berkaitan dengan perencanaan, penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sebatier (dalam Wahab, 1997) sebagai berikut :

“mempelajari masalah implementasi program berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan program baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran tetapi



memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implementasi kebijakan negara.”

### 3. Unsur-Unsur Implementasi Program

Menurut Syukur (1987 : 389) proses dalam suatu implementasi sekurang-kurangnya terdapat tiga unsur penting dan mutlak yaitu :

- a. Adanya program (kebijaksanaan) yang dilaksanakan
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan, serta
- c. Unsur program baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi program selalu berhubungan dengan suatu kebijakan, hal ini dikarenakan suatu kebijakan publik tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan melalui sebuah program, kegiatan, atau proyek. Menurut Terry dalam Tachjan (2006:31) program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Suatu program menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, metode, standart, dan *budget*. Sehingga program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Siagian, 2008:85):

- a. Sasaran yang dikehendaki;
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu;
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya;
- d. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Selain itu Grindle (1980:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Kepentingan yang dipengaruhi (*Interest of affected*)

- b. Jenis manfaat (*type of benefit*)
- c. Derajat perubahan yang diinginkan (*extent of change envisioned*)
- d. Status pembuat keputusan (*site of decision making*)
- e. Pelaksana program (*program implementers*)
- f. Sumberdaya yang tersedia (*resources committed*)

#### 4. Proses Implementasi Program

Menurut Jones sesuai yang dikutip Usman dan Nurdin (2002:28) ada tiga pilar aktivitas dalam proses pengoperasian program yaitu :

- a. Pengorganisasian  
Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat dibentuk dari sumberdaya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- b. Interpretasi  
Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- c. Penerapan atau Aplikasi  
Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

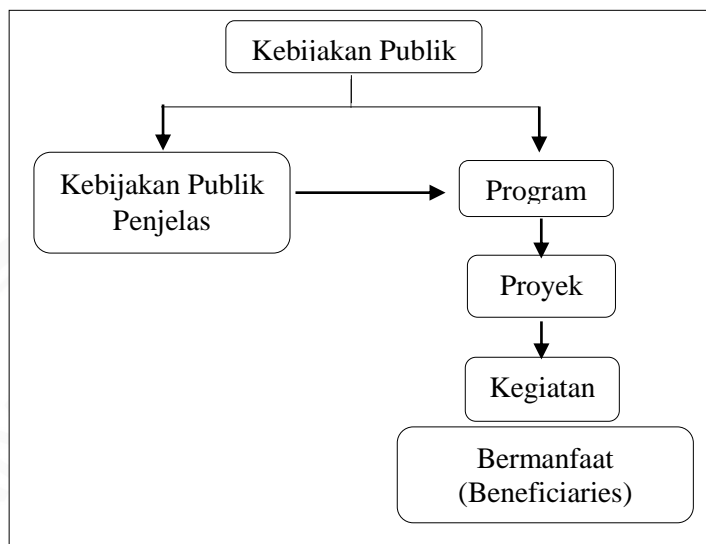
Selain itu menurut Tachjan (2006:35) implementasi program dalam konteks kebijakan publik terdiri dari beberapa tahap yaitu :

- a. Merancang bangun (*design*) program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi yang jelas serta biaya dan waktu;
- b. Melaksanakan (*application*) program dengan mendayagunakan struktur-struktur dan personalia, dana serta sumber-sumber lainnya, prosedur dan metode yang tepat;
- c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-sarana pengawasan yang tepat guna serta evaluasi (hasil) pelaksanaan.

#### 5. Model-Model Implementasi Program

Indonesia secara umum masih menganut model Implementasi *Continentalist*, dimana model implementasi suatu kebijakan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 2.2**

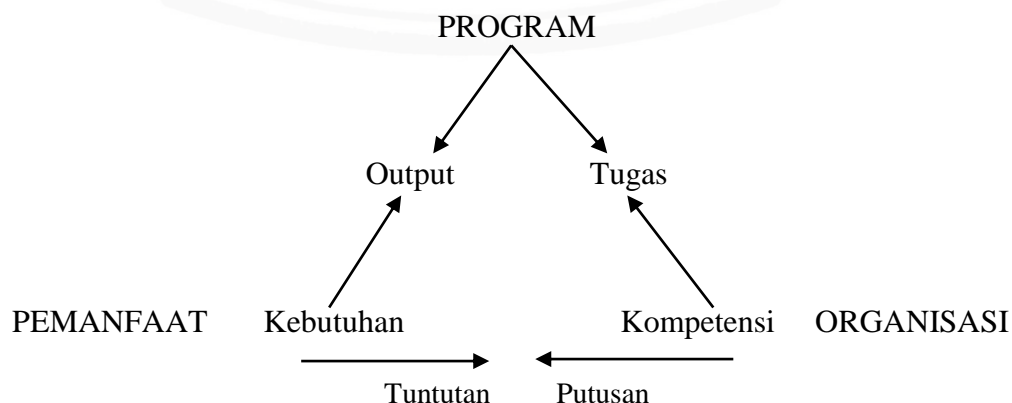


### Implementasi Kebijakan *Continentalist*

Sumber : Nugroho, 2014: 57

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh Korten dalam Andersen (1997). Model ini memakai pendekatan proses yang lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Program Korten digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.3**



### Model Kesesuaian Implementasi Program

Sumber : Andersen, 1997:12

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten, dapat dipahami bahwa kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan apabila tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan, yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Hal ini dapat terjadi apabila :

- a. *Output* program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran, jelas *output* tidak dapat dimanfaatkan.
- b. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program, maka organisasinya tidak dapat menyampaikan *output* program dengan tepat.
- c. Jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran, maka kelompok sasaran tidak mendapatkan *output* program.

Oleh karena itu, kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Kemudian ada model implementasi (Jones 1991:296) mengatakan bahwa penerapan atau implementasi adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Tiga kegiatan berikut ini adalah pilar-pilarnya:

1. Organisasi  
Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
2. Interpretasi

Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarah yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Aplikasi / Penerapan

Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Selanjutnya model implementasi kebijakan publik atau program menurut George C. Edward III (dalam Agustino, 2008:149) menamakan model implementasi kebijakan publik atau programnya dengan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dalam pendekatan yang di terapkan oleh Edward III terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan atau program, yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi implementasi menurut Edward yang dikutip oleh Agustino (2008:150) adalah komunikasi. Komunikasi menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik atau program. Implementasi yang efektif terjadi apabila pembuat kebijakan sudah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi dapat berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi kebijakan atau program harus ditransmisikan atau (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan atau program yang akan diterapkan dalam masyarakat.

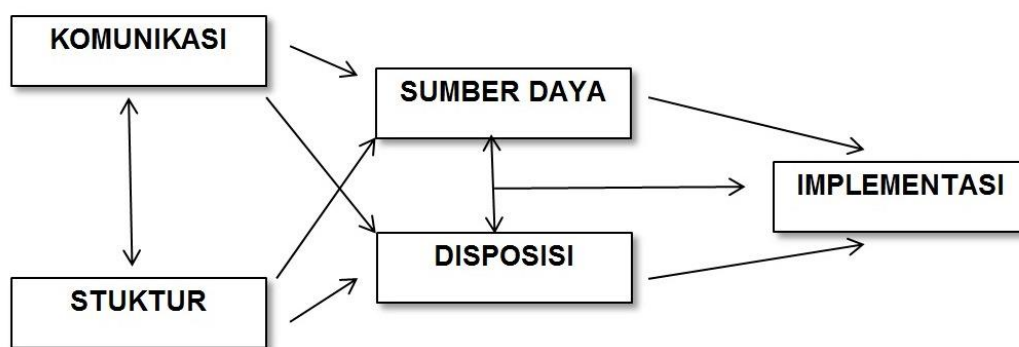
Variabel ke dua yang mempengaruhi keberhasilan implemementasi suatu kebijakan atau program adalah sumber daya. Sumber daya merupakan hal penting lainnya menurut Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008:151) dalam mengimplementasikan kebijakan atau program, indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu: staff, informasi, wewenang, dan fasilitas. Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2009:98-99) mengatakan bahwa sumber daya manusia (*staff*), harus cukup jumlah dan cakap dalam keahlian. Karena efektifitas pelaksanaan kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan atau program. Sekalipun aturan main pelaksana kebijakan atau program jelas dan kebijakan atau program telah ditransformasikan dengan tepat, namun manakala sumber daya manusia terbatas baik jumlah maupun kualitas, pelaksana kebijakan atau program tidak akan berjalan dengan efektif. Selain sumber daya tersebut harus mengetahui apa yang harus dilakukan, sumber daya manusia sebagai pelaku kebijakan atau program juga membutuhkan informasi yang cukup, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana melakukan kebijakan, namun juga mengetahui arti penting mengenai bagaimana pihak lain mematuhi peraturan dan peraturan yang berlaku.

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik atau program. Jika pelaksanaan suatu kebijakan atau program ingin efektif maka para pelaksana kebijakan atau program tidak hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya juga bisa. Menurut Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008:152),

yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan. Kemungkinan kebijakan tersebut tidak akan terlaksana karena terdapat kelemahan struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang ada. Hal ini menyebabkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah ditetapkan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

**Gambar 2.4**

**Model Implementasi George C. Edwards III**



Sumber: Mulyadi (2015:69)

Berdasarkan model implementasi yang diutarakan oleh Edwards III tersebut dapat disimpulkan bahwa keempat variabel yang terdapat dalam model tersebut yakni komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi



merupakan keempat variabel yang mempunyai keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan publik atau program yang baik maka perlu diinternalisasikan dengan sinergi dan intensif.

Model implementasi program yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan model implementasi kebijakan atau program yang diutarakan oleh Edward III, dimana Edward dalam teorinya mengungkapkan ada empat variabel penting dalam proses implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Model implementasi kebijakan atau program menurut Edward III juga digunakan peneliti sebagai landasan di dalam fokus penelitian. Alasan penulis memilih menggunakan teori Edward III ini menjadi fokus penelitian karena dengan menggunakan teori ini implementasi program yang ingin diukur akan lebih dapat menjelaskan secara tepat fenomena dalam program yang penulis ingin teliti. Serta dari beberapa model implementasi program yang sudah diutarakan, teori ini juga merupakan teori yang sederhana dan mudah dimengerti. Dari empat variabel yang diutarakan oleh Edward tersebut nantinya akan digunakan peneliti dalam menganalisis masalah yang diteliti.

## **6. Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Program**

Implementasi program merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Implementasi dianggap sebagai wujud utama dan sangat menentukan dalam proses suatu kebijakan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan

(Winarno,2012). Korten dalam Andersen (1997:12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program, yaitu :

- a. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat).
- b. Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana.
- c. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh *output* program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Selain faktor-faktor diatas George C. Edward III. Edward menambahkan pendapat dalam Widodo (2010:96-107) empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegiatan implementasi program yaitu:

- a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*) Widodo (2010:97). Widodo menambahkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi antara lain, pertama adalah dimensi transformasi

(*transformation*) yaitu menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan. Kedua, dimensi kejelasan (*clarity*) yaitu menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana dan pihak lain yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari kebijakan publik tersebut. Ketiga konsistensi (*consistency*) yaitu menghendaki agar informasi yang disampaikan harus konsistensi, agar kelompok sasaran kebijakan dari pihak yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung tidak menimbulkan kebingungan dan kebijakan dapat dicapai secara efektif dan efisien.

b. Sumber daya (*resources*)

Pada variabel Sumber daya merupakan peranan penting pada implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:98) menegaskan bahwa bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya yang mendukung dalam pelaksanaan implementasi kebijakan, meliputi :

1) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi kebijakan yang efektif dan efisien sumber daya manusia harus mengetahui apa yang dilakukan, sumber daya juga harus mengetahui orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, sumber daya manusia juga harus memiliki kewenangan yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan dan juga sumber daya harus cukup memiliki keahlian dan kemampuan dalam melaksanakan tugas, anjuran, perintah dari atasan (pimpinan).

#### 2) Sumber daya anggaran

Selain Sumber daya manusia anggaran merupakan yang mempengaruhi keefektifan sebuah kebijakan karena anggaran merupakan dana untuk membiayai operasional dalam pelaksanaan kebijakan. Jika terbatasnya sumber daya anggaran, maka akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Disamping program tidak berjalan dengan optimal, terbatasnya anggaran juga menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan rendah.

#### 3) Sumber daya peralatan (*facility*)

Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

#### 4) Sumber daya informasi dan kewenangan

Informasi merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan, selain itu informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari pihak beberapa pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan tersebut.

c. Disposisi (*Dispotition*)

Implementasi sebuah kebijakan para pelaku kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melakukannya. Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan.

d. Struktur birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi dapat berpengaruh efektif dan efesiennya implementasi sebuah kebijakan. karena struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya.

### **C. Perlindungan Hak Anak dalam Konvensi Hak Anak (KHA) & Sustainable Development Goals (SDGs)**

Anak merupakan setiap manusia yang berada dibawah usia delapan belas tahun. Konvensi hak anak adalah perjanjian antar bangsa-bangsa mengenai hak-

hak anak. Hak-hak anak melekat dalam diri anak, hak-hak anak merupakan Hak Asasi Manusia dan hak anak dapat menjamin hak asasi anak. Anak diseluruh dunia adalah anak yang memiliki hak-hak. Semua masyarakat harus mengetahui bahwa anak memiliki sejumlah hak yang sudah diakui agar menjadi landasan untuk perubahan kehidupan anak yang lebih baik. Perlindungan Hak Anak telah di bahas dalam Konvensi Hak Anak oleh PBB pada tanggal 20 November 1989. KHA sendiri yang nantinya akan menjadi landasan atau pedoman bagi setiap Negara yang akan membuat kebijakan khususnya mengenai anak.

Prinsip-prinsip dasar yang menyangkut hak anak adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada diskriminasi, dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, suku, budaya, agama dan asal etnik sosial.
2. Hal terbaik menyangkut kepentingan anak harus dijadikan pertimbangan.
3. Setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan
4. Setiap anak memiliki hak untuk didengarkan pendapatnya.
5. Anak berhak mendapatkan nama dan kewarganegaraan
6. Anak memiliki hak untuk berarya, berpendapat dan berkumpul
7. Anak berhak mendapatkan dan mengetahui informasi yang bermanfaat
8. Setiap anak berhak diasuh oleh orangtua dengan penuh kasih sayang dalam keluarga bahagia sampai dewasa
9. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan anak berhak mendapatkan pendidikan walaupun berasal dari keluarga yang tidak mampu
10. Anak berhak untuk beristirahat dan bersenang-senang untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan bermain dan rekreasi yang layak untuk usia anak yang bersangkutan untuk turut serta secara bebas dalam kehidupan budaya dan seni.

Hak-hak anak yang tercantum dalam KHA sudah semestinya dipenuhi.

Oleh karena itu sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk memenuhi hak-hak anak dengan membuat kebijakan-kebijakan yang mengutamakan anak. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap hak anak turut menjadi indikator tujuan

dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs merupakan suatu agenda pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. SDGs memiliki 17 tujuan dalam berdasarkan pada Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni:

18. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimana pun.
19. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan
20. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
21. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan
22. Menjamin kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
23. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
24. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua
25. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
26. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi
27. Mengurangi kesenjangan intra dan antar negara
28. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan
29. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan
30. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya
31. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan
32. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
33. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan



34. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.  
(Sumber : Bappenas.go.id)

Perlindungan hak anak masuk ke dalam beberapa tujuan dari pembangunan berkelanjutan milik SDGs, yakni tujuan mengakhiri segala bentuk kemiskinan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian yang berkelanjutan, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia, menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua, dan menjamin ketersediaan gender dan memberdayakan perempuan dan anak perempuan. Dari 17 tujuan SDGs, 5 tujuan SDGs membahas tentang hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hak-hak ini sudah seharusnya dipenuhi oleh negara dalam pelaksanaan pembangunannya.

#### **D. Konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)**

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi perlu dibangun Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) sebagai upaya mendukung Jakarta menjadi Kota Layak Anak (KLA). KLA adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menjamin terpenuhinya hak anak. Hak-hak anak merupakan bagian dari

hak-hak manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.

### **1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi RPTRA**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pengelolaan RPTRA dalam pasal (4). Kedudukan RPTRA dibangun oleh Pemerintah Daerah di wilayah dan dikelola melalui kemitraan dengan masyarakat untuk kepentingan publik yang multifungsi. Selanjutnya dalam pasal (5), menyatakan bahwa RPTRA dibangun untuk tugas:

- a. Menyediakan ruang terbuka untuk memenuhi hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
- b. Menyediakan prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- c. Menyediakan prasarana dan sarana kota sebagai Kota Layak Anak.
- d. Menyediakan prasarana dan sarana untuk pelaksanaan kegiatan 10 program pokok PKK.
- e. Meningkatkan pencapaian ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah
- f. Meningkatkan prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pembangunan pengetahuan dan keterampilan kader PKK.

Dapat dilihat bahwa tugas dari RPTRA tersebut adalah menyediakan sebuah ruang terbuka yang menyediakan sarana dan prasarana yang tentunya ramah anak akan tetapi dapat dimanfaatkan oleh orang dewasa dan menjadi sarana untuk warga sekitar untuk berbagai kegiatan yang utamanya adalah sarana untuk bersosialisasi antar tetangga. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pengelolaan RPTRA pasal (6), menetapkan fungsi dari RPTRA adalah sebagai:

- a. Taman terbuka publik
- b. Wahana permainan dan tumbuh kembang anak.
- c. Prasarana dan sarana kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam memenuhi hak anak.
- d. Bagian dari prasarana dan sarana Kota Layak Anak.
- e. Ruang terbuka hijau dan tempat penyerapan air tanah.
- f. Prasarana dan sarana kegiatan sosial warga termasuk pengembangan pengetahuan dan keterampilan kader PKK.
- g. Usaha meningkatkan pendapatan keluarga.
- h. Pusat informasi dan konsultasi keluarga.
- i. Halaman keluarga yang asri, teratur, indah, dan nyaman
- j. Sistem informasi manajemen.

## **2. Layanan dan Kegiatan**

Sesuai dengan pasal (7) Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 pada RPTRA dilaksanakan layanan yang ditujukan untuk anak, masyarakat, dan kebencanaan. Dalam hal pelayanan ini, RPTRA tidak hanya dibangun untuk anak saja namun RPTRA difungsikan sebagai suatu ruang terbuka publik yang multifungsi sehingga baik dari golongan anak-anak, masyarakat dewasa hingga masyarakat lanjut usia pun dapat ikut serta memanfaatkan RPTRA.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015, yang kemudian disempurnakan oleh Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 dalam pasal (8), RPTRA memiliki kegiatan untuk anak sebagai berikut:

1. Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD)
2. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
3. Perpustakaan anak
4. Tempat berolahraga
5. Tempat bermain
6. Kegiatan kreatif anak

Kemudian untuk melayani masyarakat, RPTRA mengadakan kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan sepuluh program pokok PKK
2. PKK-Mart
3. Kegiatan masyarakat yang tidak berpotensi mengakibatkan kerusakan taman dan/atau prasarana dan sarana yang ada
4. Olahraga
5. Kegiatan kesenian.

Untuk layanan kebencanaan, RPTRA memiliki kegiatan yang terdiri dari komunikasi, informasi edukasi bencana, rambu bencana, tempat pengungsian sementara layanan pasca bencana, komunikasi informasi dan edukasi bencana serta rambu bencana.

### 3. Pengorganisasian

Untuk mengelola RPTRA agar tetap terpelihara dan dapat dirasakan manfaatnya, maka diperlukan organisasi yang bertanggung jawab untuk mengelolanya. Untuk itu telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 196 tahun 2015 yang disempurnakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 pada pasal 11 sebagai berikut:

#### 1. Pengurus RPTRA tingkat Provinsi

Terdiri atas:

Tim Pembina

- a. Ketua : Ketua TP PKK Provinsi
- b. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat
- c. Anggota : Wakil Ketua I TP PKK dan Wakil Ketua II TP PKK

Tim Pelaksana

- d. Ketua : Kepala BPMPKB
- e. Wakil Ketua : Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Sekretaris Daerah
- f. Sekretaris : Kepala Bidang PP PA BPMPKB
- g. Anggota
  - 1) Inspektur
  - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
  - 3) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
  - 4) Kepala Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

- 5) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- 6) Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
- 7) Kepala Dinas Kesehatan
- 8) Kepala Dinas Pendidikan
- 9) Kepala Dinas Perindustrian dan Energi
- 10) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
- 11) Kepala Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan
- 12) Kepala Dinas Kebersihan
- 13) Kepala Dinas Bina Marga
- 14) Kepala Dinas Tata Air
- 15) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda
- 16) Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
- 17) Kepala Dinas Sosial
- 18) Kepala Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 19) Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan
- 20) Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi
- 21) Kepala Satuan Pamong Praja
- 22) Unsur Dunia Usaha
- 23) Unsur Masyarakat/Perguruan Tinggi

Selanjutnya dalam pasal (12) diatur tugas-tugas dari masing-masing

Pengurus RPTRA tingkat Provinsi.:

- 1) Menyusun rencana kerja dan rencana strategis RPTRA untuk 3 tahun.
- 2) Menyusun kebijakan pengelolaan RPTRA
- 3) Mengangkat dan memberhentikan pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administratif.
- 4) Memfasilitasi kontribusi, dunia usaha, masyarakat dan pengurus tinggi untuk pengembangan RPTRA.
- 5) Membangun dan mengembangkan jejaring dengan praktisi pemberdayaan masyarakat guna pengembangan RPTRA.
- 6) Memberikan arahan, bimbingan, saran dan masukan kepada pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administratif.
- 7) Melaksanakan pelatihan untuk pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administratif dan pengurus/pengawas RPTRA.
- 8) Menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan, dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi, pengurus RPTRA tingkat kota administrasi/kabupaten administratif.
- 9) Memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat kota administratif/kabupaten administratif.
- 10) Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada Gubernur.

2. Dalam pasal (13) ditetapkan Pengurus RPTRA tingkat Kota Administratif/Kabupaten Administratif

- a. Ketua : Walikota/Bupati
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Kota Administratif / Kabupaten Administratif
- c. Sekretaris : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi.
- d. Anggota

1) Kepala Kantor Keluarga Berencana (KB)

Kantor Keluarga Berencana tingkat Kota Administrasi sangat berperan dalam pengimplementasian RPTRA karena bergerak dibidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang tentunya memiliki keterkaitan dengan RPTRA. Karena dengan dibangunnya RPTRA diharapkan masyarakat dapat menjadi individu yang bersosialisasi dengan tetangga dan jika memiliki keluhan mengenai urusan rumah tangganya, masyarakat dapat menghubungi dinas-dinas terkait yang nomor teleponnya sudah dipanjang dilingkungan RPTRA, hal tersebut bertujuan agar tercapainya keluarga sejahtera.

2) Kepala Kantor Perencanaan Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi

Kantor perencanaan ini bertugas untuk merencanakan program RPTRA di tingkat Kota Administrasi, yang tentunya dibawah koordinasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi DKI Jakarta.

3) Kepala Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah

Kantor Pengelolaan Keuangan Daerah di tingkat Kota Administrasi bertugas untuk mengawasi keuangan atau anggaran yang dikeluarkan oleh pihak swasta yang mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk pembangunan RPTRA.

4) Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman bertugas untuk mengurus tanaman yang ada di lingkungan RPTRA. Jadi, seluruh tanaman yang ada di RPTRA merupakan tanggung jawab dari Suku Dinas Pertamanan dan Pemakaman.

5) Kepala Suku Dinas Kesehatan

Suku Dinas Kesehatan bertugas untuk mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan, seperti penyuluhan dan lain sebagainya.

6) Kepala Suku Dinas Pendidikan

Suku Dinas Pendidikan bertugas untuk berpartisipasi dalam pengelolaan RPTRA khususnya di bidang Pendidikan.

7) Kepala Suku Dinas Perindustrian dan Energi

Suku Dinas Perindustrian dan Energi mengelola RPTRA dibidang perindustrian dan energi. Dalam hal ini, perindustrian lah yang lebih didahulukan karena di dalam lingkungan RPTRA warga setempat dapat berjualan. Hal tersebut juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di wilayah setempat.

8) Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan.

Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan ini juga bertugas mengelola RPTRA di bidangnya. Seperti, jaringan *wifi* dan kamera *cctv* yang terdapat di RPTRA.

9) Kepala Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

Sudin Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya di bidang pertanian bertugas untuk memberikan bibit tanaman baik tanaman hias maupun tanaman obat yang terdapat di RPTRA.

10) Kepala Suku Dinas Kebersihan

Suku Dinas Kebersihan bertanggung jawab untuk mengelola RPTRA di bidang kebersihan. Dengan memberikan petugas Penangan Prasarana dan Sarana Umum (PSSU) yang bertugas membersihkan dan merawat RPTRA.

11) Kepala Suku Dinas Bina Marga

Suku Dinas Bina Marga bertanggung jawab atas pemeliharaan sarana dan prasarana di RPTRA.

12) Kepala Suku Dinas Tata Air.

Suku Dinas Tata Air bertanggung jawab dengan pemeliharaan saluran air yang terdapat di RPTRA. Air merupakan salah satu komponen yang penting karena fungsinya untuk menyiram tanaman yang ada di RPTRA dan juga untuk keperluan sanitasi di RPTRA.

13) Kepala Suku Dinas Olahraga

Suku Dinas Olahraga bertanggung jawab dengan sarana olahraga yang terdapat di RPTRA. Karena sudah berkurangnya lahan untuk masyarakat berolahraga jadi Suku Dinas Olahraga, berupaya mengoptimalkan sarana olahraga tersebut.

14) Para Camat

15) Ketua TP PKK Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi

16) Wakil Ketua I TP PKK Kota administrasi/ Kabupaten Administrasi

17) Wakil Ketua II TP PKK Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi.

Dalam pasal (14) diatur tugas dari pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagai berikut:

1) Mengangkat dan memberhentikan Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan



- 2) Memfasilitasi kontribusi perguruan tinggi, perusahaan dan masyarakat di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk pengembangan RPTRA.
- 3) Menyelenggarakan pelatihan teknis untuk pengurus dan pengawas RPTRA
- 4) Memberikan arahan, bimbingan, saran, dan masukan kepada pengurus RPTRA tingkat Kelurahan.
- 5) Menyiapkan lahan dan lokasi baru untuk pembangunan RPTRA
- 6) Mengoordinir pembangunan fisik RPTRA
- 7) Menyiapkan calon pengurus, pelaksana kegiatan, dan pengawas RPTRA tingkat Kelurahan serta tata laksana operasionalnya.
- 8) Menyetujui rencana kegiatan dan anggaran operational RPTRA serta sumber dananya.
- 9) Melakukan pemetaan sosial dan mendiskusikan desain fisik RPTRA secara partisipatif dengan warga setempat
- 10) Memanfaatkan perizinan pembangunan RPTRA
- 11) Menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari dunia usaha, masyarakat, dan perguruan tinggi, pengurus RPTRA tingkat Kelurahan.
- 12) Memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 13) Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada pengurus RPTRA tingkat Provinsi.

Berdasarkan penjelasan diatas, kita dapat mengetahui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) apa saja yang bertanggung jawab untuk mengurus RPTRA, baik SKPD tingkat Provinsi maupun SKPD di tingkat Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi. Untuk lebih memahami lebih rinci lagi, penulis akan memaparkan tentang tugas pengurus di tingkat Kecamatan hingga tingkat Kelurahan, sebagai berikut:

### 3. Pengurus RPTRA tingkat Kecamatan

Dalam kedudukannya sebagai anggota pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi, Camat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Memberikan dukungan kepada pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 2) Memonitor pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat Kelurahan
- 3) Mengoordinasikan antar pengurus RPTRA tingkat Kelurahan

- 4) Menindaklanjuti perintah Walikota / Bupati selaku ketua pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi untuk memperlancar pelaksanaan tugas pengurus RPTRA tingkat Kelurahan terkait pengelolaan RPTRA
  - 5) Melaporkan kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi terkait pengelolaan RPTRA, dan
  - 6) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota selaku ketua pengurus RPTRA Tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi
4. Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan

Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan merupakan pengendali langsung pelaksanaan tugas, fungsi, pelayanan, dan kegiatan RPTRA berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang terdiri atas:

- |  |  |
|--|--|
| a. Ketua   | : Lurah  |
| b. Ketua Harian  | : Sekretaris Lurah                                       |
| c. Wakil Ketua Harian  | : Kepala Seksi Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat |
| d. Sekretaris  | : Penyuluh KB  |
| e. Anggota   |  |
| 1) Kepala seksi prasarana, sarana, kebersihan dan lingkungan hidup |  |
| 2) TP PKK Kelurahan  |  |
| 3) Unsur masyarakat  |  |

Pengurus RPTRA di tingkat Kelurahan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan RPTRA
- 2) Menyusun dan mengusulkan kepada pengurus RPTRA Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi rencana kerja dan anggaran kegiatan secara partisipatif
- 3) Memonitor dan mengevaluasi ketersediaan dan kelayakan prasarana dan sarana RPTRA serta melaporkan kepada SKPD/UKPD terkait sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing.
- 4) Memelihara kebersihan dan keamanan RPTRA
- 5) Menerima dan menindaklanjuti permohonan, usul, masukan dan/atau laporan dari pelaksana kegiatan RPTRA
- 6) Melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA melalui pelaksana kegiatan RPTRA
- 7) Melakukan pembinaan terhadap pelaksana kegiatan RPTRA

- 8) Memberikan bantuan langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA dan pelaksana kegiatan RPTRA
- 9) Melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bisa dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat
- 10) Memutuskan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA dan pelaksana kegiatan RPTRA
- 11) Melaporkan permasalahan pengelolaan RPTRA yang tidak bisa dilaksanakan dan/atau bukan kewenangannya kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat
- 12) Memutuskan dan memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kegiatan pelayanan RPTRA sesuai dengan kewenangan Kelurahan dan
- 13) Membuat dan menyampaikan laporan pengelolaan RPTRA kepada pengurus RPTRA tingkat Kota Administrasi / Kabupaten Administrasi dengan tembusan kepada Camat

#### 5. Pelaksana Kegiatan RPTRA

- a. Pelaksana kegiatan RPTRA merupakan petugas yang melaksanakan langsung kegiatan pelayanan pada RPTRA diangkat dari kader PKK dan unsur masyarakat berjumlah paling banyak 6 (enam) orang, terdiri atas:
  - 1) Unsur kader PKK; dan
  - 2) Unsur masyarakat yang secara nyata mempunyai kegiatan di RPTRA
- b. Pelaksana kegiatan RPTRA diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus RPTRA tingkat Kelurahan dengan Keputusan Ketua.
- c. Pelaksana Kegiatan RPTRA diberikan upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Masa bakti Pelaksana Kegiatan RPTRA selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Pelaksana Kegiatan RPTRA mempunyai tugas :

- 1) Menyusun rencana kegiatan dan anggaran RPTRA untuk diajukan kepada pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- 2) Melaksanakan kegiatan pelayanan RPTRA;
- 3) Memonitor pemanfaatan prasarana dan sarana RPTRA;
- 4) Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA;
- 5) Membuka dan menutup fasilitas RPTRA;
- 6) Menjaga prasarana dan sarana RPTRA;

- 7) Memberikan pelatihan, penyuluhan, sosialisasi, pendampingan, pemahaman, komunikasi, informasi dan edukasi kepada pemanfaat dan pengunjung RPTRA;
- 8) Memulai dan mengakhiri kegiatan sehari-hari di RPTRA;
- 9) Melaporkan kerusakan prasarana dan sarana RPTRA kepada pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan;
- 10) Melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan; dan
- 11) Melaporkan pelaksanaan tugas Pelaksana Kegiatan RPTRA kepada Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan secara periodik

#### **4. Anggaran RPTRA**

Berdasarkan pada Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, Anggaran pelaksanaan RPTRA Tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPPAPP. Berikut rincian Anggaran RPTRA yang ada pada DPPAPP (APBD DKI Jakarta, 2018):

1. Penggalangan gelar kreativitas 10 Program PK di RPTRA sebesar Rp.247.800.000,-
2. Program pemberdayaan masyarakat dan pemetaan sosial RPTRA sebesar Rp. 1.003.375.000,-
3. Pelaksanaan model solusi strategis dampak kependudukan di RPTRA sebesar Rp. 61.700.000
4. Pelaksanaan rekrutmen pengelola RPTRA sebesar Rp. 46.775.000,-
5. Pembekalan kesehatan reproduksi pada PUS MUPAR bagi Pengelola RPTRA sebesar Rp. 9.600.000,-

6. Pemenuhan indikator Kota Layak Anak di RPTRA dan lingkungan sekitarnya sebesar Rp. 38.085.000,-

Total anggaran yang dimiliki DPPAPP untuk RPTRA pada tahun 2018 sebesar Rp.1.407.335.000,-. Kemudian Anggaran pelaksanaan RPTRA Tingkat Kelurahan di bebaskan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengurus RPTRA Tingkat Kelurahan yakni Kelurahan Kembangan Utara. Berikut rincian Anggaran RPTRA pada Kelurahan Kembangan Utara yakni untuk Pengelolaan RPTRA dan Gaji Pengelola RPTRA sebesar Rp.683.645.916,- (APBD DKI Jakarta, 2018). Total anggaran yang dimiliki Kelurahan Kembangan Utara untuk RPTRA pada tahun 2018 sebesar Rp. 683.645.916,-

### **Dasar Hukum RPTRA**

Hukum nasional yang mendukung program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai revisi atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang memelopori program Pemerintah yaitu Kota Layak Anak, kemudian Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selanjutnya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.

Karena pada awal terencananya program RPTRA, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin menjadikan DKI Jakarta sebagai kota layak anak. Oleh karena

itu dikeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dan disempurnakan oleh Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016. Serta Surat Keputusan Gubernur No. 1192 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta. Dan Surat Keputusan Gubernur No. 394 tahun 2011 tentang Penunjukkan Kota Administrasi Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta selatan sebagai Pengembangan Kota Layak Anak. Dilanjutkan dengan Surat Keputusan Gubernur No. 736 tahun 2013 tentang Penunjukkan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota Layak Anak Berikutnya. Maka dibangunlah RPTRA sebagai upaya untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan menggandeng pihak swasta sebagai pihak yang membangun RPTRA dengan menggunakan dana *Coorporate Social Responsibility* (CSR).

Berikut merupakan rincian payung hukum dari RPTRA sejak pertama dibuat hingga saat ini:

1. Tahun 2015, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama membuat Peraturan Gubernur No. 196 tahun 2015 tentang Pengelolaan RPTRA dan disempurnakan oleh Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016.
2. Tahun 2016, RPTRA masih menggunakan Peraturan Gubernur tersebut sebagai payung hukumnya.
3. Tahun 2017, Gubernur Djarot Saiful Hidayat mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah RPTRA. Bapak Djarot ingin perda yang memuat

keberadaan dan pengelolaan RPTRA itu dibuat demi memastikan keberlanjutan program. Beliau berharap, melalui perda fungsi RPTRA membangun karakter masyarakat diharapkan bisa tercapai. Perda tersebut juga akan mengatur apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di RPTRA.

4. Tahun 2017, Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI Jakarta telah merampungkan naskah Perda RPTRA. Dan telah diserahkan kepada badan legislatif daerah.
5. Tahun 2018, saat ini Rancangan Peraturan Daerah telah masuk ke Badan Legislatif Daerah bersama 45 Raperda lainnya. (Metrotvnews.com)



### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti (Sugiyono, 2012:205). Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran secara tepat dan menjelaskan secara terperinci berkaitan dengan Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif. Seperti yang dikatakan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:1) bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan perilaku orang-orang yang diamati. Melalui penelitian kualitatif dapat mengenali subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari.

Ada beberapa alasan yang mendasari penelitian untuk menggunakan metode kualitatif, seperti yang dikemukakan oleh Strauss dan Corbin (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:8), antara lain:

- a. Penelitian kualitatif yang dilakukan bertujuan untuk memahami apa yang tersembunyi di balik fenomena yang kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau dipahami. Metode kualitatif diharapkan mampu memberikan suatu penjelasan secara terperinci tentang fenomena yang sulit disampaikan dengan metode kualitatif.
- b. Permasalahan yang diteliti itu sendiri yang mengharuskan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menemukan sifat atau pengalaman seseorang dengan suatu fenomena.

Berdasarkan alasan di atas, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, karena dengan penelitian deskriptif, peneliti dapat mendeskripsikan Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah batasan masalah yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian kualitatif yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum (Sugiyono, 2012:207). Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi lapangan. Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial.

Pembatasan fokus sangat penting artinya dalam menentukan batasan penelitian yang akan dilakukan sehingga akan memperjelas batasan dan juga mempertajam pemahaman. Oleh karena itu, sehubungan dengan topik Implementasi Program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat, agar penelitian ini nantinya lebih terarah dan mudah dalam hal pencarian data, maka yang menjadi fokus penelitian ini adalah:

1. Implementasi Program RPTRA studi pada RPTRA Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat yang meliputi pelaksanaan program RPTRA di kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat yang terdiri dari :
  - a. Komunikasi yang digunakan dalam menjalankan rogram RPTRA
  - b. Sumberdaya yang digunakan dalam menjalankan program
  - c. Disposisi pelaksanaan program dalam menjalankan program RPTRA
  - d. Struktur organisasi yang terlibat dalam melaksanakan program RPTRA
2. Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi Implementasi Program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.
  - a. Faktor Pendukung
  - b. Faktor Penghambat

### C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Administrasi Jakarta Barat. Sedangkan situs penelitian adalah tempat sebenarnya peneliti melakukan penelitian guna memperoleh data maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun situs penelitian dalam penelitian ini adalah RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

Pertimbangan peneliti dalam menentukan lokasi penelitian di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat dikarenakan pertama Jakarta Barat merupakan salah satu pengembangan KLA sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 736 tahun 2013, kedua Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta yang mempunyai jumlah penduduk miskin tertinggi ke 3 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 89,39 ribu jiwa (Badan Pusat Statistik DKI Jakarta, 2016: 145). Karena pada dasarnya, pembangunan RPTRA ini diutamakan untuk masyarakat dari tingkat ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat yang tinggal di pemukiman padat yang tentunya lahan untuk bermain anak lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, mengapa Kelurahan Kembangan Utara dikarenakan RPTRA pertama yang dibangun dan diresmikan di Jakarta Barat adalah RPTRA Kembangan Utara dan Jakarta Barat menjadi salah satu kota administrasi di Jakarta yang memiliki jumlah kegiatan di RPTRA paling banyak dengan di ikuti Jakarta Utara di tempat kedua (hasil

wawancara dengan pengurus RPTRA) tentu ini tidak lain karena RPTRA kembangan utara yang menjadi pedoman RPTRA lainnya di Jakarta Barat. Keempat terdapat masalah yang menjadi perhatian penilit di RPTRA kembangan utara yakni pengebolan tembok RPTRA oleh warga hanya karena di anggap akses jalan yang biasa dilewati oleh warga menjadi lebih jauh dengan adanya RPTRA didaerah mereka, tentu ini menjadi hal yang memperhatikan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Dalam penelitian ini dapat primer yang diperoleh adalah melalui wawancara dengan pihak terkait:

- 1) Kepala Seksi Pengelolaan dan Kemitraan RPTRA Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta.
- 2) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat

- 3) Kepala Seksi Komunikasi Informasi Publik Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jakarta Barat
- 4) Kepala Puskesmas Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat
- 5) Ketua Pokja 2 TP-PKK Jakarta Barat
- 6) Pustakawan I Suku Dinas Perpustakaan Daerah Jakarta Barat
- 7) Ketua Seksi Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Kembangan Utara
- 8) Pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kembangan Utara
- 9) Masyarakat dan anak sekitar RPTRA Kembangan Utara

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini, peneliti dapatkan melalui studi kepustakaan, dan dokumen resmi serta membaca juga dari refrensi lain seperti media massa baik yang cetak maupun *online* dan juga dari karya ilmiah lainnya yang terkait dengan kebijakan, program, dan mengenai ruang publik.

2. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kejadian, dokumen atau seseorang yang dipilih untuk memperoleh data-data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Sumber data dalam penelitian ini adalah:

- a. Peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam implementasi program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.
- b. Dokumen yaitu sumber data berasal dari bahan-bahan tertulis, seperti undang-undang, bahkan laporan-laporan, dokumen-dokumen yang terkait dengan implementasi program RPTRA.
- c. Informan yang terdiri dari orang-orang atau kelompok/organisasi yang terlibat dalam proses implementasi program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian, karena dengan teknik pengumpulan data yang tepat maka akan diperoleh data yang akurat dan valid. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Wawancara



Wawancara yaitu teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh (Sugiono, 2012:233). Dalam melakukan wawancara, selain harus membawa instrument sebagai pedoman untuk wawancara, maka pengumpulan data juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, dan material lain yang dapat membantu pelaksanaan wawancara menjadi lancar. Dengan wawancara, peneliti atau pengumpul data dapat menggunakan pewawancara sebagai pengumpul data.

Adapun pihak narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini terdiri dari SKPD-SKPD terkait yang memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan pengimplementasian RPTRA di Jakarta Barat. Pada saat wawancara dengan masing-masing narasumber, kurang lebih enam puluh menit untuk mendapat data yang diinginkan sesuai dengan pedoman wawancara. Alat bantu yang digunakan peneliti pada saat wawancara berupa alat tulis dan handphone.

## 2. Observasi

Observasi merupakan kegiatan dimana peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2012:267). Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian. Dalam hal ini yang menjadi titik observasi adalah RPTRA Kembangan Utara Jakarta Barat. Dalam penelitian ini observasi dilakukan sebanyak tiga kali dengan

maksud mendapat data hasil pengamatan peneliti serta untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh peneliti. Peneliti melakukan observasi dengan menggunakan alat bantu berupa handphone untuk memotret gambar, alat tulis untuk mencatat peristiwa.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap (Basrowi dan Suwandi, 2008:158). Dokumentasi disini berupa catatan dokumen-dokumen yang sudah ada, atau berupa foto-foto kegiatan yang dilakukan di RPTRA.

## **F. Instrumen Penelitian**

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan (Sugiyono, 2012:222). Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian. Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:224) peneliti sebagai instrumen penelitian serasi untuk penelitian serupa karena memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat beraksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna atau tidak bagi penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Peneliti dapat menafsirkan dengan segera menentukan arah pengamatan.

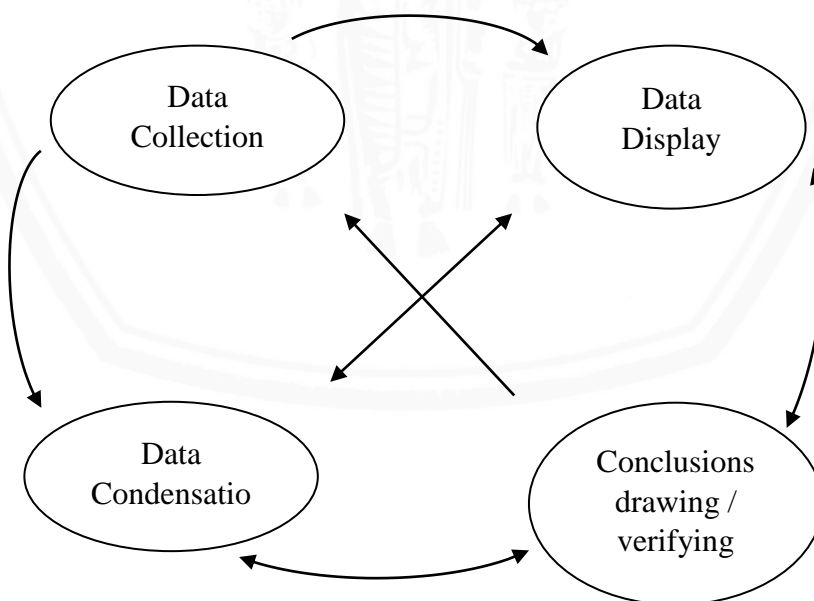
#### **G. Analisis Data**

Setelah memperoleh dan mengumpulkan data yang dikehendaki maka selanjutnya adalah tahap analisis data agar bisa menghasilkan suatu hasil atau gambaran yang bermanfaat dan kemudian merubahnya menjadi suatu bahasan yang bermakna. Analisis data dimaknai sebagai kegiatan mengolah data yang diperoleh dari pustaka dan lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam bentuk penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. Menurut Sugiyono (2013:244) “analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain”. Sedangkan menurut Widi (2010:253) “analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan,

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung keputusan”.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rancangan analisa data dengan model interaktif dikarenakan sifat penelitian ini bersifat interaktif, yaitu peneliti melakukan penelitian dilapangan dan berinteraksi secara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini menggunakan analisis data dari Miles and Huberman dalam bukunya *Qualitative Data Analysis: An Expeded Sourcebook (3rd ed)*, adapun model analisa data interaktif model Miles and Huberman dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 3.1



*Component of Data Analysis (Interactive Model)*  
 Sumber: Miles, Huberman and Saldana (2014:33)

### 1. *Data Condensation* (Kondensasi Data)

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola yang penting, sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan dapat melanjutkan langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain.

### 3. *Conclusion Drawing/Verivication* (Pengambilan Keputusan)

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. .

## H. Uji Keabsahan Data

Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan (Moloeng, 2013:324). Pelaksanaan teknik pemeriksaan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu pengecekan data dari berbagai cara dan waktu (Satori dan Komariah, 2010:170-171). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Peneliti melakukan eksplorasi untuk mengecek kebenaran data dari beragam sumber yang masih terkait satu sama lain dalam Implementasi Program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

### 2. Triangulasi Teknik

Peneliti mengungkapkan data pada sumber data dengan menggunakan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang diperoleh dari wawancara dengan sumber data, melalui observasi maupun dengan dokumentasi.

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik pengujian realibilitas data melalui *member check* atau pengecekan keanggotaan. Tujuan *member check* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh telah sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh informan penelitian, sehingga data yang didapat merupakan data yang valid dan kredibel (dapat dipercaya) sesuai dengan yang telah disesuaikan dan disepakati oleh informan penelitian yang kemudian

ditandatangani sebagai bukti autentik bahwa peneliti telah melakukan *member check*.





## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kota Administratif Jakarta Barat

Terdapat lima wilayah kota administrasi dan satu wilayah kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Kota administratif Jakarta Barat merupakan salah satu bagian yang memiliki kedudukan setingkat dengan Kotamadya Tingkat II yang bertanggung jawab langsung kepada Gubernur DKI Jakarta berdasarkan penetapan Presiden RI No.2 Tahun 1961 tentang Pemerintahan DKI Jakarta dan Penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah bahwa tugas, wewenang dan kewajiban walikotamadya adalah menjalankan Pemerintahan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dalam wilayah. Tugas-tugas tersebut meliputi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, kesejahteraan masyarakat, sosial politik, agama, tenaga kerja, pendidikan, pemuda dan olahraga. Kependudukan perekonomian dan pembangunan fisik prasarana lingkungan serta bidang-bidang lain yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta. Prestasi yang diperoleh Kota Administratif Jakarta Barat antara lain:

1. Penataan proyek percontohan GDN Kyai Tapa
2. Penataan kawasan Glodok Pancoran
3. Penataan kawasan Polgar
4. Piagam dari Menteri Dalam Negeri tentang keberhasilan pembangunan revitalisasi kota tua

5. Penataan Kali Mookervart
6. Penataan Kali Angke Anyar

Kota Administratif Jakarta Barat mempunyai kriteria kekhususan, diantaranya sebagai kota tua dan kota metropolitan yang serba megah. Julukan ini didasarkan bahwa Jakarta Barat memiliki bangunan-bangunan tua/kuno, dan gedung mewah seperti hotel bintang, plaza, apartemen dan sebagainya.

#### **a. Kondisi Geografis Kota Administratif Jakarta Barat**

Kota Administratif Jakarta Barat merupakan dataran rendah yang terletak sekitar 7 meter di atas permukaan laut. Letaknya secara astronomis terletak  $106,22^{\circ}$  -  $106,58^{\circ}$  Bujur Timur dan  $5,19^{\circ}$  -  $6,23^{\circ}$  Lintang selatan, dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Jakarta Utara ( Kecamatan Penjaringan)
2. Sebelah Timur : Jakarta Pusat (Kecamatan Gambir)
3. Sebelah Selatan : Jakarta Selatan dan Provinsi Banten (Kota Tangerang)
4. Sebelah Barat : Provinsi Banten (Kota Tangerang)

Kondisi iklim Kota Administratif Jakarta Barat selama tahun 2013 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara  $25,1^{\circ}\text{C}$  –  $29,4^{\circ}\text{C}$ . Sedangkan suhu minimum terdapat pada bulan juli yakni  $23,7^{\circ}\text{C}$  dan suhu maksimum terdapat pada bulan oktober dengan suhu  $33,9^{\circ}\text{C}$  . Seperti umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Administratif Jakarta Barat mengikuti perubahan putaran 2 iklim, musim hujan, dan musim kemarau, dengan curah hujan setiap tahun rata-rata 131,00 mm dengan maksimal curah hujan pada bulan november yakni 236,2 mm.

Adapun peta wilayah Kota Malang adalah sebagai berikut :

**Gambar 4.1**

**Peta Kota Administrasi Jakarta Barat**



*Sumber : jakarta barat dalam angka 2013*

Secara administrasi, wilayah Kota Administratif Jakarta Barat dibagi menjadi 8 Kecamatan yaitu, Kembangan, Kebon Jeruk, Cengkareng, Kalideres, Grogol Petamburan, Palang Merah, Tambora, dan Taman Sari. Dengan masing-masing luas tiap kecamatan tahun 2014 yakni, Kembangan 24,16 km<sup>2</sup>, Kebon Jeruk 17,98 km<sup>2</sup>, Cengkareng 26,54 km<sup>2</sup>, Kalideres 30,23 km<sup>2</sup>, Grogol Petamburan 9,99 km<sup>2</sup>, Palang Merah 7,51 km<sup>2</sup>, Tambora 5,40 km<sup>2</sup> dan Taman Sari 7,73 km<sup>2</sup>. (sumber: Badan Pusat Statistik Kota Adm Jakarta Barat)

## b. Kondisi Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tenaga Kerja

Berdasarkan SK Gubernur Nomor 171 tahun 2007, Kota Administratif Jakarta Barat memiliki luas 129,54 Km<sup>2</sup>, serta mempunyai 23 sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air, perikanan dan bisnis perkotaan. Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2016 sebesar 2.463.560 jiwa yang terdiri dari 1.246.288 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 1.217.272 jiwa. Tersebar di 8 Kecamatan (Kembangan = 307.538 jiwa, Kebon Jeruk = 363.139 jiwa, Palmerah = 203.193 jiwa, Grogol Petamburan = 234.714 jiwa, Tambora = 239.991 jiwa, Taman Sari = 110.073 jiwa, Cengkareng = 565.372 jiwa, dan Kalideres = 439.540 jiwa). Terdiri dari 56 Kelurahan, 568 unit RW dan 6.202 unit RT. Jumlah penduduk Kota Administratif Jakarta Barat tahun 2016 tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.1: Jumlah Penduduk Kota Administratif Jakarta Barat Per Kecamatan Tahun 2016

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Rasio Jenis
	Laki-laki	Perempuan	Total	Kelamin
Kembangan	153.416	154.122	307.538	99,54
Kebon Jeruk	181.704	181.435	363.139	100,15
Palmerah	103.973	99.220	203.193	104,79
Grogol Petamburan	114.596	120.118	234.714	95,40
Tambora	124.963	115.028	239.991	108,64
Taman Sari	54.918	55.155	110.073	99,57
Cengkareng	289.293	276.079	565.372	104,79

Kalideres	223.425	216.115	439.540	103,38
Jakarta Barat	1.246.288	1.217.272	2.463.560	102,38

Sumber : Jakarta Dalam Angka 2016

Berdasarkan jenis pekerjaannya, Masyarakat Kota Administratif Jakarta Barat memiliki beberapa lapangan usaha yakni pertanian, pertambangan dan penggalan, industri, listrik/gas/air minum, perdagangan/hotel/restoran , angkutan dan komunikasi, keuangan/asuransi, bangunan, jasa dan lainnya.. Berikut adalah jumlah persentase masyarakat Kota Administratif Jakarta Barat berdasarkan profesinya :

Tabel 4.2: Jumlah Tenaga Kerja Menurut Lapangan Usaha di Jakarta Barat Tahun 2013

Lapangan Usaha Utama	Jumlah Tenaga Kerja	Persentase
Pertanian	1.139	0,21 %
Pertambangan dan penggalan	324	0,06 %
Industri	229.194	44,26 %
Listrik, gas, dan air minum	1.484	0,28 %
Perdagangan, hotel dan restoran	164.335	31,74 %
Angkutan dan komunikasi	16.512	3,18 %
Keuangan dan asuransi	30.015	5,80 %
Bangunan	16.772	3,23 %
Jasa dan lainnya	57.954	11,19 %
Jumlah	517.729	100,00 %

Sumber : BPS Kota Administratif Jakarta Barat

## **2. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP)**

### **a. Tugas dan Fungsi**

DPPAPP sebagaimana tercantum dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 283 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja dinas pemberdayaan, perlindungan anak, dan pengendalian penduduk. DPPAPP menyelenggarakan tugas membantu Gubernur untuk melaksanakan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DPPAPP melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran DPPAPP;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPPAPP;
- c. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis penyelenggaraan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta bidang penggerakan dan ketahanan keluarga;
- d. Pengkoordinasian dan pelaksanaan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang penggerakan dan ketahanan keluarga;

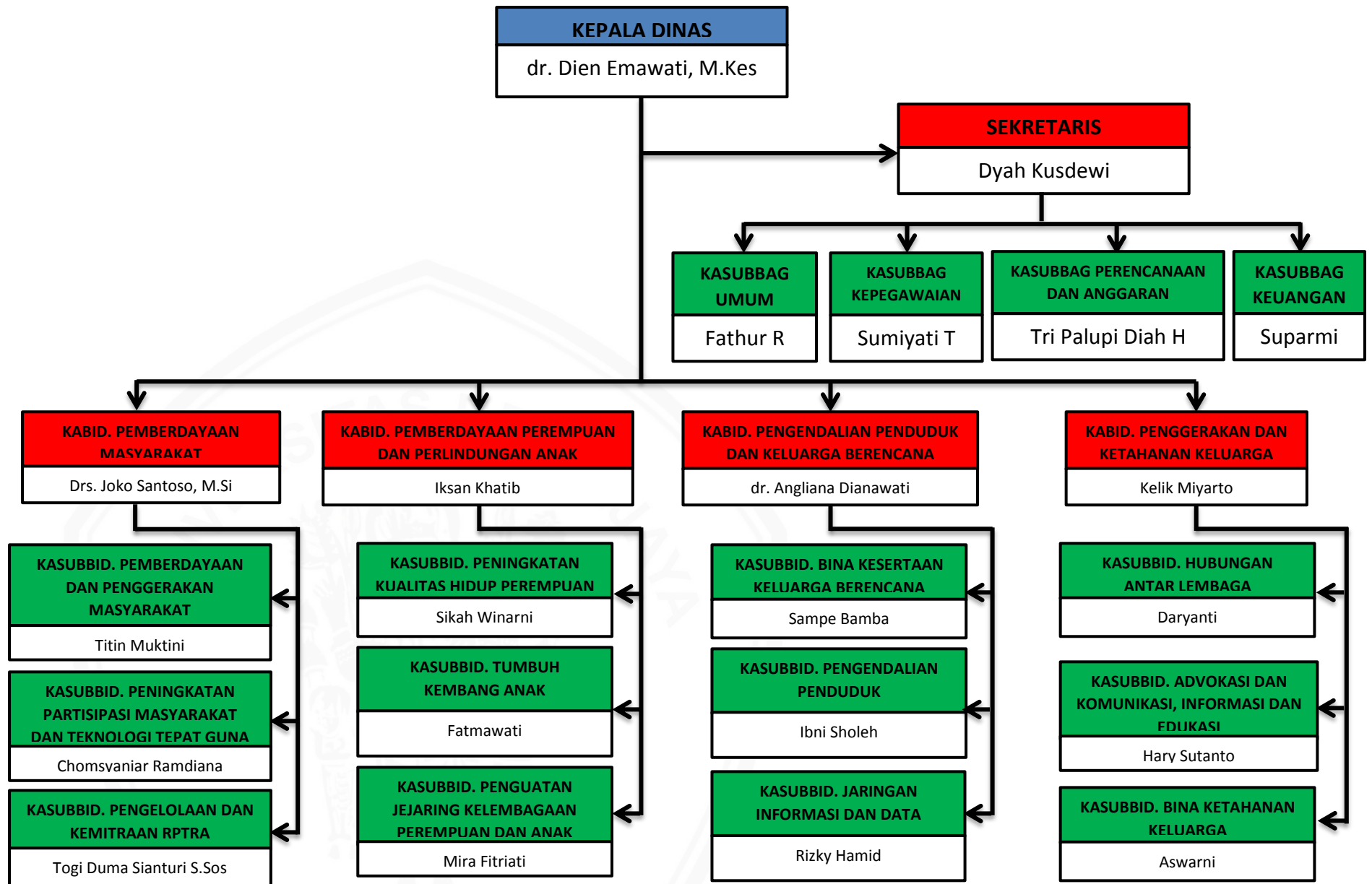
- e. Fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pergerakan dan ketahanan keluarga;
- f. Pengkoordinasian norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pergerakan dan ketahanan keluarga;
- g. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pergerakan dan ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan kebijakan bina sosial dan bina fisik pemberdayaan masyarakat kelurahan;
- i. Peningkatan kompetensi tenaga di bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pergerakan dan ketahanan keluarga;
- j. Pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan Perangkat Daerah;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penganggulangan masalah reproduksi, infertilitas dan pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu hamil kepada anaknya;
- l. Pengoordinasian pengentasan/penanggulangan kemiskinan;



- m. Pelaksanaan fasilitasi dan pemberian dukungan pengelolaan kemitraan bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pergerakan dan ketahanan keluarga;
- n. Pelaksanaan fasilitasi dan dukungan dana, sarana dan prasarana bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pergerakan dan ketahanan keluarga;
- o. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang pergerakan dan ketahanan keluarga;
- p. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang DPPAPP;
- q. Pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DPPAPP;
- r. Pengelolaan kearsipan, data dan informasi DPPAPP; dan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi DPPAPP.

**b. Struktur Organisasi**

**Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi DPPAPP**



Berdasarkan struktur organisasi (Gambar 4.2), organisasi DPPAPP terdiri atas Sekretariat yang membawahi Sub Bagian Umum, Sub Bagian Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Anggaran, dan Sub Bagian Keuangan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yang membawahi Seksi Pemberdayaan dan Penggerakan Masyarakat, Seksi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Pengelolaan dan Kemitraan RPTRA. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang membawahi Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan, Seksi Tumbuh Kembang Anak, dan Seksi Penguatan Jejaring Kelembagaan Perempuan dan Anak. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang membawahi Seksi Bina Kesertaan Keluarga Berencana, Seksi Pengendalian Penduduk, dan Seksi Jaringan Informasi dan Data. Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga yang membawahi Seksi Hubungan Antar Lembaga, Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi, dan Seksi Bina Ketahanan Keluarga.

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Sementara masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub-bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris. Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang. Hubungan tata kerja antara Kepala Dinas dengan bawahan atau sebaliknya secara administratif dilakukan melalui sekretaris.

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, maka adapun penjabaran tugas dan fungsi masing-masing bagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala DPPAPP mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi DPPAPP;
- b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas PPAPP, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD, instansi pemerintah/swasta, kader dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi DPPAPP;
- d. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPPAPP.

2. Sekretariat

Sekretariat merupakan Unit Kerja staff DPPAPP dan dipimpin oleh sekretaris yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi DPPAPP. Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Sekretariat;

- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran DPPAPP;
- d. Pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran DPPAPP;
- e. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat;
- f. Penghimpunan evaluasi dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera dan bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. Pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional dan tenaga teknis DPPAPP;
- h. Pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang DPPAPP;
- i. Pelaksanaan kerumahtanggaan dan ketatausahaan DPPAPP;
- j. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan DPPAPP;
- k. Penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan, perawatan dan dukungan dana, sarana dan prasarana kerja DPPAPP;
- l. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi sesuai lingkup tugasnya;
- m. Pelaksanaan upacara dan pengaturan acara DPPAPP;
- n. Pengelolaan teknologi informasi DPPAPP;
- o. Pengelolaan perpustakaan DPPAPP;

- p. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas DPPAPP; dan
- q. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

### 3. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Bidang Pemberdayaan Masyarakat merupakan Unit Kerja lini DPPAPP dalam pemberdayaan Masyarakat. Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas meningkatkan pemberdayaan dan penggerakan masyarakat, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna serta pengelolaan dan kemitraan RPTRA. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Masyarakat mennyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Bidang Pemberdayaan Masyarakat;

- f. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model pemberdayaan dan pergerakan masyarakat, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna serta pengelolaan dan kemitraan RPTRA;
- g. Pelaksanaan penguatan kegiatan dan upaya pemberdayaan, kelembagaan, pengembangan partisipasi pemberdayaan dan pergerakan masyarakat, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna serta pengelolaan dan kemitraan RPTRA;
- h. Pengoordinasian dan fasilitasi program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. Pengoordinasian dan kemitraan pemberdayaan dan pergerakan masyarakat, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna serta pengelolaan RPTRA;
- j. Pelaksanaan monitoring, supervisi, konsultasi dan evaluasi pemberdayaan, kelembagaan, pengembangan partisipasi masyarakat penerapan teknologi tepat guna dan pengelolaan RPTRA;
- k. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data serta informasi mengenai pemberdayaan dan pergerakan masyarakat, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna serta pengelolaan dan kemitraan RPTRA;
- l. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi pemberdayaan dan pergerakan masyarakat, partisipasi masyarakat dan teknologi tepat guna serta pengelolaan dan kemitraan RPTRA;



- m. Pengoordinasian bahan penyusun laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- n. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

#### 4. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan Unit Kerja lini DPPAPP dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPAPP. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas melaksanakan peningkatan kualitas hidup perempuan, tumbuh kembang anak dan penguatan jejaring kelembagaan perempuan dan anak. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- d. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis peningkatan kualitas hidup perempuan, tumbuh kembang anak dan penguatan jejaring kelembagaan perempuan dan anak;

- e. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- f. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
- g. Pelaksanaan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak terkait hak sipil, informasi dan partisipasi, pengasuhan, keluarga dan lingkungan, kesehatan dan kesejahteraan serta pendidikan, kreativitas dan kegiatan budaya;
- h. Pelaksanaan penguatan kelembagaan dan upaya peningkatan kualitas hidup perempuan, tumbuh kembang anak dan penguatan jejaring kelembagaan perempuan dan anak;
- i. Pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah tingkat provinsi;
- j. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- k. Pengoordinasian dan fasilitasi Kota Layak Anak;
- l. Pelaksanaan program RPTRA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- m. Pengoordinasian dan memfasilitasi penanggulangan perbudakan/perdagangan manusia (*human trafficking*), termasuk didalamnya penyiapan sarana dan prasarana *Trauma Centre* dan Pusat Pemberdayaan Perempuan;

- n. Pelaksanaan pengkajian dan pengemangan model peningkatan kualitas perempuan, tumbuh kembang anak, perlindungan perempuan dan anak serta pengarusutamaan gender;
- o. Pelaksanaan monitoring, supervisi, fasilitasi dan konsultasi dan evaluasi pelaksanaan peningkatan kualitas hidup perempuan, tumbuh kembang anak dan penguatan jejaring kelembagaan perempuan dan anak;
- p. Penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyajian, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi mengenai peningkatan kualitas hidup perempuan, tumbuh kembang anak dan penguatan jejaring kelembagaan perempuan dan anak;
- q. Pelaksanaan kegiatan publikasi dan promosi kegiatan peningkatan kualitas hidup perempuan, tumbuh kembang anak dan penguatan jejaring kelembagaan perempuan dan anak;
- r. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan
- s. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

##### 5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Unit Kerja lini DPPAPP dalam penyelenggaraan pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab

kepada Kepala DPPAPP. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
- e. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
- f. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah provinsi;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- h. Pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi, koordinasi dan evaluasi pedoman dan standar teknis bina kesertaan

keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;

- i. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pedoman dan standar teknis bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
- j. Pengoordinasian dan pengendalian bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
- k. Pengoordinasian pelaksanaan bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
- l. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model bina kesertaan keluarga berencana, pengendalian penduduk serta jaringan informasi dan data;
- m. Pelaksanaan program RPTRA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- n. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana; dan
- o. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana.

#### 6. Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga

Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga merupakan Unit Kerja lini DPPAPP dalam pelaksanaan penggerakan dan pembangunan keluarga. Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DPPAPP. Bidang

Penggerakan dan Ketahanan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan hubungan antar lembaga, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi serta bina ketahanan keluarga. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga;
- b. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga;
- c. Pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga;
- d. Penyusunan kebijakan dan regulasi teknis hubungan antar lembaga, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi serta bina ketahanan keluarga;
- e. Pelaksanaan pengembangan desain program, pengelolaan dan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai kearifan budaya lokal;
- f. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan pada lingkup wilayah provinsi;
- g. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) bidang penggerakan dan ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan monitoring, bimbingan teknis, supervisi, fasilitasi dan konsultasi, koordinasi dan evaluasi hubungan antar lembaga, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi serta bina ketahanan keluarga;

- i. Pelaksanaan penguatan hubungan antar lembaga, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi serta bina ketahanan keluarga;
- j. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan model hubungan antar lembaga, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi serta bina ketahanan keluarga;
- k. Pelaksanaan program RPTRA sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. Pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga; dan
- m. Penyusunan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penggerakan dan Ketahanan Keluarga.

## **B. Penyajian Data dan Fokus**

### **1. Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)**

#### **a. Pelaksanaan Program RPTRA di kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat**

Implementasi model Edward III mengajukan empat faktor variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Empat variabel atau faktor tersebut antara lain meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sinkronisasi empat faktor ini menjadi tolak ukur yang penting dalam mengimplementasikan sebuah program. Hal ini dikarenakan dari empat faktor tersebut dapat diketahui implementasi tersebut telah berjalan baik ataupun belum.



Peneliti akan menggunakan model implementasi dari Edward III untuk menganalisis implementasi program ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat sesuai dengan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berikut ini peneliti akan memberi uraian tentang Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat.

### **1. Komunikasi**

Proses komunikasi diperlukan dalam suatu organisasi karena komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Sedangkan komunikasi dalam sebuah program berarti merupakan proses penyampaian informasi program dari pembuat program kepada pelaksana program. Di dalam komunikasi terdapat 3 dimensi yaitu:

#### **a. Tranmisi Informasi**

Pada dimensi tranmisi menghendaki agar program tidak hanya disampaikan pada pelaksana program, akan tetapi juga kepada kelompok sasaran dari program tersebut dan pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP menyatakan bahwa:

“Jadi untuk komunikasi antar SKPD kita melalui pergub dan evaluasi. Kalo di pergub pengelola itukan sudah ada peran masing-masing skpd, jadi sudah jelas dalam pergub tersebut perannya.

Konkritnya itu perpustakaan dengan dinas perpustakaan dan arsip beserta jajarannya, terus untuk sarana olahraga berarti dengan dinas olahraga, dan seterusnya. Jadi RPTRA ini kan wadah seluruh SKPD, jadi program-program SKPD bisa konkrit di RPTRA gitu, jadi marketnya jelas, sarananya jelas, jadi maksudnya marketnya itu kan masyarakatnya udah jelas. Kemudian sedangkan untuk sosialisasi atau komunikasi yang dilakukan kepada masyarakat atau sasaran program, kami sebelumnya melakukan *social mapping* bersama masyarakat dan menunjukkan *prototype* dari program RPTRA ini. Nanti mereka yang memilih ingin dibangun lapangan futsal, atau volley itu sesuai permintaan dari masyarakatnya. Kemudian nanti CSR yang menyanggupinya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Kemudian pernyataan serupa yang diberikan oleh bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta barat seperti berikut :

“Yang mengatur itu ada Pergub 40 tahun 2016, disini ada siapa siapa aja anggota nya. Tugas tugas mereka apa aja ada disini semua, jadi harusnya udah jelas yang terlibat nih. Jadi untuk komunikasi tentang pelaksanaan program RPTRA ini, kita semua mengikuti pedoman yang sudah ada di pergub itu. Kalo untuk sosialisasi ke masyarakat itu, selain dari kami suku dinas PPAPP ya itu dari pak lurahnya, yang memberitahukan warga bahwa akan di bangun RPTRA dilingkungan kita. Baik sebelum RPTRA di bangun, atau setelah terbangun. Akan selalu ada sosialisasi kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di RPTRA”. (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11:54 WIB di Kantor Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat).

Selanjutnya pernyataan yang menambahkan yang diberikan oleh Ibu R Euis Dewi Sartika sebagai ketua seksi kesejahteraan rakyat kelurahan Kembangan Utara :

“Kalo sosialisasi masyarakat udah tau pada tau RPTRA, contohnya setiap ada kegiatan posyandu, kita gilir nih setiap warga dari masing-masing RW untuk ikut nih, jadi mereka pasti tau RPTRA dari kegiatan-kegiatannya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 13.35 WIB di Kantor Kelurahan Kembangan Utara).

Kemudian pernyataan yang diberikan oleh salah seorang warga sekitar RPTRA Kembangan Utara yakni Ibu Asih:

“Ya saya tau ada taman baru deket rumah, sempet dikasih tau juga sama pak RW kalo mau di bangun taman bermain gitu buat anak disitu. Terus katanya ntar ada posyandu sama jual bahan-bahan makanan dengan harga murah disitu”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.45 WIB di RPTRA Kembangan Utara).

Proses sosialisasi sudah dilaksanakan mulai dari dinas-dinas terkait hingga ke pada masyarakat sekitar kelurahan Kembangan Utara, serta pengelola RPTRA dan para CSR yang akan ikut berpartisipasi. Suatu program dikatakan dapat berjalan dengan efektif adalah apabila semua pelaku program mengerti apa yang seharusnya akan dilakukan. Komunikasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) sudah berlangsung dengan baik, dalam DPPAPP itu sendiri, ataupun komunikasi antara DPPAPP dengan dinas lain, maupun dengan masyarakat dan CSR yang terlibat.

Berikut ini merupakan gambar hasil dokumentasi peneliti mengenai komunikasi (sosialisasi) yang dilakukan pelaksana program RPTRA dalam hal ini pengelola RPTRA Kembangan Utara untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan yang akan dilakukan yakni Program Pangan Murah bagi masyarakat.

**Gambar 4.3 : Sosialisasi Kegiatan Program Pangan Murah oleh Pengelola RPTRA Kembangan Utara**



*Sumber : Hasil Dokumentasi Peneliti, 2017*

#### b. Kejelasan

Dimensi kejelasan (*clarity*) menghendaki agar program yang ditranmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap program dapat diterima dengan jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari program tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) dalam melaksanakan program RPTRA ini dapat melakukan komunikasi yang baik tentu juga karena adanya pergub yang ada yaitu Pergub No. 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan kemudian disempurnakan oleh Pergub No. 40 Tahun 2016 yang mana setiap tugas pokok dan fungsi dari setiap SKPD yang terlibat dapat dilihat dengan

jelas pada pergub tersebut. Hal ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP menyatakan bahwa :

“Jadi kita ada buku pedoman pengelolaan, sebenarnya di pergub sudah jelas. Tapi pedoman teknisnya sudah ada dibuku pedoman, dan itu sudah diberikan pada saat mereka pelatihan dasar jadi sebelum mereka terjun sebagai pengelola di lapangan itu mereka sudah dapat materi pelatihan dasar tentang pedoman pengelolaan RPTRA. Sebenarnya kan waktu pencetakan itu terbatas, jadi nggak semua dapat buku pedoman, tapi kan di pergub itu udah jelas masing-masing tupoksinya. Nah kalo untuk komunikasi ke masyarakat secara tidak langsung kita melalui media informasi ya, seperti website milik dki jakarta atau melalui siaran tv, sedang secara langsungnya biasanya kita melakukan pertemuan dengan warga dan lurah setempat bahwa akan dibangun RPTRA disekitar wilayah tempat tinggal mereka”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Pendapat serupa diberikan oleh Ibu Eti Bambang sebagai ketua

Pokja 2 di PKK Jakarta Barat sebagai berikut :

“Dari awal memang sudah jelas, intinya ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, untuk memudahkan masyarakat melakukan kegiatan apapun bentuknya yang sarasannya mulai dari dalam kandungan sampai dengan lansia. Kemudian alasan yang lain adalah sulitnya masyarakat mendapatkan tempat untuk berinteraksi, khususnya anak-anak bermain. Nah berawal dari itulah maka saat itu pak gubernur dki jakarta berpikir bahwa bagaimanapun caranya di usahakan setiap keluarahan itu satu RPTRA tapi makin kesini satu kelurahan lebih dari satu. Malah waktu itu setiap RW kalo memungkinkan, meskipun tanahnya itu bukan tanah pemda, pak gubernur menjanjikan kalo masyarakat punya tanah mau menjual dan luasnya mencukupi sesuai dengan standar dibangunnya RPTRA maka Pema dki jakarta siap membeli”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 12.57 WIB dikantor PKK Jakarta Barat).

Pendapat serupa diberikan oleh Ibu Asih sebagai masyarakat sekitar RPTRA Kembangan Utara sebagai berikut:



“Biasa kalo acara-acara gitu sebelumnya suka dikasih tau sama orang RT atau RW kalo mau ada acara apa, ya kadang posyandu, konsultasi KB, atau program pangan murah gitu”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.45 WIB di RPTRA Kembangan Utara).

Dengan adanya sistem komunikasi yang seperti itu, yang dilakukan melalui media dan secara langsung maka semua pihak yang terlibat dalam implementasi program RPTRA ini langsung mengetahui apa sebenarnya yang mereka butuhkan, dan apa yang menjadi penghambat bagi pelaksana program dalam melaksanakan program tersebut, serta diharapkan dapat menjadi salah satu faktor yang mampu meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program RPTRA di kelurahan Kembangan Utara ini.

#### c. Konsistensi

Dimensi konsistensi menghendaki agar program yang ditranmisikan kepada para pelaksana, target grup, dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap program dapat diterima dengan jelas dan mampu dijalankan sesuai dengan peraturan daerah yang mengatur. Sehingga diantara pelaku program dan sasaran program sudah sama-sama mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, dan sasaran serta substansi dari program tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Rani Widya Hani sebagai Pustakawan I di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Barat sebagai berikut :

“Iya udah sesuai, karena udah jelas ya kalo dibagian perpustakaan dari segi bukunya, raknya itu udah tanggung jawab kita gitu, karena kita nggak ngadain perekrutan pengelola tapi kita tetep meminta

perwakilan yang bertugas di RPTRA itu, beberapa perwakilan kita bina bagaimana dia mengelola perpustakaan, bagaimana caranya melayani, bagaimana caranya membuat laporan, karena kita selalu meminta laporan ke mereka setiap hari tentang kunjungan hari itu, dan itu langsung statistiknya dilaporkan ke kita via online, via whatsapp group, kemudian admin kita yang akan merekapnya dan mengirim laporannya ke dinas via server bersama atau web”. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09:00 WIB di kantor Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Barat).

Pendapat lain diungkapkan oleh Bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta barat seperti berikut :

“Sambil berjalan sih ya, kan tujuannya untuk memberikan sarana dan prasarana untuk masyarakat. Sebagian ada yang sudah sesuai, ada juga yang belum. Karena kan suka ada benturan-benturan dimasyarakat, kan ada juga masyarakat yang belum tau manfaat adanya RPTRA. Kaya ada tulisan dilarang merokok, tapi masih ada yang merokok, parkir harusnya diluar lingkungan RPTRA, tapi ada juga yang parkir di bawa masuk ke dalam lingkungan RPTRA”. (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11:54 WIB di Kantor Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat).

Pendapat serupa diungkapkan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP menyatakan bahwa :

“Jadi yang jelas pasti adalah yang mungkin *miss* ya kan, tetapi itu kan proses pembelajaran ya, karna pengelola di tahap I itu kan *champion-champion* ya dimasyarakat, jadi mereka udah terbiasa bekerja dengan masyarakat, jadi ya pengelola yang direkrut di tahap selanjutnya itu kita minta untuk mereka belajar RPTRA yang sudah berjalan dan dilakukan juga mentoring oleh tim-tim khusus yang kita bentuk, tidak serta merta mereka sudah mendapat pelatihan dasar tidak dilakukan mentoring”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Dalam melaksanakan program RPTRA ini DPPAPP melakukan komunikasi yang baik tidak terlepas dengan adanya Pergub No. 196

Tahun 2015 dan Pergub No. 40 Tahun 2016 yang menjelaskan tentang pengelolaan RPTRA. Sehingga membuat para pelaksana program mengetahui apa tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan program RPTRA ini. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan dalam program RPTRA bisa sesuai atau konsisten dengan apa yang menjadi tujuan dari program RPTRA itu sendiri.

Namun seperti yang diketahui, RPTRA Kembangan Utara merupakan salah satu RPTRA percontohan karena menjadi RPTRA pelopor atau yang pertama dibuat di daerah Jakarta Barat. Karenanya dalam proses pelaksanaan program, masih ada beberapa kesalahan yang muncul, tapi selama berjalannya proses itu semua bisa diperbaiki baik melalui evaluasi atau monitoring yang dilakukan secara intens.

Berikut ini merupakan gambar hasil dokumentasi peneliti mengenai kegiatan yang berlangsung di RPTRA Kembangan Utara yakni Program Pangan Murah yang diperuntukan bagi masyarakat berkecukupan menengah ke bawah karena syarat masyarakat yang ikut berpartisipasi antara lain harus yang memiliki Kartu Jakarta Pintar (KJP), atau penghuni rumah susun bersubsidi, Petugas Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Pekerja Harian Lepas (PHL). Program pangan murah ini sendiri merupakan program yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta agar anak-anak mereka dapat diberikan makanan bergizi yang cukup dengan harga murah. Tentu hal ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya RPTRA yakni memberikan anak-anak hak mereka. Mendapat



makanan yang bergizi bagi tumbuh kembangnya juga merupakan hak yang harus mereka dapatkan.

**Gambar 4.4**

**Kegiatan program pangan murah di RPTRA Kembangan Utara**





*Sumber :Hasil dokumentasi Peneliti 2017*

## **2. Sumberdaya**

Implementasi program RPTRA yang efektif memerlukan sumberdaya-sumberdaya yang memadai. Sumberdaya ini diperlukan untuk menunjang berjalannya program. Jika tidak ada sumberdaya dalam melaksanakan program,

maka program tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Dalam hal ini, sumberdaya yang dimaksud meliputi 3 jenis sumberdaya yaitu:

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia sangat diperlukan dalam menjalankan program. Hal ini dikarenakan, program yang akan diterapkan yang membuat adalah manusia dan yang akan melaksanakan program juga manusia. Oleh karena itu, hal pokok dalam berjalannya program adalah manusia. Sumber Daya Manusia dalam pemerintahan khususnya pada dinas-dinas atau SKPD yang terkait dalam pelaksanaan program RPTRA ini. Serta pengelola-pengelola RPTRA yang dipilih secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP).

Sumber Daya Manusia merupakan implementor dari suatu program, jadi keberhasilan pelaksanaan akan tergantung kepada kinerja dari Sumber Daya Manusia. Saat ini kondisi sumber daya aparatur atau pengelola RPTRA Kembangan berjumlah enam orang, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eti Bambang sebagai ketua Pokja 2 di PKK Jakarta Barat sebagai berikut :

“Pengelola RPTRA itu kan ada enam ya, sebetulnya pengelola itu di harapkan berasal dari masyarakat disekitar RPTRA, diharapkan seperti itu karena supaya dia bisa lebih fokus mengelola RPTRA karena dia yang memiliki kan istilahnya. Kemudian juga jarak itu kadang-kadang mempengaruhi pola kerja seseorang, sehingga diutamakan masyarakat disekitar RPTRA tapi karena RPTRA kembangan utara ini kan percontohan, jadi pada waktu itu pengelola



nya direkrutnya se-DKI Jakarta”. (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 12.57 WIB dikantor PKK Jakarta Barat).

Pendapat serupa juga di berikan oleh Bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta barat sebagai berikut :

“Jadi pengelola kan, sebelum di bangun direkrut dari masyarakat sekitar. Tapi kalo untuk RPTRA kembangan utara karena yang pertama, jadi direkrutnya se-DKI Jakarta yang di cari buat ngelolanya. Yang merekrut nya itu tim dari PKK DKI dan juga DPPAPP yang menyeleksi, buat lamaran nah terpilihnya enam orang yang menjadi pengelola nya itu. Tapi untuk kebersihan itu mereka dibantu dari PPSU”. (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11:54 WIB di Kantor Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat).

Selanjutnya pendapat yang diberikan oleh Mila yakni anak yang tinggal disekitar RPTRA Kembangan Utara:

“Aku sering main ke sini ka, soalnya ibu sama kaka yang jaga disini baik. Kadang suka di ajak main atau baca buku bareng di ruang baca. Kalo aku ada PR juga suka minta bantuin sama mereka ka.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.45 WIB di RPTRA Kembangan Utara).

Selanjutnya pendapat yang diberikan oleh Ibu Asih sebagai warga sekitar RPTRA Kembangan Utara:

“iya anak saya sering main kesini kalo habis pulang sekolah. Ya saya merasa cukup aman sih, dulu kan kalo main kita juga gak tau mereka main kemana sama temennya. Tapi sekarang ada RPTRA gini, kita jadi tau kemana mereka main. Dan lagi kita juga kan kenal sama pengelola nya, jadi bisa nitip gitu kalo ada anak kita main”. (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.45 WIB di RPTRA Kembangan Utara).

Dengan adanya pengelola dan petugas kebersihan yang ada di tiap-tiap RPTRA maka diharapkan proses pelaksanaan program RPTRA dalam hal ini pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sekitar dapat

berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebijakan yang ada. Sehingga kiranya mampu menjadikan RPTRA tempat yang benar-benar baik yang diperuntukan bagi masyarakat.

#### b. Sumberdaya Anggaran

Dalam implementasi dari sebuah program, diperlukan sumberdaya anggaran untuk mendukung berjalannya program itu sendiri. Dimulai dari dana untuk sosialisasi program sampai dana yang digunakan untuk proses berjalannya program. Untuk pelaksanaan implementasi program RPTRA Kembangan Utara sebagai RPTRA percontohan atau lebih dikenal dengan RPTRA tahap I, sumberdaya anggaran bersumber dari bantuan CSR dan Provinsi. Dalam hal ini, CSR yang membantu adalah PT. Gajah Tunggal. Bantuan dana ini diberikan mulai dari proses pembangunan hingga enam bulan RPTRA berjalan. Hal ini sesuai dengan apa yang diutarakan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP dalam wawancara sebagai berikut:

“Untuk tahap I, waktu itu masih dari provinsi baik upah pengelola terus juga pihak CSR kan masih membantu dalam hal pemeliharaan , jadi tahap I dan tahap II masih dengan CSR, tahap III itu baru dengan APBD. Jadi ya memang persiapan, ya paling mungkin kalo ada kerusakan hal-hal kecil bisa ditindak lanjuti langsung oleh lurah.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Kemudian pendapat selaras diberikan oleh Bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat dalam wawancara sebagai berikut :

“Pas pembangunan itu kan CSR, setelah 6 bulan itu juga pemeliharaan masih CSR nah baru di serahkan ke Pemda. Jadi setelah diserahkan ke Pemda ya otomatis pemda yang mengelola.” (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11:54 WIB di Kantor Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat).

Kemudian yakni sumberdaya anggaran yang ada di tiap SKPD yang terkait dalam pelaksanaan program RPTRA ini, karena dalam hal ini RPTRA Kembangan Utara merupakan RPTRA Tahap I sehingga kebanyakan dari mereka tidak memiliki anggaran khusus yang diberikan untuk RPTRA. Hal ini seperti yang katakan oleh Bapak Ignatius Widodo sebagai kepala seksi komunikasi informasi publik Suku Dinas Kominfo Jakarta Barat sebagai berikut :

“Disini ga ada anggaran ke RPTRA, full oleh CSR. Jadi kita tidak anggarkan secara khusus.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.00 WIB dikantor Suku Dinas Kominfo Jakarta Barat).

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Ibu Eti Bambang sebagai ketua Pokja 2 di PKK Jakarta Barat sebagai berikut :

“Untuk saat ini, PKK sendiri tidak memiliki anggaran yah. Karena kami hanya mitra, jika ada SKPD yang melakukan 10 program pokok itu, maka mereka biasanya menggandeng kami sebagai mitranya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 12.57 WIB dikantor PKK Jakarta Barat).

Hal serupa diungkapkan oleh ibu Ibu Rani Widya Hani sebagai Pustakawan I di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Barat sebagai berikut :

“Kalo anggaran tahun ini kita udah mulai alokasi anggaran, tapi kalo yang di kembangan utara karena tahap I saat itu kita belum punya anggaran khusus, kalo dari suku dinas perpustakaan jakarta barat itu alokasi anggarannya untuk buku, kalo rak kita dapet bantuan dari dinas. Terus kita juga dapet sumbangan buku, kita minta bantuan peran serta masyarakat juga ya, dari sini kan RPTRA itu dari

masyarakat untuk masyarakat jadi selain kita menganggarkan dari APBD untuk pembelian buku RPTRA, kita juga mengadakan bulan donasi. Kita mendapat sekitar 7000 eksemplar dalam waktu satu bulan, lalu kita juga dapat sumbangan dari instansi-instansi swasta kaya *asian foundation*, kedutaan besar swiss, dan kita emang berusaha banget menjalin kerja sama dengan CSR, kebetulan CSR yang kita dapat itu adalah Bank DKI, Bank DKI itu setuju untuk membantu sarana dan prasana di 20 titik, Bank DKI itu membantu dari segi pembelian karpet, tiker, meja juga berani beliin, rak dan bukunya juga. Kalo buku dari CSR Bank DKI kita dapat sekitar 5299 eksemplar itu dia mendanai buku untuk sebanyak itu. Jadi dana nya itu berasal dari dinas ada, APBD ada, CSR ada, dan pengadaan buku nya juga kita dari sumbangan masyarakat. Dan sumbangan masyarakat itu tetap berlanjut sampai sekarang gitu, walaupun bulan donasi udah selesai dari tahun lalu tapi masyarakat kan tau kita menerima buku sumbangan, dan mereka tetep setiap bulan pasti ada buku sumbangan dari mereka, ya walau jumlahnya ga banyak mungkin 300 eksemplar tapi tetep ada.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09:00 WIB di kantor Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Barat).

Kemudian sumberdaya anggaran dari Kelurahan Kembangan Utara sendiri yang merupakan pengurus dari RPTRA Kembangan, baru memiliki anggaran khusus dimulai tahun 2017, seperti yang dikatakan oleh Ibu Euis Dewi Sartika sebagai ketua seksi kesejahteraan rakyat kelurahan Kembangan Utara sebagai berikut :

“Kalo anggaran itu dari kita ada ya, itu untuk gaji pengelola ya, terus untuk alat tulis kantor dan minum juga kita ada. Itu dimulai dari tahun 2017 ini baru ada anggaran, karena baru pengalihan karena tadinya adanya di PPAPP.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 13.35 WIB di Kantor Kelurahan Kembangan Utara).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumberdaya anggaran untuk program RPTRA di kelurahan Kembangan Utara merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan CSR (PT.Gajah Tunggal) mulai dari tahap pembangunan RPTRA hingga tahap pemeliharaan selama 6 bulan setelah

diresmikannya RPTRA Kembangan Utara. Adapun beberapa juga dari swadaya masyarakat seperti buku-buku yang ada diperpustakaan beberapa adalah hasil dari sumbangan masyarakat yang antusias dengan adanya program RPTRA ini. Sedangkan untuk gaji pengelola RPTRA, itu merupakan tanggung jawab dari kelurahan Kembangan utara sebagai pengurus dari RPTRA.

#### c. Sumberdaya Fasilitas

Fasilitas merupakan hal yang harus ada dalam implementasi program RPTRA. Mulai dari sarana dan prasarana yang berbentuk fisik hingga maupun non fisik. Fasilitas ini digunakan untuk mendukung berjalannya proses kegiatan dalam memberikan layanan kepada masyarakat khususnya kepada anak-anak.

Pelaksanaan dalam program RPTRA ini menggunakan banyak sekali fasilitas seperti ruang perpustakaan yang di dalamnya terdapat rak buku, buku-buku, meja, bangku, *i-pad*, karpet juga AC serta CCTV. Kemudian pada ruang laktasi ada tempat tidur bayi dan beragam kebutuhan ibu dan anak. Sedangkan untuk out, fasilitas yang digunakan antara lain, lapangan futsal, taman bermain untuk anak, juga beberapa lahan untuk kebun-kebun. Yang mana semua itu untuk RPTRA Kembangan merupakan hasil pemberian dari CSR yakni PT. Gajah Tunggal. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ignatius



Widodo sebagai kepala seksi komunikasi dan informasi publik di Suku Dinas Kominfo Jakarta Barat dalam wawancara sebagai berikut:

“Penyediaan *WiFi* sama cctv, tapi itu semua udah dicover semua ke dinas. Jadi kita sudin hanya dibagian ketepatan saja. Jadi kalo misalkan ada permasalahan, kita lempar ke dinas, dinas sanggup nggak menyelesaikan masalah itu tadi. Nah selama ini, kita sebatas penyediaan CCTV, tapi CCTV disediakan oleh CSR.” (wawancara dilakukan pada tanggal 15 Juni 2017 pukul 12.00 WIB di kantor Suku Dinas Kominfo Jakarta Barat).

Kemudian hal serupa dijelaskan oleh Ibu Rani Widya Hani sebagai Pustakawan I di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Barat sebagai berikut :

“Itu di RPTRA, kita nyediain buku, kita nyediain rak, kita kasih karpet, kita kasih sticker, kita cat, kita kasih gambar untuk anak-anak, ada juga meja baja, terus ada beberapa RPTRA tapi ga semua yang udah kita sediain iPad, itu gunanya untuk mengakses koleksi e-jakarta. Jadi kita juga selain punya koleksi tercetak, kita punya koleksi digital yang bisa diakses, sebenarnya koleksi digital itu bisa diakses siapa aja, lewat *handphone* dimana aja, Cuma mungkin namanya ada juga beberapa orang yang nggak punya *smartphone* namun kita sediain iPad bisa baca buku gratis di RPTRA dengan kita bantuan dari lurahnya juga untuk menyediakan *WiFi* di perpustakaan jadi nanti iPad itu bisa akses e-jakarta. Kita disana hanya mengatur barang-barangnya aja karena yang menyediakan dari pihak CSR sama beberapa dari Dinas.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09:00 WIB di kantor Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Barat).

Selanjutnya pendapat yang diberikan oleh Mila sebagai anak yang tinggal disekitar RPTRA Kembangan Utara sebagai berikut :

“Ya kadang kalo pulang sekolah gak ada PR, aku main kesini. Enak bisa baca buku-buku sambil ngadem pake AC. Atau aku biasa main perosotan gitu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.45 WIB di RPTRA Kembangan Utara).

Kemudian pendapat dari Ibu Asih sebagai warga sekitar RPTRA Kembangan Utara:

“Ya kan disini ada CCTV ya, jadi kalo anak izin main ke RPTRA. Saya ngerasa tenang aja. Ya tapi kalo saya juga lagi gak ada kerjaan, kadang pergi nya sama saya. Tapi bagus nya anak jadi bisa mandiri tapi tetep aman bermainnya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Desember 2018 pukul 15.45 WIB di RPTRA Kembangan Utara).

Kemudian pendapat yang sama menjelaskan bagaimana fasilitas-fasilitas yang tersedia merupakan keinginan dari masyarakat sekitarnya seperti yang diungkapkan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP sebagai berikut :

“Dari awal ya kita memang sudah ada *prototype* jadi ya memang kan *prototype* ini kan standar yah jadi memungkinkan untuk terutama yang CSR untuk dikembangkan seperti ada permintaan dari masyarakat futsal, yaudah dibuatkan lapangan futsal jadi memang di *prototype* kita harus ada sarana olahraga yang dibutuhkan oleh masyarakat, juga sarana-sarana yang lain gitu. Jadi ya memang sudah sesuai dengan *prototype* kita bukan berdiri sendiri, karena memang ada kebutuhan sendiri masyarakat misalkan inginnya futsal, yang satu inginnya basket, nah itu kan dilapangan itu bisa jadi multi guna dalam satu lapangan, bisa futsal, bisa badminton, bisa basket.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Hal ini dibenarkan oleh Bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta barat dalam wawancara sebagai berikut :

“Untuk sarana dan prasarana itu dari CSR, kaya permainan, meja, kursi, AC untuk yang tahap I. Tahap selanjutnya baru pemerintah ikut andil.” (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11:54 WIB di Kantor Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat).

Pendapat serupa dikatakan oleh Ibu Euis Dewi Sartika sebagai ketua seksi kesejahteraan rakyat kelurahan Kembangan Utara dalam wawancara sebagai berikut :

“Semuanya dari CSR, CSR nya itu Gajah Tunggal.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 13.35 WIB di Kantor Kelurahan Kembangan Utara).

Fasilitas yang digunakan sangat beragam dan kesemua fasilitasnya disediakan langsung oleh CSR yang terlibat yakni PT. Gajah Tunggal. Kemudian selama 6 bulan, pemeliharaan fasilitas ditanggung oleh CSR, lalu setelahnya diserahkan kepada pengurus RPTRA tersebut. Tentu hal ini sangat berguna bagi proses pelaksanaan program RPTRA Kembangan Utara hingga saat ini.

Berikut ini merupakan gambar hasil dokumentasi peneliti mengenai ruangan, sarana dan prasarana yang terdapat pada RPTRA Kembangan Utara. Masing-masing SKPD terkait berperan dalam mengisi kegiatan di RPTRA, juga mengelola ruang-ruang yang terdapat di RPTRA tersebut. Seperti halnya Ruang Perpustakaan yang dikelola oleh Kantor Perpustakaan Daerah Jakarta Barat, Ruang Laktasi yang difungsikan sebagai ruang menyusui sekaligus ruang konsultasi KB dibawah pengelolaan Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat, kemudian ada ruang PKK-Mart yang merupakan tempat berbagai jenis hasil olah tangan dari masyarakat sekitar yang didagangkan dibawah pengelolaan PKK Jakarta Barat dan yang terakhir CCTV yang dibawah pengawasan Suku Dinas Kominfo Jakarta Barat. Kemudian untuk lokasi *outdoor* di RPTRA khususnya taman dan tanaman-tanaman TOGA, horticultura dan kolam gizi dikelola oleh kerjasama antar Suku Dinas Pertamanan dan Pemakanan dengan Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan

Pangan Jakarta Barat. Berikut hasil dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti di RPTRA Kembangan Utara.

**Gambar 4.5**

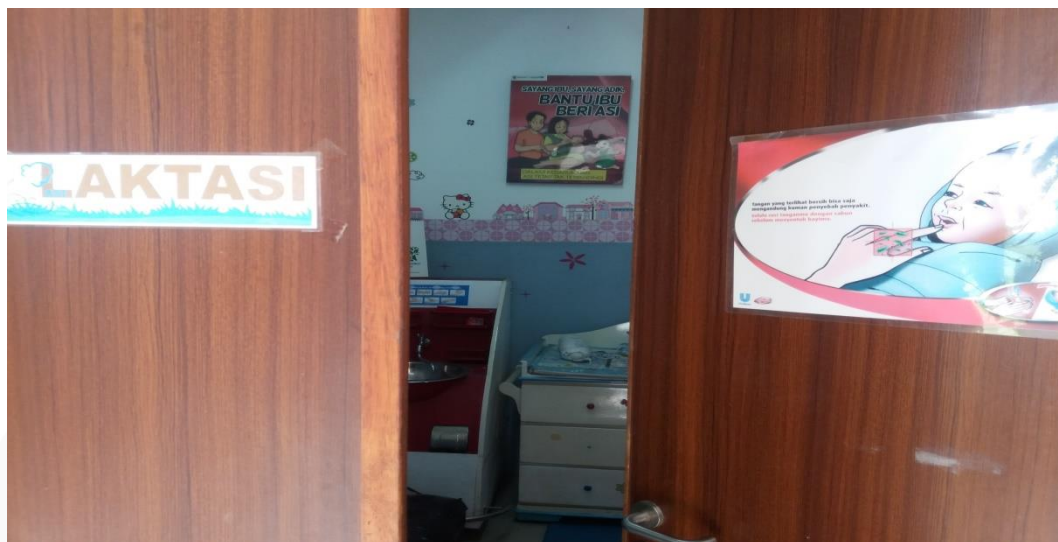
**Ruang Perpustakaan RPTRA Kembangan Utara yang dikelola oleh Suku Dinas Perpustakaan daerah Jakarta Barat**





**Gambar 4.6**

**Ruang Laktasi dan Ruang Konsultasi KB di RPTRA Kembangan Utara yang dikelola oleh Sudin Kesehatan dan Kantor KB Jakarta Barat**



**Gambar 4.7**

**Ruang Sekretariat Pengelola RPTRA Kembangan Utara**



**Gambar 4.8**

**Ruang PKK-Mart yang dikelola oleh PKK Jakarta Barat**





**Gambar 4.9**

**CCTV yang dikelola oleh Suku Dinas Kominfo Jakarta Barat**



**Gambar 4.10**

**Lokasi *Outdoor* di RPTRA Kembangan Utara**





*Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017*

### 3. Disposisi

Keberhasilan dari sebuah implementasi program tidak hanya sejauh mana pengetahuan para pelaku program itu sendiri tetapi juga tergantung pada kemauan dari para pelaku program. Di dalam implementasi program RPTRA Kembangan Utara, kemauan dari para pengelola dalam melayani masyarakat yang datang ke RPTRA juga berpengaruh pada berjalan atau tidak implementasi tersebut.

Pelaksanaan implementasi program RPTRA di Kembangan Utara tidak terlepas dari pengelola RPTRA sebagai pelaksana program. Di mana pengangkatan dan penempatan dari pengelola RPTRA menjadi hal yang penting,



karena pelaksana program yang tidak bisa melakukan tugasnya dengan baik akan menjadi beban dalam pelaksanaan program tersebut. Dalam penempatan pengelola RPTRA yang diharapkan berasal dari masyarakat disekitar RPTRA karena dapat lebih fokus mengelola RPTRA karena lebih mempunyai rasa memiliki. Tetapi untuk RPTRA Tahap I seperti RPTRA Kembangan Utara, para pengelola direkrut se-DKI Jakarta yang mana tim yang merekrutnya adalah PKK DKI dan juga DPPAPP itu sendiri. Seleski dilakukan beberapa tahap, mulai dari wawancara hingga *Focus Group Discussion* (FGD) atau disebut juga diskusi kelompok yang terarah. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP dalam wawancara sebagai berikut :

“Kita merekrut pengelola itu dengan proses perekrutan khusus ya, jadi nggak sama dengan PPSU atau PAL karena ya walaupun mereka digaji sesuai dengan UMP tetapi tugas mereka itu lebih jelas jadi perlu *knowledge* karena jelas ya biar bagaimanapun mereka kan mendidik anak-anak, yah beda dengan PPSU kan hanya bersih-bersih dan tidak perlu ada *knowledge* lah, terus ada skill tentunya jadi memang perlu perekrutan khusus jadi makanya ketika perekrutan itu, bahwa seleksi administrasi iya, tetapi untuk proses selanjutnya melalui *Focus Group Discussion* (FGD) atau disebut juga diskusi kelompok yang terarah, dari situ kita liat ya, kita kasih topik, di undi topik nya, karna bagaimanapun dia kan mendidik masyarakat, melatih masyarakat kalo dia kemampuannya nggak bisa bicara, gimana dia mau mengajarkan dan mendidik masyarakat kalo dia nggak bisa bicara. Jadi kemampuan verbal, terus kemampuan dia non-verbal nya juga di liat pada saat FGD itu. Setelah itu juga wawancara, jadi di wawancara itu juga kita melihat bagaimana si calon pengelola ini dari sisi kepribadiannya, karena kan terus terang kan kita merekrut itu orang-orang yang perduli jadi bukan orang sembarang karna dia harus berhadapan dengan permasalahan anak, permasalahan masyarakat, kondisi sosial masyarakat nah itu kan berarti dia harus menjadi orang yang punya kemampuan, skill, dan *attitude*.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Sedangkan ketika perekrutan pengelola untuk RPTRA bukan tahap I dilakukan sesuai dengan referensi dari RT atau RW terdekat dari RPTRA. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Eti Bambang sebagai ketua Pokja 2 di PKK Jakarta Barat sebagai berikut :

“Pengelola RPTRA itu kan ada enam ya, sebetulnya pengelola itu di harapkan berasal dari masyarakat disekitar RPTRA, diharapkan seperti itu karena supaya dia bisa lebih fokus mengelola RPTRA karena dia yang memiliki kan istilahnya. Kemudian juga jarak itu kadang-kadang mempengaruhi pola kerja seseorang, sehingga diutamakan masyarakat disekitar RPTRA. Sistem rekrutmennya berawal dari keluarahan, lurah sebagai pemilik wilayah yang paling tahu bagaimana masyarakatnya, meskipun itu ada referensi dari pak RT atau pak RW, dari situlah lurah mulai melihat orangnya dan menyeleksi secara administrasi itu mulai dari tingkat kelurahan. Kemudian untuk seleksi yang lain, misalnya wawancara maupun yang sifatnya tes tertulis itu ada ditingkat provinsi dan kami pkk itu menjadi salah satu tim yang membantu menyeleksi.” (wawancara dilakukan pada tanggal 19 Juni 2017 pukul 12.57 WIB dikantor PKK Jakarta Barat).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa pengangkatan pengelola dalam pelaksanaan program PRTRA di Kembangan Utara dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan kemampuan personal tersebut. Para pengelola diangkat berdasarkan kemampuannya baik verbal maupun non-verbal, kemudian dinilai dari sisi kepribadiannya karena pengelola diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang akan dihadapi terutama permasalahan anak, masyarakat, kondisi sosial untuk itu pengelola dituntut untuk mempunyai kemampuan skill juga *attitude*.

#### **4. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi mencakup aspek-aspek pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit yang terlibat, dan hubungan organisasi dengan organisasi

lainnya. Hal ini mencakup SOP (Standar Operasional Prosedur) untuk memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana program dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

Struktur organisasi mempengaruhi keberhasilan dalam pelaksanaan program RPTRA. Karena dalam pelaksanaan program perlu adanya suatu kerja sama antar bagian-bagian yang ada dalam DPPAPP, serta SKPD-SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan program RPTRA. Saat ini pelaksanaan dari program RPTRA berjalan dengan baik berkat adanya kerja sama antara unit-unit yang ada di DPPAPP dan juga adanya kerja sama yang baik antara SKPD-SKPD yang terlibat dalam proses kegiatan yang berlangsung di RPTRA, serta kerjasama yang dilakukan pengurus serta pengelola RPTRA Kembangan Utara itu sendiri. Hal itu sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP sebagai berikut:

“Kalo di pergub pengelola itu kan sudah ada peran masing-masing skpd, jadi sudah jelas dalam pergub tersebut perannya. Konkritnya itu perpustakaan dengan dinas perpustakaan dan arsip beserta jajarannya, terus untuk sarana olahraga berarti dengan dinas olahraga, dan seterusnya. Jadi RPTRA ini kan wadah seluruh SKPD, jadi program-program SKPD bisa konkrit di RPTRA gitu, jadi marketnya jelas, sarananya jelas, jadi maksudnya marketnya itu kan masyarakatnya udah jelas.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Dalam menjalankan program RPTRA tugas dan peran masing-masing SKPD dibagi secara rinci sehingga tidak ada tumpang tindih tugas pokok dan fungsi dari masing-masing SKPD yang terlibat. Dengan adanya pembagian tugas yang jelas, tentu akan memudahkan proses pelaksanaan program RPTRA ini, karena tiap-tiap SKPD bekerja sesuai dengan kemampuan yang dimiliki sehingga

hasilnya pun akan lebih efektif. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta barat sebagai berikut :

“Masing-masing sesuai tupoksinya, misalnya perpustakaan tugasnya itu mengawasi buku-buku yang ada, kalo kesehatan kan laktasi, kalo kelautan itu kan kolam, kalo pertamanan kan pohon-pohonnya, kalo PKK itu ada PKK-Mart. Jadi ga ada tumpang tindih peran disini, namun ada beberapa kegiatan yang memang melibatkan lebih dari satu SKPD. Dipergub juga sudah dijelaskan tentang tugas dari masing-masing SKPD, jadi sudah jelas gimana pembagian wewenang dan tugas masing-masingnya” (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11:54 WIB di Kantor Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan program RPTRA ini, struktur organisasi dan pembagian wewenang dalam pelaksanaan program sudah jelas dalam Pergub No. 196 Tahun 2015 dan Pergub No. 40 Tahun 2016 tentang pengelolaan RPTRA. Sehingga masing-masing bidang dikelola oleh SKPD yang memang memiliki kompetensi dibidang tersebut. Contoh jika RPTRA mengadakan kegiatan imunisasi atau posyandu, maka yang bergerak adalah Suku Dinas Kesehatan Masyarakat bekerja sama dengan unit Puskesmas terdekat dari RPTRA. Begitu juga kegiatan-kegiatan lain yang menggandeng SKPD-SKPD terkait dalam proses pelaksanaannya. Tentu hal ini membuat pelaksanaan program RPTRA menjadi lebih efektif karena kegiatan yang dilakukan dikelola oleh ahlinya.

## **2. Faktor Penghambat dan Pendukung yang mempengaruhi Implementasi Program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat**

### **a. Faktor penghambat**

1. Tidak adanya anggaran khusus dinas-dinas terkait

Dalam proses pembangunan RPTRA Kembangan Utara, memang seluruh dana pembangunan ditanggung oleh CSR yakni PT. Gajah Tunggal dan Pemprov. Serta dalam pemeliharaan selama 6 bulan, CSR masih bertanggung jawab atas RPTRA. Namun terkadang banyak ditemui beberapa kendala seperti kerusakan fasilitas seperti keran air yang rusak, atau *Wi-Fi* yang tidak dapat dipakai. Tentu kendala-kendala perlu secara cepat ditangani. Namun karena tidak adanya anggaran khusus yang dimiliki oleh SKPD terkait. Maka perbaikan mengalami penundaan dari segi waktu. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP sebagai berikut :

“Kalo penghambatnya mungkin, misalnya ada kerusakan gitu ya sementara anggaran mungkin belum dianggarkan ya, kadang-kadang apa yang bisa dilakukan dulu yang dikerjakan. Mungkin itu yang menjadi faktor penghambat ya karena kita kan sudah sistem *e-budgeting* , jadi kadang-kadang belum teranggarkan nah itu yang menjadi hambatan, tapi untuk hal-hal lain itu kadang CSR ada yang mau membantu tanpa melalui kita ya. Pembangunan RPTRA juga uangnya nggak ada yang melalui kita ya, jadi mereka yang membangun terus ada masalah pemeliharaan yang sampai tiga atau enam bulan tergantung CSRnya ngasihnya berapa.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Saat ini anggaran RPTRA hanya berfokus pada pemeliharaan. Sedangkan dinas-dinas terkait yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan program RPTRA tidak memiliki anggaran khusus. Sehingga dalam pelaksanaan program RPTRA segala kegiatan yang akan dilaksanakan harus menunggu dana dari DPPAPP atau pengurus RPTRA yakni Kelurahan Kembangan Utara.

## 2. Kurangnya jumlah pengelola RPTRA

Saat ini ditiap RPTRA memiliki pengelola yang berjumlah enam orang. Tiap pengelola memiliki tugas dan perannya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, pengelola dibagi menjadi dua waktu. Waktu pertama dimulai dari pukul 07.00 WIB sampai 12.00 WIB kemudian dilanjutkan kembali pukul 13.00 WIB sampai 17.30 WIB. Dalam shift pagi ada 3 pengelola, kemudian shift sore ada 3 pengelola. Namun ketika RPTRA melaksanakan kegiatan atau acara yang besar seperti pada kegiatan Program Pangan Murah yang akan mengundang banyak sekali masyarakat dan dilakukan sejak RPTRA di buka hingga acara selesai. Jumlah enam orang pengelola dinilai kurang untuk menjadi panitia dalam kegiatan seperti itu. Karena mereka akan dipaksa untuk menjadi panitia dari pagi hingga malam hari hingga segala hal benar-benar telah selesai. Karenanya terkadang ketika RPTRA mengadakan kegiatan yang cukup besar, mereka akan meminta bantuan dari RPTRA lain untuk memberikan bantuan yakni personil pengelola dari RPTRA lain untuk ikut membantu dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta barat dalam wawancara sebagai berikut:

“Nah kalo penghambat, misalkan ada kegiatan banyak nih, kadang-kadang pengelolanya kan ada enam, terus kan di gilir tiga orang – tiga orang, nanti ada satu sakit akhirnya kan berkurang. Nah itu penghambatnya karena pengelola nya itu sedikit sedang kegiatannya itu banyak, seperti kegiatan-kegiatan besar yang seperti pangan murah itu butuh bantuan dari pengelola RPTRA lain.” (wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juni 2017 pukul 11:54 WIB di Kantor Suku Dinas PPAPP Jakarta Barat).



Tentu hal ini akan membuat proses pelayanan yang dilakukan pengelola ketika kegiatan berlangsung menjadi tidak efisien dan efektif. Karena kurangnya pengelola yang ada membuat acara akan menjadi sulit untuk dikondisikan karena jumlah masyarakat yang ikut dalam kegiatan tersebut terlalu banyak. Seperti pada kegiatan Program Pangan Murah yang peneliti dokumentasikan, terlihat bagaimana masyarakat yang hadir menunggu pembagian pangan murah hingga begitu panjang dikarenakan proses pembelian pangan murah harus dilakukan oleh sedikit pengelola yang ada.

### 3. Masyarakat yang merusak fasilitas RPTRA

Sebelum dibangunnya RPTRA Kembangan Utara, lahan tersebut adalah sebuah lapangan yang sering digunakan oleh beberapa pemuda dan anak-anak untuk bermain bola atau juga sering digunakan masyarakat sebagai akses jalan mereka untuk keluar dari perkampungan. Kemudian setelah dibangunnya RPTRA di lahan tersebut, tentu untuk keamanan baik fasilitas yang ada maupun keamanan pengunjung terumata anak-anak maka disetiap RPTRA yang ada akan dibangun tembok pembatas atau pagar yang mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Namun ketika awal pembangunan RPTRA Kembangan Utara, masyarakat sekitar RPTRA yang biasa menggunakan lahan tersebut sebagai akses tercepat untuk keluar dari perkampungannya merasa terganggu dengan adanya tembok yang mengelilingi RPTRA yang menghalangi akses mereka untuk keluar. Sehingga hal yang mengejutkan terjadi, yakni pembobolan tembok RPTRA yang dilakukan oleh masyarakat. Tentu hal ini merupakan bukti bahwa masyarakat sekitar tidak mendukung adanya RPTRA atau tidak menyadari fungsi dari adanya RPTRA.

Berikut berita yang peneliti dapatkan dari tulisan Dian Ardiahanni dalam media online yakni kompas.com yang menyebutkan dalam beritanya “Tembok Jebol di Tengah Hijaunya RPTRA Kembangan”.

**Gambar 4.11**



Sumber : Dian Ardiahanni Kompas.com 2016

Pihak pengurus RPTRA dalam hal ini Kelurahan Kembangan Utara melakukan perbaikan pada tembok yang dijebol oleh warganya. Namun dalam prosesnya, ketika masyarakat sekitar RPTRA Kembangan Utara mulai menyadari akan pentingnya RPTRA diwilayah mereka. Akhirnya mereka mulai mendukung dengan adanya RPTRA Kembangan Utara, yakni dengan banyaknya tingkat partisipasi mereka dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan baik itu posyandu, program pangan murah, atau sekedar datang mengunjungi RPTRA hanya untuk menemani anak-anak mereka bermain atau membaca buku diperpustakaan RTPRA. Hal ini terbukti dengan tidak kembali dijebolnya tembok RPTRA yang telah diperbaiki oleh pengurus ketika peneliti melakukan penelitian dan



dokumentasi di RPTRA Kembangan. Berikut dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti di bekas tembok RPTRA yang di jebol oleh masyarakat ketika awal dibangunnya RPTRA.

**Gambar 4.12**



*Sumber : Dokumentasi Peneliti 2017*

Bila kerusakan terhadap fasilitas yang ada di RPTRA kerap terjadi, maka anggaran yang seharusnya dapat digunakan untuk kelangsungan pelaksanaan kegiatan di RPTRA jadi harus dialihkan menjadi anggaran untuk pemeliharaan fasilitas. Tentu ini akan sangat menghambat pelaksanaan program RPTRA, karena bagaimanapun RPTRA merupakan fasilitas yang diperuntukkan bagi masyarakat. Jadi sudah seharusnya mereka menjaga fasilitas tersebut.

#### **b. Faktor pendukung**

##### **1. Adanya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan RPTRA**

Dalam proses pelaksanaan program RPTRA adanya acuan atau pedoman yang jelas dan kuat secara hukum membuat proses pelaksanaan RPTRA dapat

berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016 tentang pengelolaan RPTRA. Di dalamnya tertuang tentang tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap SKPD terkait dalam proses pengelolaan RPTRA. Hal ini yang membuat segala kegiatan yang dilakukan RPTRA tidak tumpang tindih antar SKPD dan benar-benar dilakukan oleh SKPD yang memiliki kompetensi dibidangnya.

## 2. Adanya bantuan dana baik dari pihak Swasta maupun masyarakat

Dalam proses pembangunan RPTRA Kembangan Utara, dana yang dianggarkan oleh PT. Gajah Tunggal sebagai CSR sangat berguna dan bermanfaat bagi RPTRA Kembangan Utara. Baik dari segi pembangunan hingga segi pemeliharaan fasilitas yang ada. Dengan adanya bantuan dari CSR ini dapat mempermudah pembangunan dan pelaksanaan program RPTRA.

Bantuan lain diberikan oleh masyarakat, bantuan dari masyarakat ini berupa partisipasi dalam pemberian bantuan buku untuk mengisi perpustakaan yang ada di RPTRA. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP sebagai berikut :

“Faktor pendukung banyak ya, masyarakat mendukung, CSR juga mendukung, dari 186 RPTRA itu kan 62 diantaranya itu dari CSR, jadi untuk program-program pasca pembangunan beberapa CSR yang bukan pembangun ya ikut membantu.” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 09.00 WIB di Kantor DPPAPP DKI Jakarta).

Hal serupa juga di ungkapkan oleh Ibu Rani Widya Hani sebagai Pustakawan I di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Barat sebagai berikut :

“Pendukungnya adanya bantuan dari masyarakat, mereka perduli banget untuk menyumbangkan koleksinya, terus ada bantuan dari CSR juga kita dikasih rak, dikasih meja, di kasih buku itu ngebantu banget. Dari pengelola nya itu semangat-semangat memberikan laporan, mereka semangat itu juga kan mendukung kita, dia bikin kegiatan sesuai kreatifitas dia, inisiatif dia, dan itu lebih banyak mengundang pengunjung ke RPTRA, terus dengan adanya AC diruang perpustakaan RPTRA jadi ruangnya dingin, mungkin tadi orang tujuannya ngadem tapi terus jadi baca, terus ada iPad, ada WiFi jadi lebih nyaman suasana ruangnya.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Juni 2017 pukul 09:00 WIB di kantor Suku Dinas Perpustakaan Jakarta Barat).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya bantuan berupa dana ataupun buku dari pihak CSR dan masyarakat sangat berguna bagi pelaksanaan RPTRA. Karena mereka ikut andil dalam proses penyediaan fasilitas yang ada di RPTRA. Tentu ini juga berdampak baik bagi masyarakat itu sendiri.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat**

Menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Widodo (2010:87) menjelaskan makna implementasi ialah memahami apa yang sebenarnya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan yang mencakup baik usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian. Implementasi program pada prinsipnya yakni agar sebuah kebijakan yang melatar belakangi program tersebut dapat mencapai tujuannya, tidak kurang dan tidak lebih.

Karena itulah implementasi program merupakan poin penting dalam suatu kebijakan, karena implementasi program adalah pelaksanaan kebijakan. Kebijakan

yang bagus belum tentu pelaksanaannya juga dinilai bagus, karena hal tersebutlah yang membuat suatu kebijakan dapat dikatakan tidak berhasil. Dalam menganalisis penelitian ini, dalam implementasi program, peneliti memakai model implementasi dari Edward III. Dimana peneliti menganalisis implementasi program RPTRA melalui empat variabel yaitu, komunikasi, sumber daya, komunikasi, dan juga struktur organisasi.

**a. Pelaksanaan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA)  
di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat**

**1. Komunikasi Yang Digunakan dalam Menjalankan Program RPTRA**

Komunikasi merupakan hal yang penting dalam mentransmisikan sebuah program dari pelaksana program kepada sasaran program. Melalui komunikasi maka tujuan dari program bisa dijelaskan kepada sasaran program, sehingga apa yang diharapkan dari program tersebut bisa terlaksana dengan baik. Menurut Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008:150) mengatakan bahwa ada tiga indikator yang dipakai sebagai ukuran dari keberhasilan variabel komunikasi, yaitu:

1. *Transmisi*, penyaluran komunikasi yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula. Seringkali hal yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah salah pengertian. Hal ini dikarenakan komunikasi melalui tingkatan birokrasi.
2. *Kejelasan*, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana program harus jelas dan tidak membingungkan.

3. *Konsistensi*, perintah yang diberikan harus konsisten dan juga jelas sesuai dengan visi dan misi program.

Dari ketiga variabel komunikasi tersebut, sudah mampu dilaksanakan dengan baik oleh Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Saat ini komunikasi yang terjalin antar pelaku program yaitu DPPAPP DKI Jakarta dengan sasaran program yaitu masyarakat sekitar RPTRA Kembangan yakni masyarakat Kelurahan Kembangan Utara maupun dengan dinas-dinas lain yang terkait dalam program RPTRA ini sudah berjalan dengan baik. Penyaluran komunikasi melalui beberapa cara yaitu melalui Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan RPTRA, kemudian melalui evaluasi bersama yang dilakukan secara rutin oleh DPPAPP baik ditingkat provinsi maupun kota, untuk komunikasi kepada masyarakat dilakukan sosialisasi, baik melalui spanduk atau secara lisan melalui rapat RW setempat.

Dari sisi kejelasan pihak DPPAPP DKI Jakarta sudah melakukan komunikasi dengan baik, ini berkat adanya Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016 yang mana menjelaskan tentang apa yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing dinas yang terlibat dalam pelaksanaan program RPTRA ini. Kemudian untuk kejelasan komunikasi yang diberikan kepada masyarakat sudah sangat baik, karena sebelum RPTRA ini dibangun. Dilakukan diskusi yang dilakukan oleh DPPAPP kepada masyarakat tentang apa fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga sudah jelas bahwa di daerah sekitar mereka akan dibangun sebuah RPTRA.



Dari sisi konsistensi, RPTRA Kembangan Utara sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari dibangunnya RPTRA. Yakni untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Ini dapat dilihat dengan banyaknya diselenggarakan kegiatan yang berfokus pada anak-anak, seperti imunisasi, program pangan murah untuk menjamin bahwa setiap anak berhak mendapatkan gizi yang baik, kemudian pentas seni untuk kreativitas mereka. Sehingga konsistensi pelaksanaan komunikasi program RPTRA terhadap masyarakat sudah berjalan dengan baik.

## **2. Sumberdaya Yang Digunakan dalam Menjalankan Program RPTRA**

Salah satu komponen utama dalam melaksanakan suatu program adalah sumberdaya. Sumberdaya dalam program adalah sumberdaya-sumberdaya yang berpengaruh dalam implementasi suatu program seperti: sumber daya manusia meliputi para pelaksana program yang terlibat, sumberdaya anggaran yang digunakan, dan sumberdaya peralatan-peralatan atau fasilitas yang dipakai. Hal ini sesuai dengan pernyataan Edward III yang dikutip oleh Widodo (2010) yang mengatakan bahwa sumberdaya meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, sumberdaya fasilitas.

Sumberdaya yang digunakan dalam proses implementasi program RPTRA meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya fasilitas. Sumberdaya ini telah digunakan secara bertanggungjawab oleh para pelaksana diketahui dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti dilapangan.

### **a. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia adalah pelaku dari pelaksana program itu sendiri dimana dalam pelaksanaan program RPTRA pelaksana program adalah pengelola RPTRA Kembangan Utara. Sumber daya manusia adalah hal penting dalam melakukan program, karena sumber daya manusia adalah aktor dari program itu sendiri. Menurut Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008:151) ada 4 element yang menjadi indikator dari sumber daya manusia dalam melakukan implementasi program yaitu staff, informasi, wewenang, dan juga fasilitas

Saat ini staf sebagai pengelola RPTRA secara kualitas dirasa mampu untuk melaksanakan program yang ada karena sudah melalui berbagai tes yang ada, namun jika secara kuantitas dirasa masih kurang, karena untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam skala besar, pengelola RPTRA yang ada dinilai masih kurang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Namun dalam menjalankan program RPTRA, para pengelola sudah menjalankan dengan baik, karena mereka memang dituntut untuk peka terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Walaupun ketika sedang melaksanakan kegiatan dengan skala besar peserta, mereka mampu menyelesaikannya dengan baik.

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2009:98-99) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian), karena efektifitas pelaksanaan program sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan program. Sumber daya manusia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga mereka SDM harus mempunyai informasi yang cukup dalam, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara melakukan kegiatan atau program, tetapi juga



mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat peraturan dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti di RPTRA Kembangan Utara di Jakarta Barat, peneliti bisa melakukan analisis mengenai sumber daya manusia yang menjadi pelaksana program RPTRA di Kembangan Utara. SDM yang ada secara kualitas sangat memadai, karena melalui seleksi ketat dengan tes-tes serta syarat yang memang diberikan untuk menguji tingkat kesiapan SDM untuk menjadi pengelola RPTRA. Hanya saja jika dilihat dari segi kuantitas atau jumlah, dimana dalam setiap RPTRA hanya memiliki enam pengelola RPTRA. Yang dibagi menjadi dua waktu kerja, yakni pagi dan sore, tentu jumlah ini sangatlah sedikit ketika mereka harus melaksanakan kegiatan dengan skala peserta yang besar. Mereka akan kesulitan dalam menjaga ketertiban serta kecepatan dalam melaksanakan kegiatan. Walau dapat diselesaikan dengan baik, tapi tentu akan menguras tenaga dan stamina yang banyak untuk keenam pengelola RPTRA yang ada.

#### b. Sumber Daya Anggaran

Sumber daya anggaran adalah sumber dana yang digunakan dalam pelaksanaan program RPTRA. Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan program RPTRA Kembangan Utara adalah berasal dari bantuan CSR dan Provinsi. Dana CSR yang masuk berasal dari PT. Gajah Tunggal, yang mana sangat membantu dalam pembangunan hingga pemeliharaan RPTRA Kembangan Utara. Selama enam bulan setelah RPTRA beroperasi seluruh biaya pemeliharaan akan ditanggung oleh PT. Gajah Tunggal sebagai CSR. Yang mana dana itu

langsung masuk ke RPTRA tanpa melalui DPPAPP. Ketika ada kendala atau kerusakan yang dapat ditangani oleh Kelurahan selaku pengurus, maka akan langsung ditangani tanpa menunggu dana dari CSR.

c. Sumber daya fasilitas

Sumber daya fasilitas yang digunakan dalam pelaksanaan program RPTRA adalah fasilitas perpustakaan yakni buku, *i-pad*, rak buku, meja, kurs, serta *Wi-Fi*. Selanjutnya ada fasilitas untuk ruang laktasi ibu, yakni tempat tidur untuk bayi, tempat untuk mencuci tangan dan sofa. Fasilitas di ruang sekretariat pengelola RPTRA terdapat fasilitas komputer, meja, serta kursi dan sofa. Fasilitas yang ada di ruang PKK-Mart adalah kulkas dan meja. Sedangkan fasilitas *outdoor* yakni tempat bermain untuk anak seperti perosotan, jungkat-jungkit, ayunan dan fasilitas bermain anak lainnya, kemudian ada lapangan futsal yang juga bisa digunakan untuk bermain bulutangkis dan taman dengan berbagai macam tumbuhan.

Fasilitas yang tersedia diperuntukan bagi masyarakat yang akan berkunjung ke RPTRA khususnya anak-anak. Dalam pelaksanaannya fasilitas ini digunakan untuk memenuhi hak-hak anak yakni mendapatkan tempat bermain yang aman, serta mendapat pendidikan (perpustakaan) yang didapat diluar sekolah. Hal ini sesuai dengan indikator dari Kota Layak Anak (KLA) yakni Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya.

### 3. Disposisi Yang Digunakan dalam Menjalankan Program RPTRA

Menurut Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008:152) menyebutkan bahwa sikap atau disposisi dari pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi program jika personil yang ada tidak bisa melakukan program yang ada. Untuk itu perlu adanya kecermatan dalam disposisi atau kewenangan dalam hal pengangkatan pegawai untuk dijadikan implementor suatu program hal itu dimaksudkan agar program bisa berjalan dengan efektif. Pegawai yang diangkat dan diberikan wewenang dalam pelaksanaan implementasi program haruslah mempunyai kemampuan dan juga mengetahui apa yang harus dilakukan.

Pengangkatan atau penetapan pegawai yang menjalankan program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara sudah berjalan dengan baik, pengangkatan dan penetapan sudah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki serta mampu memenuhi persyaratan yang ada seperti cakap dalam berkomunikasi karena pengelola RPTRA harus dapat mendidik dan melatih masyarakat, kemudian memiliki kepribadian atau *attitude* yang baik, mempunyai skill dan kemampuan untuk memberikan laporan terkait RPTRA, yang terakhir harus peka terhadap permasalahan masyarakat, permasalahan anak, dan kondisi sosial masyarakat yang ada. Hingga saat ini pengelola RPTRA Kelurahan Kembangan Utara yang ada sudah melakukan tugasnya dengan baik.

Pengangkatan dan penerimaan pegawai yang menjadi pengelola program RPTRA selain harus memenuhi persyaratan yang disampaikan diatas, pengelola

juga diharapkan yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi RPTRA. Diharapkan seperti itu agar para pengelola bisa lebih fokus mengelola RPTRA karena mempunyai rasa lebih memiliki. Selain itu jarak tempuh yang harus dilalui pengelola juga dapat mempengaruhi pola kerja seseorang, sehingga diutamakan masyarakat disekitar RPTRA.

Berdasarkan analisis diatas, pengangkatan pengelola dan juga penempatan pengelola berdasarkan jarak tempuh dengan lokasi RPTRA. Peneliti berpendapat bahwa penempatan pengelola berdasarkan jarak tempuh antara tempat tinggal dengan lokasi RPTRA sangatlah bagus, mengingat ketepatan waktu dan rasa lebih memiliki itu diperlukan untuk menjalankan sebuah program agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, pengelola RPTRA yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi RPTRA akan lebih tau apa yang sedang menjadi masalah dilingkungannya. Mereka pun dapat mengetahui solusi terbaik dan tercepat yang dapat diberikan kepada masyarakat terkait masalah yang ada disekitar lokasi RPTRA.

#### **4. Struktur Organisasi dalam Pelaksanaan Program RPTRA**

Untuk melaksanakan suatu program dengan baik maka perlu adanya kinerja pelaksana program kearah yang lebih baik, seperti yang diungkapkan oleh Edward III yang dikutip oleh Agustino (2006:152) dimana harus dilakukan suatu *Standar Operating Prosedures* (SOPs) dan melakukan *fragmentasi*. Di mana (SOPs) adalah suatu tindakan yang dilakukan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai/pelaku program setiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Dan juga *Fragmentasi* yaitu

upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan atau aktifitas pegawai diantara beberapa unit pegawai. Program RPTRA merupakan program berskala besar yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta, karena dalam pelaksanaannya program RPTRA mempunyai peran dan tugas yang tidak hanya menjadi tanggung jawab satu Dinas. Dalam program RPTRA terdapat beberapa Dinas atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang ada di program RPTRA, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perpustakaan Daerah, PKK, Dinas Kominfo, dan lain-lain. Selama ini para pelaksana program yang terlibat dalam RPTRA sudah melakukan tindakan SOPs dengan baik sesuai dengan yang terdapat dalam buku pedoman pelaksanaan RPTRA karena setiap SKPD yang terlibat mengetahui tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam pembagian tugas juga sudah dilakukan dengan baik berdasarkan pada SKPD-SKPD yang terlibat atau bertanggung jawab dalam kegiatan tertentu namun untuk beberapa tugas seperti membuat laporan terkait jumlah penggunaan ruang perpustakaan yang mana merupakan tanggung jawab dari pengelola dan Suku Dinas Perpustakaan Daerah. Diperlukan beberapa pembelajaran tentang bagaimana membuat laporan yang diberikan langsung oleh pegawai dari Suku Dinas Perpustakaan Daerah kepada pengelola RPTRA.

George Edward III yang dikutip oleh Agustino (2008:152), menjelaskan bahwa implementasi program bisa jadi masih belum efektif karena adanya ketidakefisienan struktur birokrasi (*deficiencies in bureaucratic structure*). Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antara unit-unit organisasi yang ada dalam

organisasi yang bersangkutan maupun organisasi dengan organisasi lain. Struktur birokrasi mencakup dimensi faragmentasi dan standart prosedur operasi yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana program dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya. jadi kalau ada pelaksana program yang masih merangkap justru akan membuat pekerjaan tidaklah efektif.

Adanya keselarasan dan juga kerja sama yang baik antar bagian di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), mulai dari bagian sekretariat, bagian umum, bagian kepegawaian, bidang perencanaan dan anggaran, bidang keuangan, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang penggerakan dan ketahanan keluarga membuat kinerja dari DPAPP bisa berjalan dengan baik. Begitu pula dengan hubungan DPPAPP dengan Dinas-dinas lain yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan RPTRA khususnya Suku Dinas Kota Jakarta Barat membuat program dapat berjalan dengan efektif.

Dari analisis diatas peneliti berpendapat bahwa pembagian struktur organisasi di DPPAPP sudah berjalan dengan baik, dimana sudah dapat bekerja sama sebagai satu kesatuan dalam pelayanannya kepada masyarakat. Namun walaupun demikian perlu adanya peningkatan kerja sama antara dinas-dinas yang terlibat dengan pengelola yang berada langsung di RPTRA. Sehingga kedepannya program RPTRA dapat berjalan dengan lebih baik sesuai dengan SOPs yang ada di tiap-tiap dinas.



## **2. Faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi Implementasi Program RPTRA di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat**

### **a. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program**

#### **1. Tidak adanya anggaran khusus dinas-dinas terkait**

Menurut model Edward III yang dikutip oleh Widodo (2009:36) mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi program. Empat variable atau faktor itu antara lain meliputi variabel atau faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Dalam faktor sumber daya terdapat sumber daya anggaran atau keuangan, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pada pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Hal ini ditegaskan oleh Edward III yang dikutip oleh Widodo (2009:100) mengatakan dalam studinya yakni keterbatasan anggaran dan oposisi warga yang membatasi akusisi fasilitas yang memadai. Hal ini pada gilirannya membatasi kualitas layanan yang dapat diberikan pelaksana kepada publik.

Menurut pengamatan peneliti yang telah melakukan penelitian serta wawancara, faktor sumber daya anggaran dari pelaksanaan program sangat berpengaruh terhadap kelancaran pelaksanaan program RPTRA dalam hal pemeliharaan fasilitas, pemenuhan beberapa komponen yang menjadi standarisasi dari dinas-dinas terkait yang terlibat seperti keragaman koleksi buku-buku yang ada diruang perpustakaan RPTRA. Hal ini terjadi karena tidak adanya anggaran khusus yang dimiliki oleh tiap-tiap dinas yang terlibat dalam pelaksanaan program

RPTRA. Dalam sistem APBD di Kota DKI Jakarta sudah menggunakan sistem *e-budgeting* sehingga sulit untuk memberikan pelayanan yang maksimal di RPTRA ketika anggaran yang ada tidak mencantumkan untuk keperluan program RPTRA.

Hambatan tersebut membuat pelaksanaan program RPTRA menjadi sedikit terganggu dan terhambat. Selama ini telah ada tindakan yang telah dilakukan oleh dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini:

- a. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dari adanya RPTRA dilingkungan mereka. Hal ini dilakukan agar masyarakat sadar dan ikut menjaga serta membantu berjalannya program RPTRA. Hal ini dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Daerah untuk mengajak masyarakat menyumbangkan buku-buku yang mereka miliki untuk dijadikan koleksi buku di perpustakaan yang ada di RPTRA. Antusiasme masyarakat lumayan tinggi dengan banyaknya buku yang masuk dari masyarakat.
- b. Menangani masalah sebisa mungkin yang ada di RPTRA. Seperti kerusakan beberapa fasilitas yang ada di RPTRA, apabila dapat diselesaikan oleh Pengurus yakni Kelurahan Kembangan Utara. Mereka akan menangani masalah tersebut tanpa menunggu bantuan dari CSR atau Pemerintah Provinsi bergerak.

Jika anggaran untuk perawatan dan pemeliharaan dalam program RPTRA tidak juga dianggarkan, maka tidak menutup kemungkinan hal ini akan memberikan dampak yang besar ke depannya bagi pelaksanaan program RPTRA.

Akibat terburuknya adalah berhenti beroperasinya program RPTRA yang ada untuk melayani masyarakat.

## 2. Kurangnya jumlah pengelola RPTRA

Menurut Edward III yang dikutip oleh Widodo (2009:98-99) mengungkapkan bahwa sumber daya manusia harus cukup (jumlah) dan cakap (keahlian), karena efektifitas pelaksanaan program sangat tergantung kepada sumber daya manusia yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan program. Sumber daya manusia harus mengetahui apa yang harus dilakukan, sehingga mereka SDM harus mempunyai informasi yang cukup dalam, tidak hanya berkaitan dengan bagaimana cara melakukan program, tetapi juga mengetahui arti penting mengenai kepatuhan pihak lain yang terlibat peraturan dan peraturan yang berlaku. Saat ini di tiap RPTRA memiliki pengelola yang berjumlah enam orang. Tiap pengelola memiliki tugas dan perannya masing-masing. Mereka direkrut melalui serangkaian tes yang dilakukan oleh DPPAPP. Sehingga dari segi keahlian dalam menangani masalah yang ada di RPTRA, mereka sudah memilikinya.

Namun yang menjadi masalah adalah ketika RPTRA mengadakan kegiatan dalam skala besar yakni melibatkan banyak masyarakat yang menjadi pesertanya dengan antusias yang cukup tinggi. Seperti kegiatan program pangan murah yang banyak melibatkan masyarakat. Jumlah anggota pengelola yang berjumlah enam orang, dirasa kurang untuk melakukan kegiatan dengan skala besar seperti itu. Hal ini dilihat dari perlunya mendatangkan pengelola dari RPTRA lain ketika sedang

melaksanakan kegiatan berskala besar. Ketika sebuah kegiatan yang kekurangan anggota panitia, maka akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi dari kegiatan tersebut. Seperti akan terjadi antrian yang panjang baik dari pendaftaran hingga pengambilan bahan-bahan pangan murah.

Untuk itu menurut peneliti perlu adanya aturan baru yang mengatur tentang jumlah anggota pengelola di tiap RPTRA. Mulai dari memanfaatkan masyarakat sekitar yang tidak termasuk sebagai partisipan untuk ikut membantu pelaksanaan kegiatan, sehingga ketika melaksanakan kegiatan tidak lagi kekurangan anggota panitia. Dengan begitu dapat menambah jumlah anggota panitia kegiatan tanpa banyak menambah pengeluaran anggaran. Sehingga diharapkan kedepannya pelaksanaan kegiatan yang melibatkan banyak partisipan atau masyarakat dapat berjalan lebih baik lagi.

### 3. Masyarakat yang merusak fasilitas RPTRA

Korten dalam Andersen (1997:12) menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Dalam hal rusaknya fasilitas RPTRA yakni tembok yang mengelilingi RPTRA, menurut peneliti merupakan bentuk dari kurang sesuainya pemahaman antara program yang diberikan dengan penerima program yakni masyarakat. Tembok RPTRA yang diperuntukan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dan fasilitas yang ada didalam RPTRA tidak sepaham dengan apa yang dipikirkan masyarakat. Masyarakat berpikir dengan adanya tembok tersebut, akses mereka untuk keluar dari

perkampungan yang mereka tinggali menjadi terhambat. Hal ini yang menimbulkan terjadinya pembobolan tembok RPTRA oleh masyarakat pada awal dibangunnya RPTRA Kembangan Utara. Dengan kata lain apa yang dibutuhkan masyarakat saat itu adalah akses jalan keluar dari perkampungan, sedangkan faktanya mereka terhalangi oleh tembok RPTRA yang sesungguhnya diperuntukan untuk melindungi anak-anak dan fasilitas RPTRA yang ada.

Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai sadar betapa pentingnya tembok pelindung ini. Demi menjaga fasilitas yang ada dan juga putra-putri mereka yang bermain di RPTRA. Sehingga ketika pengelola RPTRA beserta pengurus memperbaiki tembok yang dijebol masyarakat. Tidak ada lagi pengebolan tembok yang terjadi kedepannya hingga saat ini.

#### **b. Faktor Pendukung Pelaksanaan Program**

##### **1. Adanya Peraturan Gubernur Tentang Pengelolaan RPTRA**

Dalam proses pelaksanaan program RPTRA adanya acuan atau pedoman yang jelas dan kuat secara hukum membuat proses pelaksanaan RPTRA dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 dan Peraturan Gubernur No. 40 Tahun 2016 tentang pengelolaan RPTRA. Di dalamnya tertuang tentang tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap SKPD terkait dalam proses pengelolaan RPTRA. Hal ini yang membuat segala kegiatan yang dilakukan RPTRA tidak tumpang tindih antar SKPD dan benar-benar dilakukan oleh SKPD yang memiliki kompetensi dibidangnya. Dengan begitu proses pelaksanaan program RPTRA yang dilakukan harus

bersumber pada perundang-undangan yang ada, dan sebagai acuan atau pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan RPTRA.

## 2. Adanya bantuan dana baik dari pihak Swasta maupun Masyarakat

Dalam proses pembangunan RPTRA Kembangan Utara, dana yang dianggarkan oleh PT. Gajah Tunggal sebagai CSR sangat berguna dan bermanfaat bagi RPTRA Kembangan Utara. Baik dari segi pembangunan hingga segi pemeliharaan fasilitas yang ada enam bulan kedepan setelah peresmian RPTRA Kembangan Utara. Dengan adanya bantuan dari CSR ini dapat mempermudah pembangunan dan pelaksanaan program RPTRA.

Bantuan lain datang dari masyarakat, bantuan dari masyarakat ini berupa partisipasi dalam pemberian bantuan buku untuk mengisi perpustakaan yang ada di RPTRA. Tentu dengan adanya bantuan dari pihak swasta yakni PT. Gajah Tunggal dan partisipasi dari masyarakat mempermudah segala proses kegiatan yang akan dilakukan oleh RPTRA Kembangan Utara itu sendiri dan meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi program RPTRA.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan terkait rumusan masalah dan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat belum berjalan dengan baik dan optimal.
  - a. Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program RPTRA di RPTRA Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berjalan dengan baik seiring berjalannya waktu.
  - b. Sumber daya yang ada dalam implementasi program RPTRA di RPTRA Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat untuk sumber daya fasilitas dan sumber daya anggaran sudah memadai sedangkan untuk sumber daya manusia belum memadai dari segi jumlah.
  - c. Disposisi/kemauan pengelola yang ada di RPTRA Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat dalam melaksanakan kegiatan program RPTRA sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari terlaksananya kegiatan yang dilakukan setiap hari berjalan dengan baik dan lancar.
  - d. Struktur organisasi yang ada dalam Implementasi Program RPTRA Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat sudah berjalan

dengan baik. Karena sudah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 196 Tahun 2015 dan Pergub No. 40 Tahun 2016 tentang Pengelolaan RPTRA.

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Program RPTRAdi Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat

- a. Faktor penghambat yang dihadapi selama implementasi program RPTRA di Kembangan Utara yakni tidak adanya anggaran khusus masing-masing dinas terkait, kurangnya jumlah pengelola RPTRA, masyarakat yang merusak fasilitas RPTRA.
- b. Faktor pendukung yang diterima selama implementasi program RPTRA di Kembangan Utara yakni adanya peraturan gubernur tentang pengelolaan RPTRA, adanya bantuan dana baik dari pihak swasta maupun masyarakat.

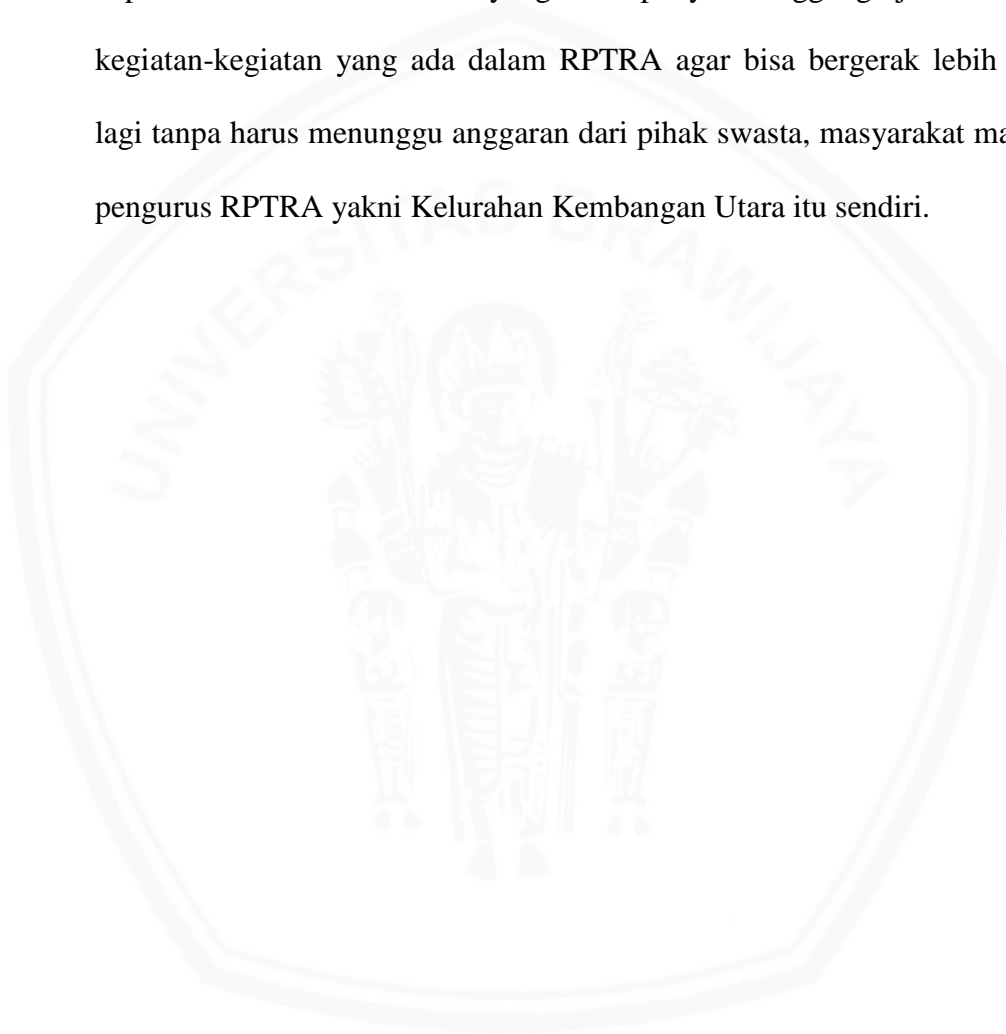
## **B. SARAN**

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan dalam penelitian di lapangan, maka penulis mengajukan beberapa saran perbaikan yang dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya pemecahan masalah. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penambahan sumberdaya manusia, yakni para pengelola RPTRA yang bertugas setiap harinya di RPTRA. Karena dalam hal jumlah, pengelola yang ada masih dinilai kurang untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan besar yang mengundang keikutsertaan partisipasi masyarakat yang banyak.

Agar kedepannya kegiatan besar yang berlangsung dapat berjalan sesuai rencana baik tujuan dan sasaran juga waktu yang ditentukan.

2. Untuk meningkatkan keberhasilan implementasi program RPTRA, maka pemerintah daerah harus memberikan anggaran khusus yang diberikan kepada dinas-dinas terkait yang mempunyai tanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan yang ada dalam RPTRA agar bisa bergerak lebih cepat lagi tanpa harus menunggu anggaran dari pihak swasta, masyarakat maupun pengurus RPTRA yakni Kelurahan Kembangan Utara itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2012. *Kebijakan Publik (Edisi 2)*. Jakarta: Salemba 4.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Ananta, Yanurisa. 2018. "Target Penambahan RTH di Ibu Kota belum Jelas" diakses dari <http://mediaindonesia.com/read/detail/148194-target-penambahan-rth-di-ibu-kota-belum-jelas> pada tanggal 21 Desember 2018.
- Andersen, E. James. 1997. *Public Policy-Making, Thrid Edition*. New York: Holt Rinchart Wintson.
- Anderson, James. 2011. *Public Policy Making: An Introduction*. USA: Wadsworth.
- Ardiahanni, Dian. 2016. "Tembok Jebol di Tengah Hijaunya RPTRA Kembangan" diakses dari <http://megapolitan.kompas.com/read/2016/02/03/16253261/TembokJebol.di.Tengah.Teduhnya.RPTRA.Kembangan>. Pada tanggal 2 Maret 2017.
- Azizah, Nur. 2018. "Perda RPTRA Segera Rampung" diakses dari <http://news.metrotvnews.com/metro/JKRIY47b-perda-rptra-segera-rampung> pada tanggal 21 Desember 2018
- Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. 2016. *Jakarta Dalam Angka*. Jakarta: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.
- Bappeda Mojokerto, "Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Mojokerto" [http://bappeda.mojokertokab.go.id/?vi=artikel\\_detail&id=12&token=0073b5f4b05e095cb3019753713c162b](http://bappeda.mojokertokab.go.id/?vi=artikel_detail&id=12&token=0073b5f4b05e095cb3019753713c162b) diakses pada tanggal 30 Maret 2017.
- Bappenas.go.id. "Komitmen Serius Indonesia Dalam Melaksanakan Sustainable Development Goals 2015-2030" diakses dari [https://www.bappenas.go.id/files/9915/0397/6784/Siaran\\_Pers\\_-](https://www.bappenas.go.id/files/9915/0397/6784/Siaran_Pers_-)

Komitmen Serius Indonesia dalam Melaksanakan Sustainable Development Goals 2015-2030.pdf pada tanggal 21 Desember 2018.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Chomaria, Nurul. 2012. *Pendidikan Karakter Untuk Anak*. Solo: Aqwam.

Creswell, J. C. 2012. *Educational Research, Planning, Conducting and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. 4th Edition. Boston: Pearson.

data.jakarta.go.id “Daftar Data RPTRA yang Sudah Diresmikan sampai Dengan Juni 2016” diakses dari <http://data.jakarta.go.id/dataset/daftar-rptra-yang-sudah-diresmikan-per-tanggal-7-juni-2016/resource/4be77ca8-d120-40dc-a160-ac7cef68e16a> pada tanggal 1 April 2017

data.jakarta.go.id “Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2018” diakses dari <http://data.jakarta.go.id/dataset/data-apbd-provinsi-dki-jakarta-tahun-2018> pada tanggal 21 Desember 2018

data.jakarta.go.id “Data Penduduk Usia Anak tahun 2015” diakses dari <http://data.jakarta.go.id/dataset/data-penduduk-usia-anak-0-17-tahun/resource/4081ca33-90e2-41ee-b9c0-f8f8b9ef630e> pada tanggal 1 April 2017

Definisi Kota Layak Anak. diakses di [kla.or.id](http://kla.or.id) pada tanggal 30 Maret 2017.

Eliana Riggio. “Child Friendly Cities: Good Governance in The Best Interest of The Child”. *Journal Environment and Urbanization Vol 14 No. 2*. 2002. hlm 45. Diunduh dari <http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QF15972,d.dGc> pada tanggal 30 Maret 2017.

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World*. New Jersey: Princeton University Press.

Islmay, M. Irfan. 2002. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jones, Charles O. 1991. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: Rajawali Press.

Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan 10 Provinsi Untuk Mengembangkan Kota Layak Anak.

Keputusan Gubernur Nomor 736 tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu sebagai Pengembangan Kota Layak Anak.

Keputusan Gubernur Nomor 1192 tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak di Provinsi DKI Jakarta.

Komariah, Aan & Satori, Djam'an. 2010. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

KPAI, "Klaster Pengaduan Masalah Sosial Anak di Indonesia tahun 2011-2014" dilihat <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/12/SESI%20II%20-%20202.%20paparan-kementerian-2014-nov-bandung-erlinda-REV-fix.pdf> , diakses pada 30 Maret 2017

Lestari, Suci Rizqi. 2018. "Ahli Waris Bocah Korban Kecelakaan di Kembangan Dapat Santunan". Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-3885216/ahli-waris-bocah-korban-kecelakaan-di-kembangan-dapat-santunan> pada tanggal 21 Desember 2018

Moloeng, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy Edisi 4*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen, "Daftar Pejabat Struktural" diakses dari <http://ppid.jakarta.go.id/daftar-pejabat-struktural> pada tanggal 10 Desember 2017



- Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 283 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
- Rohman, Arif. 2009. *Politik Ideologi Pendidikan*. Yogyakarta: Laksa Bang Mediatama Yogyakarta.
- Setyawan, Bambang. 2015. "Ini Tampang Pembunuh & Pemerkosa Bocah 9 Tahun" diakses dari <https://www.kompasiana.com/bamset2014/56191d544f7a613615588c26/ini-tampang-pembunuh-pemerkosa-bocah-9-tahun> pada tanggal 21 Desember 2018.
- Siagian, Sondang P. 2003. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sunggono, Bambang. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan*. Makasar: Persadi.

- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truen RTH.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (1)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2)
- UNICEF. *Child Friendly Cities*. Diakses di <https://www.unicef.org.nz/Child-Friendly-Cities/About.org> pada 30 Maret 2017.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wahab, Solichin Abdul. 1977. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: Centre of Academic Publising Service (CAPS).
- Widodo, Joko. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia.

## LAMPIRAN

### 1. Surat Pengajuan Riset

#### a. Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP) DKI JAKARTA



#### KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

##### UNIVERSITAS BRAWIJAYA

##### FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

<http://fia.ub.ac.id>

E-mail: [fia@ub.ac.id](mailto:fia@ub.ac.id)

Nomor : /UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk  
Jakarta  
Jl. Raya Bekasi Timur, KM 18, Pulogadung, Jakarta Timur.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Shugy Rakasiwi

Alamat : Jl. Kumis Kucing Dalam RT 4 RW 2 No. 41, Tembalangan.  
Kota Malang.

NIM : 135030100111109

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan  
Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

  
Ibu Togi Dami  
20 Juni 2017

Malang, 8 Mei 2017  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TTI



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PEMBERDAYAAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN  
PENDUDUK PROVINSI DKI JAKARTA (DPPAPP)**

Jalan Raya Bekasi Timur KM 18 Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur

Telepon : (021) 22861988, Fax. (021) 22861051

Website : <http://dppapp.jakarta.go.id> E-mail : [dppapp@jakarta.go.id](mailto:dppapp@jakarta.go.id)

J A K A R T A

Kode Pos : 13250

Nomor : 3057/-1.851.8

Jakarta, 7 Juni 2017

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Persetujuan Permohonan Riset

Kepada  
Yth. Ketua Program Studi Administrasi  
Universitas Brawijaya  
Jln. MT. Haryono 163,  
di  
Malang

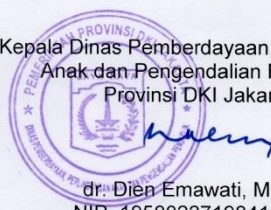
Menindaklanjuti surat dari Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Nomor 6355/UN10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 4 Mei 2017 hal Permohonan Riset :

N a m a : Shugy Rakasiwi  
NIM : 135030100111109  
Fakultas : Ilmu Administrasi Negara  
Program : Sarjana Strata 1  
Program Study : Ilmu Administrasi Publik

pada prinsipnya kami tidak berkeberatan dan dapat menerima Permohonan Riset yang bersangkutan dilingkungan Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta dan dalam rangka penulisan skripsi dengan judul *Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (SPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat*. selama 2 (dua) Minggu terhitung mulai tanggal 7 Juni s.d 22 Juni 2017.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara saya ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan  
Anak dan Pengendalian Penduduk  
Provinsi DKI Jakarta,



dr. Dien Emawati, M. Kes  
NIP 195802271984102003


Tembusan :

1. Aspem Sekda Provinsi DKI Jakarta;
2. Askesra Sekda Provinsi DKI Jakarta;
3. Sudin PPAPP Kota Administrasi Jakarta Barat..





**b. Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian  
Penduduk Jakarta Barat**

	<b>KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI</b> Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id
---	--

---

Nomor : 6355 /UN10.F03.11.11/PN/2017  
Lampiran : -  
Hal : Riset/Survey


Kepada : Yth. Kepala Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk  
Jakarta Barat  
Jl. Raya Kembangan, No. 2, Blok B Lt 14, Jakarta Barat.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Shugy Rakasiwi  
Alamat : Jl. Kumis Kucing Dalam RT 4 RW 2 No. 41, Tembalangan.  
Kota Malang.  
NIM : 135030100111109  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan  
Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat  
Lamanya : 2 (dua) minggu.  
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 8 Mei 2017  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi Administrasi Publik

  
**Dr. Lili Indah Mindarti, M.Si**  
NIP. 19630524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :  
1. Perusahaan/Instansi  
2. Mahasiswa  
3. Program Studi

## c. Kelurahan Kembangan Utara, Jakarta Barat



## KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6355 / UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Lurah Kembangan Utara  
Jakarta Barat  
Jl. K.H. Saanan, RT 04/ RW 02, Kembangan Utara, Jakarta Barat.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan  
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Shugy Rakasiwi  
Alamat : Jl. Kumis Kucing Dalam RT 4 RW 2 No. 41, Tembalangan, Malang.  
NIM : 135030100111109  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan  
Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat  
Lamanya : 2 (dua) minggu.  
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Mei 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik

*Handwritten signature*  
KOSI DEWIS  
(Kosi Kosro)



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002


Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





## d. PKK Jakarta Barat

	<b>KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI</b> <b>UNIVERSITAS BRAWIJAYA</b> <b>FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI</b> Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227 http://fia.ub.ac.id E-mail: fia@ub.ac.id
---	--

---

Nomor : 6555 / UN10.F03.11.11/PN/2017  
Lampiran : -  
Hal : Riset/Survey


Kepada : Yth. Ketua Tim Penggerak PKK  
Jakarta Barat  
Kantor Walikota Jakarta Barat.

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Shugy Rakasiwi  
Alamat : Jl. Kumis Kucing Dalam RT 4 RW 2 No. 41, Tembalangan, Malang.  
NIM : 135030100111109  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat  
Lamanya : 2 (dua) minggu.  
Peserta : 1 (satu) orang.


Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

*Jakarta 19 Juni 2017*



Eti Herisanti  
(PIC RPTRA)

Malang, 4 Mei 2017  
a.n. Dekan  
Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU

## e. Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Jakarta Barat



## KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6385/UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan  
Jakarta Barat  
Jl. Raya kembangan, No. 2, Blok A Lt. 9, Jakarta Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan  
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Shugy Rakasiwi  
Alamat : Jl. Kumis Kucing Dalam RT 4 RW 2 No. 41, Tembalangan, Malang  
NIM : 135030100111109  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan  
Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat  
Lamanya : 2 (dua) minggu.  
Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Mei 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik

4/10000  
15/6/17



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



## f. Kantor Perpustakaan Daerah Jakarta Barat



## KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6355 / UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Perpustakaan Daerah

Jakarta Barat

Jl. Mangga Raya, RT 13/ RW 9, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Shugy Rakasiwi

Alamat : Jl. Kumis Kucing Dalam RT 4 P W 2 No. 41, Tembalangan, Malang.

NIM : 135030100111109

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Mei 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Kep. Indya Haning  
Perpustakaan I  
16 Juni 2016.



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si  
NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU



## g. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat



## KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

## UNIVERSITAS BRAWIJAYA

## FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

Jl. MT. Haryono 163, Malang 65145, Indonesia

Telp. : +62-341-553737, 568914, 558226 Fax : +62-341-558227

http://fia.ub.ac.id

E-mail: fia@ub.ac.id

Nomor : 6355 /UN10.F03.11.11/PN/2017

Lampiran : -

Hal : Riset/Survey

Kepada : Yth. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Suku Dinas Kesehatan  
Jakarta Barat  
Jl. S Parman No.2 , Jakarta Barat

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang mohon dengan hormat bantuan  
Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa :

Nama : Shugy Rakasiwi

Alamat : Jl. Kumis Kucing Dalam RT 4 RW 2 No. 41, Tembalangan, Malang

NIM : 135030100111109

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Prodi : Ilmu Administrasi Publik

Judul : Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan  
Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat

Lamanya : 2 (dua) minggu.

Peserta : 1 (satu) orang.

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Malang, 4 Mei 2017

a.n. Dekan

Ketua Program Studi Administrasi Publik



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si

NIP. 19690524 200212 2 002

Formulir dibuat rangkap 4 untuk :

1. Perusahaan/Instansi
2. Mahasiswa
3. Program Studi
4. Arsip TU





**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
SUKU DINAS KESEHATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

Jl. Raya Kembangan No. 2 - Telp : 58356225 Fax : 58356225 - JAKARTA

Kode Pos : 11610

Nomor : 304 / 1-1.77  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Ijin Survey

11 Juli 2017

Kepada

Yth. 1. Kepala PKM Kec. Kembangan  
2. Kepala PKM Kel. Kembangan Utara  
di -  
Jakarta

Sehubungan dengan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya Nomor 6355/UN 10.F03.11.11/PN/2017 tanggal 4 Mei 2017 perihal tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami dapat memberikan ijin survey di Puskesmas Kecamatan Wilayah Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat, dan laporan hasil Penelitian agar dikirimkan ke Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat cq. Seksi Sumber Daya Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat atau email ke sdjakartabarat@gmail.com. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada :

Pelaksanaan Penelitian : 3 Juli 2017 s/d 21 Juli 2017

No	Nama	NIM	Judul Survey
1	Shugy Rakasiwi	135030100111109	Implementasi Kebijakan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak di Kelurahan Kembangan Utara

Demikian agar Saudara dan seluruh Staf Puskesmas dapat membantu dan setiap mahasiswa yang melakukan kegiatan survey harus mengikuti prosedur dan peraturan yang berlaku, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



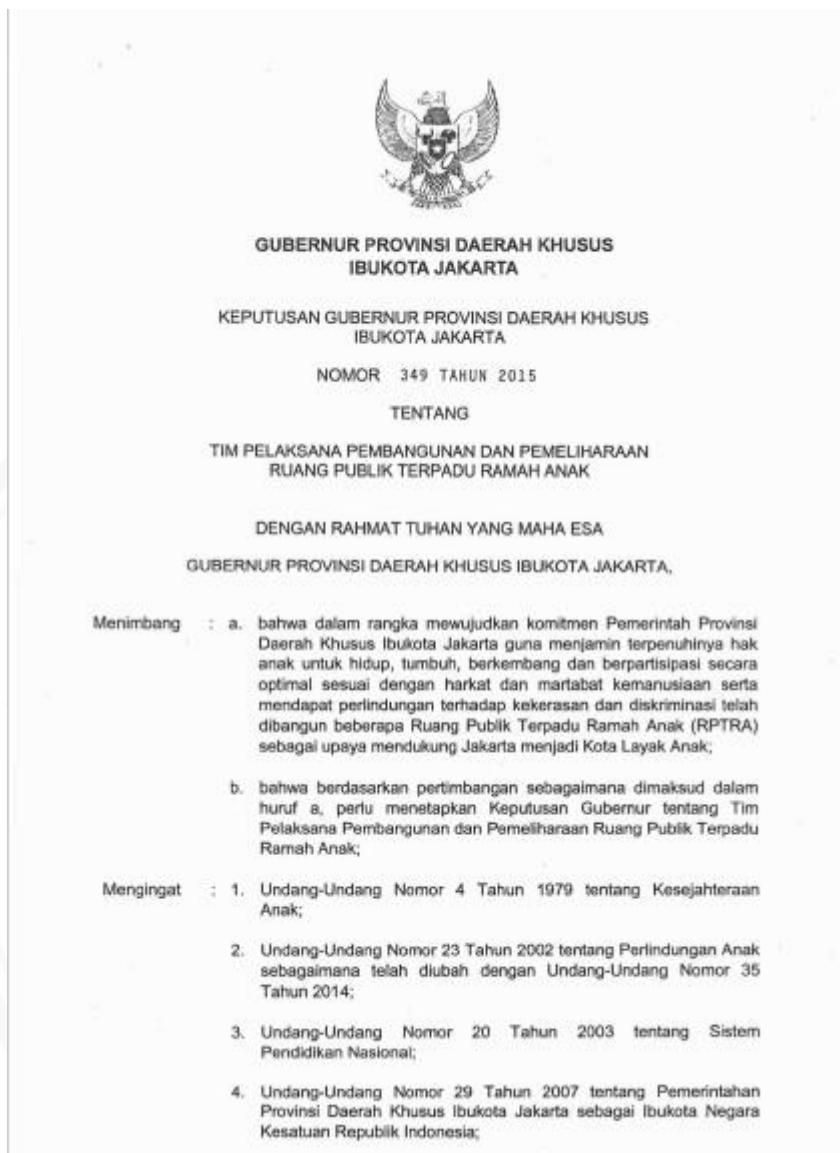
Kepala Suku Dinas Kesehatan  
Kota Administrasi Jakarta Barat

dr. Weningtyas Purnomomoni, MARS  
NIP. 197205242006042016

Tembusan.

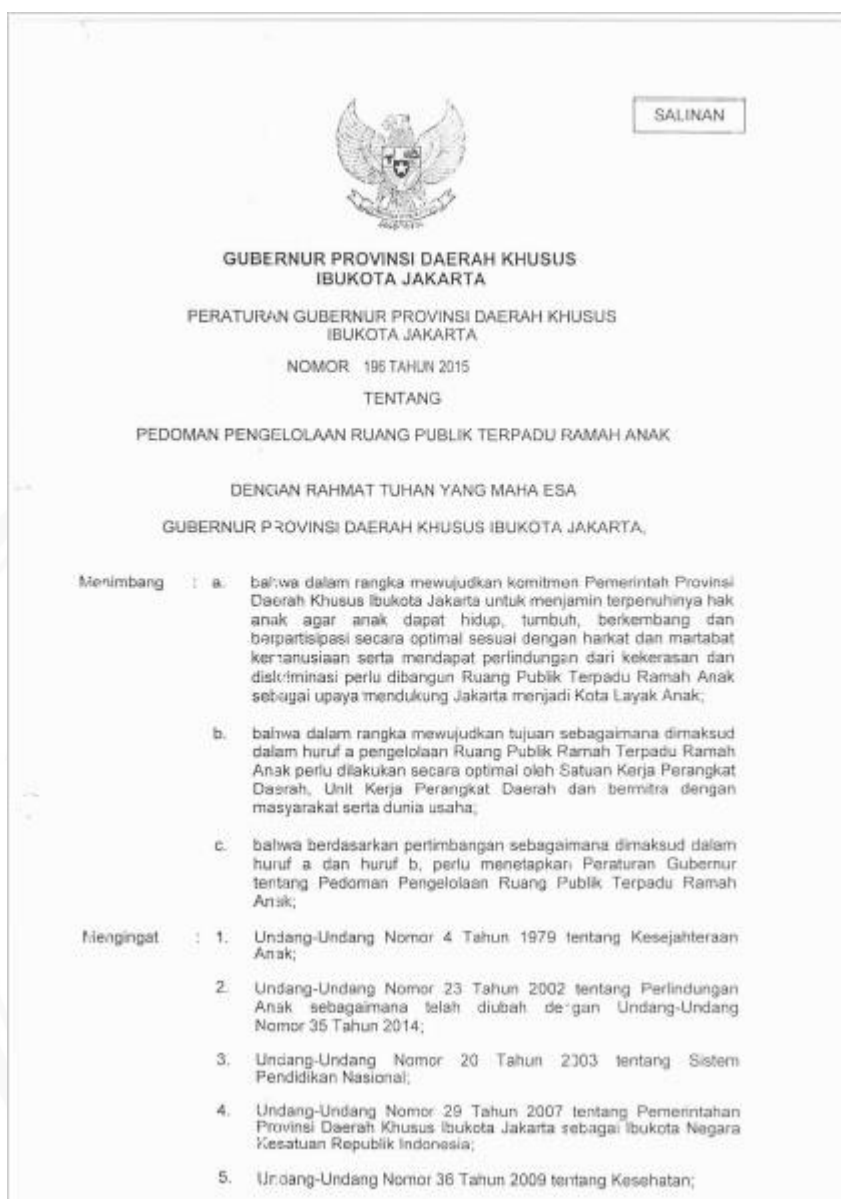
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
2. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Publik Universitas Brawijaya ✓

## 2. Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 349 Tahun 2015

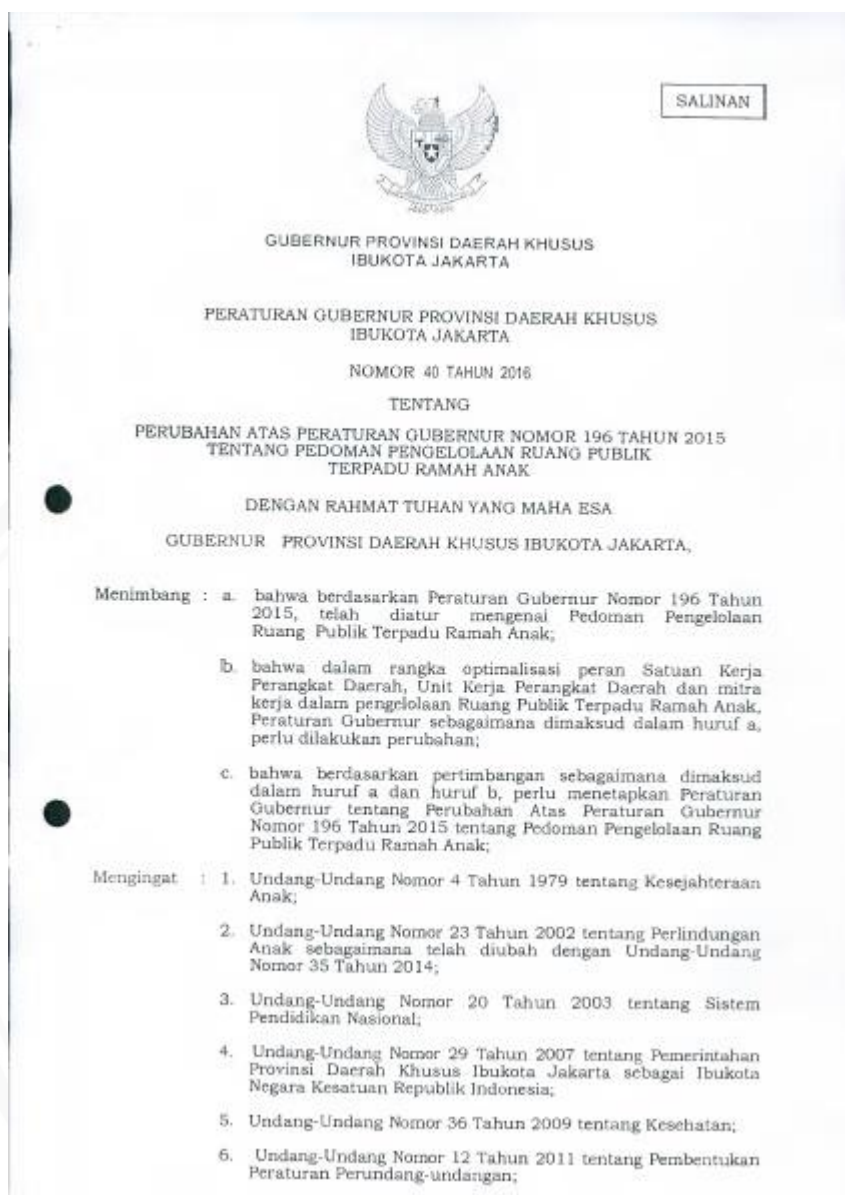




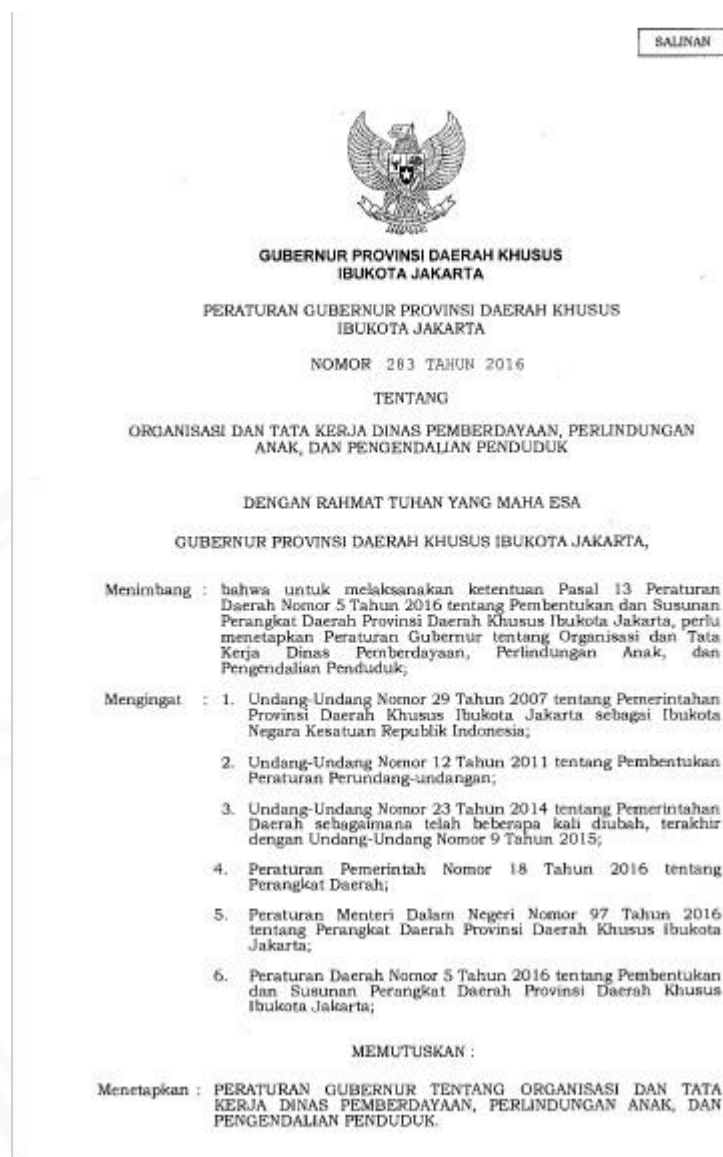
### 3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015



#### 4. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 40 Tahun 2016



## 5. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 283 Tahun 2016



## 6. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan yang diajukan ke Instansi:

### 1) Komunikasi

- a. Bagaimana proses komunikasi dalam hal transimi informasi yang ada dalam implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara antar dinas terkait dan masyarakat?
- b. Bagaimana proses komunikasi dalam hal kejelasan informasi yang ada dalam implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara?
- c. Bagaimana proses komunikasi dalam konsistensi atau ketetapan informasi yang ada dalam implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara?

### 2) Sumberdaya

- a. Bagaimana sumberdaya manusia yang ada dalam implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara?
- b. Bagaimana sumberdaya anggaran yang ada dalam implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara?
- c. Bagaimana sumberdaya fasilitas yang ada dalam implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara?

### 3) Disposisi

- a. Bagaimana proses perekrutan anggota pengelola Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara?

### 4) Struktur Organisasi

- a. Bagaimana pembagian tugas pokok dan fungsi dalam struktur organisasi dalam implementasi program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Kelurahan Kembangan Utara?

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada masyarakat:

- 1) Apa ibu atau bapak tau ada RPTRA di dekat tempat tinggal ibu atau bapak?
- 2) Apa ibu atau bapak tau fungsi dari RPTRA ?
- 3) Seberapa sering ibu atau bapak datang ke RPTRA?
- 4) Manfaat apa yang ibu atau bapak dapat dari RPTRA?
- 5) Seberapa sering anak ibu atau bapak bermain ke RPTRA?
- 6) Apa ibu atau bapak merasa aman jika anak bermain ke RPTRA?
- 7) Program apa yang paling ibu suka dari RPTRA?

Daftar pertanyaan yang diajukan kepada anak-anak:

- 1) Apa kamu tau ada RPTRA di dekat rumah kamu?
- 2) Apa manfaat yang kamu dapet dengan adanya RPTRA?
- 3) Seberapa sering kamu datang ke RPTRA?
- 4) Apa yang biasa kamu lakukan jika datang ke RPTRA?
- 5) Kegiatan apa yang biasanya di adakan di RPTRA?



## 7. Dokumentasi



(Bersama Ibu Togi Duma Sianturi, S.Sos sebagai kepala seksi pengelolaan dan kemitraan RPTRA di DPPAPP)



(Bersama Bapak Muhammad Nur dari Bidang Pemberdayaan Perempuan Suku Dinas PPAPP Jakarta barat)





(Bersama Ibu R Euis Dewi Sartika sebagai ketua seksi kesejahteraan rakat  
kelurahan Kembangan Utara)



(Bersama Ibu Eti Bambang sebagai ketua Pokja 2 di PKK Jakarta Barat)



(Bersama Bapak ignatius widodo K sebagai kepala seksi komunikasi informasi publik Sudin Kominfo Jakarta Barat)



(Bersama Ibu Rani Widya Hani sebagai Pustakawan I di Suku Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Jakarta Barat)





(Bersama Kepala Puskesmas Kelurahan Kembangan Utara Jakarta Barat)



(Bersama Ibu Asih dan anak sebagai warga sekitar RPTRA Kembangan Utara)



(Bersama Mila sebagai narasumber anak yang tinggal disekitar RPTRA  
Kembangan Utara)





(Bersama Pengelola RPTRA Kembangan Utara Jakarta Barat)



**Curriculum Vitae (CV)****A. Identitas Diri**

Nama : Shugy Rakasiwi  
 NIM : 135030100111109  
 Fakultas/Jurusan : Fakultas Ilmu Administrasi/ Ilmu Adm. Publik  
 Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 2 Mei 1995  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Alamat di Malang : Jl. Kumis Kucing Dalam RT.4 RW.2 No.41  
 Kel. Jatimulyo Kec. Lowokwaru, Malang  
 Alamat Asal : Jl. Pedongkelan Belakang RT 03 / RW 014 No. 44  
 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat  
 No. Telp : 083896688469  
 Publikasi/Karya Ilmiah : Implementasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) (Studi pada RPTRA Kelurahan Kembangan Utara Kota Administrasi Jakarta Barat)  
 Email : [shugy\\_rakasiwi@yahoo.com](mailto:shugy_rakasiwi@yahoo.com)

**B. Riwayat Pendidikan****Formal**

2001-2007 : SDN 05 Pagi Pegadungan  
 2007-2010 : SMP Negeri 45 Jakarta  
 2010-2013 : SMA Negeri 33 Jakarta  
 2013- 2018 : Universitas Brawijaya Malang  
 (Jurusan: Ilmu Administrasi Publik)